# DOKUMEN RENJA AKHIR

## SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
JL.PAHLAWAN NO.9 TELP. (024) 8311174 FAX. 8311266
SEMARANG 50243.

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2024.

Semarang, November 2023
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**
**PROVINSI JAWA TENGAH**
Kepala Biro Administrasi
Pembangunan Daerah

**ENDI FAIZ EFFENDI, S.Pi, MA**
Pembina Utama Muda
NIP. 19710909 199603 1 006

**DAFTAR ISI**


Daftar Isi ..... i
Daftar Tabel ..... ii
Lembar Pengesahan .....
**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**
1.1. Latar Belakang ..... 1
1.2. Landasan Hukum ..... 2
1.3. Maksud dan Tujuan ..... 5
1.4. Sistematika Penulisan ..... 5
**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SETDA TAHUN 2022 ..... 6**
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Setda Tahun 2022 dan Capaian Renstra Tahun 2018-2023 ..... 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah ..... 40
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Setda ..... 43
2.4 Reviu terhadap RKPD ..... 45
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... 83
**BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH ..... 85**
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah ..... 85
3.2 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ..... 86
3.3 Manajemen Resiko Strategis Perangkat Daerah ..... 89

**BAB IV** RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH **..... 91**
**4.1** Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 ..... 91
**4.2** Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 ..... 115
**BAB IV PENUTUP ..... 130**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL


| | | | |
|---|---|---|---|
| Tabel | 2.1 | Rekapituliasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Setda s/d 2022 Provinsi Jawa Tengah ..... | 10 |
| Tabel | 2.2 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ..... | 41 |
| Tabel | 2.3 | Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024..... | 46 |
| Tabel | 2.4 | Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah..... | 46 |
| Tabel | 3.1 | Tujuan dan Sasaran ..... | 88 |
| Tabel | 3.2 | Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Resiko Strategis Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024..... | 90 |
| Tabel | 4.1 | Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah..... | 92 |
| Tabel | 4.2 | Rencana Tindak Pengendalian..... | 117 |

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 selanjutnya disebut Renja Setda Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Renstra Setda tahun 2024-2026 merupakan penjabaran RPD Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang ditetapkan sebagai dokumen perencanaan masa transisi dimana RPJMD Tahun 2018-2023 telah berakhir, sejalan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di tahun 2023. Oleh karena itu, Renja Setda Tahun 2024 disusun berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Renstra Setda Tahun 2024-2026.

Dokumen Renja Setda Tahun 2024 disusun sebagaimana mandat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan perundang-undangan lainnya yang dipedomani dalam proses penyusunan Renja Setda Tahun 2024 antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan-peraturan turunannya. Selain itu, beberapa permendagri yang juga dipedomani dalam penyusunan Renja Setda Tahun 2024 yaitu Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah; Permendagri Nomor 18 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Imendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.

Penyusunan dokumen Renja Setda Tahun 2024 memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan lainnya. Selain itu kebijakan Setda tahun 2024 juga memperhatikan keberlanjutan dari kebijakan Setda dalam Renstra Setda Tahun 2018–2023.

Renja Setda Tahun 2024 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Setda yaitu "Meningkatkan Kualitas Kebijakan daerah" dengan sasaran yaitu Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil. Renja Setda Tahun 2024 juga merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD), yang selanjutnya setelah tersusun APBD dengan Peraturan Daerah maka akan menjadi dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) sebagai dokumen pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah. Guna menjamin kesesuaian kinerja program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Sekretariat Daerah dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang;
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu Provinsi Jawa Tengah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Imendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2023 tentang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
30. Surat Edaran Gubernur Nomor 050.11/0000042 tentang Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

31. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.23/0002965 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Dan Penyelenggaran Forum Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Setda Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan selama satu tahun. Penyusunan Renja Setda juga dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi yang termaktub dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Adapun tujuan penyusunan Renja Setda adalah:

1. Sebagai pedoman atau acuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
2. Sebagai tolak ukur keberhasilan capaian kinerja Sekretariat Daerah selama Tahun Anggaran 2024 dan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanakan Program dan Kegiatan tahun berikutnya.
3. Untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar Biro dalam lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Renja Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SETDA TAHUN 2022

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Setda Tahun 2022 dan Capaian Renstra Tahun 2018-2023
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Setda
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Setda
- 2.4. Reviu Terhadap Rancangan RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Setda

3.3. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024

4.2. Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

BAB V PENUTUP

# BAB II

# EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SETDA TAHUN 2022

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Setda Tahun 2022 dan Capaian Renstra Tahun 2018-2023

Pada tahun 2022 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan 8 program dengan indikator program sejumlah 47 indikator dan 41 kegiatan dengan 88 indikator kegiatan. Evaluasi Pelaksanaan Renja Setda Tahun 2022 dan Capaian Renstra Tahun 2018-2023 sebagaimana dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Rekapituliasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Setda s/d 2022 Provinsi Jawa Tengah

**URUSAN SEKRETARIAT DAERAH**

| No. | Urusan/ Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| **PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM** | | | | | | | | | | |
| | **Biro Hukum** | | | | | | | | | |
| | | Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani | % | 96 | 95 | 100,00 | 105,26 | 100,00 | 100 | 100% |
| | | Persentase kabupaten/kota peduli HAM | % | 96 | 95 | 100,00 | 105,26 | 96,00 | 100 | 104% |
| | | Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan | % | 96 | 95 | 100,00 | 105,26 | 100,00 | 100 | 100% |
| | | Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi | % | 95 | 95 | 100,00 | 105,26 | 100,00 | 100 | 100% |
| 1 | Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan | | | | | | | | | |

| No. | Urusan/ Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Dokumen | 24 | 12 | 12 | 100,00 | 12,00 | 12 | 100% |
| | | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur | Dokumen | 24 | 12 | 12 | 100,00 | 12,00 | 12 | 100% |
| | | Jumlah dokumen kajian produk hukum | Dokumen | 24 | 12 | 12 | 100,00 | 12,00 | 12 | 100% |
| | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 24 | 12 | 12 | 100,00 | 12,00 | 12 | 100% |
| 2 | Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara | Dokumen | 24 | 12 | 12 | 100,00 | 12,00 | 12 | 100% |
| | | Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | Dokumen | 24 | 12 | 12 | 100,00 | 12,00 | 12 | 100% |
| **PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | | | | |
| | **Biro Kesejahteraan Rakyat** | | | | | | | | | |
| | | Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan dasar | % | 95 | 90 | 91,64 | 101,82 | 95,00 | 95,00 | 100% |
| | | Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan non dasar | % | 95 | 90 | 100,00 | 111,11 | 95,00 | 95,00 | 100% |

| No. | Urusan/ Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik | % | 42 | 40 | 40,00 | 100,00 | 42,00 | 42,00 | 100% |
| 1 | Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | | | | | | | | | |
| | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan | Dokumen | 8 | 4 | 4,00 | 100,00 | 3,00 | 3,00 | 100% |
| | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan | Dokumen | 8 | 4 | 4,00 | 100,00 | 3,00 | 3,00 | 100% |
| | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial | Dokumen | 8 | 4 | 4,00 | 100,00 | 3,00 | 3,00 | 100% |
| 2 | Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | | | | | | | | | |
| | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan | Dokumen | 8 | 4 | 4,00 | 100,00 | 3,00 | 3,00 | 100% |
| | | Jumlah rekomendasi pelaksnaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana | Dokumen | 8 | 4 | 4,00 | 100,00 | 3,00 | 3,00 | 100% |

| No. | Urusan/ Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | Jumlah rekomendasi pelaksnaan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan adminitrasi kependudukan | Dokumen | 8 | 4 | 4,00 | 100,00 | 4,00 | 4,00 | 100% |
| 3 | Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku | Dokumen | 8 | 3 | 3 | 100,00 | 3,00 | 3,00 | 100% |
| | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan | Dokumen | 6 | 2 | 2 | 100,00 | 3,00 | 3,00 | 100% |
| **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH** | | | | | | | | | | |
| | **Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama** | | | | | | | | | |
| | | Efektivitas kerjasama daerah | % | 95 | 90 | 100,00 | 111,11 | 95,00 | 95,00 | 100% |
| | | Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti | % | 90 | 90 | 100,00 | 111,11 | 90,00 | 90,00 | 100% |
| | | Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah | % | 95 | 90 | 100,00 | 111,11 | 95,00 | 95,00 | 100% |

| No. | Urusan/ Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah | | | | | | | | | |
| | | Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti | % | 95 | 90 | 100 | 111,11 | 95,00 | 95,00 | 100% |
| | | Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti | % | 95 | 90 | 100 | 111,11 | 95,00 | 95,00 | 100% |
| | | Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah | % | 95 | 90 | 100 | 111,11 | 95,00 | 95,00 | 100% |
| 2 | Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan | | | | | | | | | |
| | | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ | Dokumen | 16 | 8 | 8 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 100% |
| 3 | Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | | | | | | |
| | | Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD | % | 95 | 90 | 100 | 111,11 | 95,00 | 95,00 | 100% |
| | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM | Dokumen | 6 | 3 | 3 | 100,00 | 3,00 | 3,00 | 100% |
| | | Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | % | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100% |

| No. | Urusan/ Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| **PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN** | | | | | | | | | | |
| | **Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam** | | | | | | | | | |
| | | Presentase capaian kinerja program bidang infrastruktur | % | 96 | 95 | 98,99 | 104,20 | 96,00 | 96,00 | 100% |
| | | Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan | % | 95 | 90 | 97,05 | 107,83 | 95,00 | 95,00 | 100% |
| | | Presentase capaian kinerja program bidang pertanian | % | 90 | 87 | 93,42 | 107,38 | 90,00 | 90,00 | 100% |
| 1 | Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam | | | | | | | | | |
| | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian | Dokumen | 6 | 3 | 3 | 100,00 | 3,00 | 3,00 | 100% |
| | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan | Dokumen | 4 | 2 | 2 | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 100% |
| | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan | Dokumen | 4 | 2 | 2 | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 100% |
| | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Dokumen | 4 | 2 | 2 | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 100% |

| No. | Urusan/ Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM | Dokumen | 4 | 2 | 2 | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 100% |
| | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dokumen | 4 | 2 | 2 | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 100% |
| | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Dokumen | 4 | 2 | 2 | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 100% |
| | **Biro Perekonomian** | | | | | | | | | |
| | | Nilai kemandirian BLUD | % | 55 | 50 | 69,34 | 138,68 | 55,00 | 55,00 | 100% |
| | | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan | % | 82 | 80 | 87,50 | 109,38 | 82,00 | 82,00 | 100% |
| | | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan | % | 77 | 75 | 75,00 | 100,00 | 77,00 | 77,00 | 100% |
| | | Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha | % | 80 | 75 | 85,71 | 114,28 | 80,00 | 80,00 | 100% |
| | | Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan | % | 85 | 80 | 94,50 | 118,13 | 85,00 | 85,00 | 100% |

| No. | Urusan/ Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian | | | | | | | | | |
| | | jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro | Dokumen | 14 | 4 | 4,00 | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 100% |
| | | jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro | Dokumen | 12 | 2 | 2,00 | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 100% |
| | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan | Dokumen | 12 | 3 | 3,00 | 100,00 | 3,00 | 3,00 | 100% |
| | | jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan | Dokumen | 9 | 2 | 2,00 | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 100% |
| 2 | Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan | Dokumen | 8 | 4 | 4,00 | 100,00 | 4,00 | 4,00 | 100% |
| | | Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan | Dokumen | 4 | 2 | 2,00 | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 100% |
| | | Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Aneka Usaha | Dokumen | 6 | 3 | 3,00 | 100,00 | 3,00 | 3,00 | 100% |

| No. | Urusan/ Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Aneka Usaha | Dokumen | 4 | 2 | 2,00 | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 100% |
| | | Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BLUD | Dokumen | 4 | 2 | 2,00 | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 100% |
| | | Jumlah Dokumen kajian pengembangan BLUD | Dokumen | 4 | 2 | 2 | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 100% |
| **PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN** | | | | | | | | | | |
| | **Biro Administrasi Pembangunan Daerah** | | | | | | | | | |
| | | Capaian Pelaksanaan APBD | % | 98,50 | 98 | 99,09 | 101,11 | 98,50 | 98,50 | 100% |
| | | Capaian Pelaksanaan APBN | % | 95,50 | 95 | 98,90 | 104,11 | 95,50 | 95,50 | 100% |
| | | Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah | % | 85,00 | 80 | 92,00 | 115,00 | 85,00 | 85,00 | 100% |
| | | Persentase realisasi bantuan keuangan | % | 85,00 | 83 | 99,57 | 119,96 | 85,00 | 85,00 | 100% |
| | | Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi | % | 100,00 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100% |
| 1 | Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | |

| No. | Urusan/ Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD | Dokumen | 6 | 3 | 3 | 100,00 | 3,00 | 3,00 | 100% |
| | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN | Dokumen | 4 | 2 | 2,00 | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 100% |
| | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I | Dokumen | 16 | 8 | 8,00 | 100,00 | 8,00 | 8,00 | 100% |
| | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II | Dokumen | 16 | 8 | 8,00 | 100,00 | 8,00 | 8,00 | 100% |
| | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III | Dokumen | 16 | 8 | 8,00 | 100,00 | 8,00 | 8,00 | 100% |
| | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD | Dokumen | 6 | 3 | 3,00 | 100,00 | 3,00 | 3,00 | 100% |

| No. | Urusan/ Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 2 | Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | |
| | | Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap | % | 90 | 88 | 99,60 | 113,18 | 90,00 | 90,00 | 100% |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | Laporan | 8 | 4 | 4 | 100,00 | 4,00 | 4,00 | 100% |
| | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | Laporan | 8 | 4 | 4 | 100,00 | 4,00 | 4,00 | 100% |
| **PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA** | | | | | | | | | | |
| | **Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa** | | | | | | | | | |
| | | Efektivitas Pengadaan secara Elektronik | % | 90 | 85 | 95,27 | 112,08 | 90,00 | 90,00 | 100% |
| | | Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa | % | 95 | 93 | 94,80 | 101,94 | 95,00 | 95,00 | 100% |
| | | Persentase Permasalahan Kelembagaan UKPBJ dan Proses Pengadaan Barang/Jasa yang Terfasilitasi | % | 92 | 90 | 90,00 | 100,00 | 92,00 | 92,00 | 100% |
| 1 | Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | |

| No. | Urusan/ Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | Jumlah Dokumen Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa | Dokumen | 23 | 5 | 5,00 | 100,00 | 5,00 | 5 | 100% |
| 2 | Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa | Laporan | 6 | 3 | 3,00 | 100,00 | 3,00 | 3 | 100% |
| 3 | Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa | Laporan | 6 | 3 | 3,00 | 100,00 | 3,00 | 3 | 100% |
| **PROGRAM PENATAAN ORGANISASI** | | | | | | | | | | |
| | **Biro Organisasi** | | | | | | | | | |
| | | Efektifitas Pelaksanaan Analisis Jabatan OPD | % | 87,80 | 85,36 | 85,36 | 100,00 | 87,80 | 87,80 | 100% |
| | | Persentase Kabupaten/Kota yang Indeks Reformasi Birokrasinya meningkat | % | 91,42 | 85,71 | 85,71 | 100,00 | 91,42 | 91,42 | 100% |

| No. | Urusan/ Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya | % | 80,00 | 77,14 | 77,14 | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 100% |
| | | Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan | % | 89,47 | 81,58 | 85,88 | 105,27 | 100,00 | 100,00 | 100% |
| | | Persentase OPD yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya | % | 34,15 | 29,27 | 29,27 | 100,00 | 34,15 | 34,15 | 100% |
| | | Persentase OPD yang nilai PMPRB nya meningkat | % | 95,02 | 91,84 | 91,84 | 100,00 | 95,92 | 95,92 | 100% |
| | | Persentase OPD yang nilai SAKIP nya meningkat | % | 85,37 | 73,17 | 87,80 | 119,99 | 85,37 | 85,37 | 100% |
| | | Persentase UPP yang mengimplementasikan Standar Pelayanan | % | 85,63 | 73,65 | 76,65 | 104,07 | 85,63 | 85,63 | 100% |
| 1 | Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi | Dokumen | 4 | 2 | 2 | 100,00 | 2,00 | 2 | 100% |
| | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota | Dokumen | 8 | 4 | 4 | 100,00 | 4,00 | 4 | 100% |
| | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota | Dokumen | 4 | 2 | 2 | 100,00 | 2,00 | 2 | 100% |

| No. | Urusan/ Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 2 | Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD | Dokumen | 16 | 8 | 8 | 100,00 | 8,00 | 8 | 100% |
| | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota | Dokumen | 6 | 3 | 3 | 100,00 | 3,00 | 3 | 100% |
| | | Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya | Dokumen | 4 | 2 | 2 | 100,00 | 2,00 | 2 | 100% |
| | | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan | Dokumen | 4 | 2 | 2 | 100,00 | 2,00 | 2 | 100% |
| | | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik | Dokumen | 4 | 2 | 2 | 100,00 | 2,00 | 2 | 100% |
| **PROGRAM ADMINISTRASI UMUM** | | | | | | | | | | |
| | **Biro Umum** | | | | | | | | | |
| | | ersentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100% |
| | | Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100% |

| No. | Urusan/ Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100% |
| 1 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| | | Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah | Laporan | 36 | 12 | 12 | 100,00 | 12,00 | 12 | 100% |
| 2 | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| | | Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Laporan | 36 | 12 | 12 | 100,00 | 12,00 | 12 | 100% |
| 3 | Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| | | Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Laporan | 36 | 12 | 12 | 100,00 | 12,00 | 12 | 100% |

| No. | Urusan/ Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 4 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| | | Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga | Laporan | 36 | 12 | 12 | 100,00 | 12,00 | 12 | 100% |
| | | Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan | Laporan | 36 | 12 | 12 | 100,00 | 12,00 | 12 | 100% |
| | | Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas | Laporan | 36 | 12 | 12 | 100,00 | 12,00 | 12 | 100% |
| 5 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | |
| | | Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah | Laporan | 36 | 12 | 12 | 100,00 | 12,00 | 12 | 100% |
| 6 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | |

| No. | Urusan/ Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Laporan | 36 | 12 | 12 | 100,00 | 12,00 | 12 | 100% |
| | | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RT Pimpinan | Laporan | 36 | 12 | 12 | 100,00 | 12,00 | 12 | 100% |
| 7 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | |
| | | Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Laporan | 36 | 12 | 12 | 100,00 | 12,00 | 12 | 100% |
| 8 | Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian RT | Laporan | 36 | 12 | 12 | 100,00 | 12,00 | 12 | 100% |

| No. | Urusan/ Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian TU dan RT Pimpinan | Laporan | 36 | 12 | 12,00 | 100,00 | 12,00 | 12 | 100% |
| | | Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Laporan | 36 | 12 | 12,00 | 100,00 | 12,00 | 12 | 100% |
| 9 | Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | | | | | | | | | |
| | | Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Gubernur | Laporan | 36 | 12 | 12 | 100,00 | 12,00 | 12 | 100% |
| | | Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Wakil Gubernur | Laporan | 36 | 12 | 12 | 100,00 | 12,00 | 12 | 100% |
| | | Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Laporan | 36 | 12 | 12 | 100,00 | 12,00 | 12 | 100% |
| 10 | Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan | | | | | | | | | |
| | | Jumlah laporan pelaksnaan fasilitasi materi pimpinan | Laporan | 36 | 12 | 12 | 100,00 | 12,00 | 12 | 100% |
| | | Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi komunikasi dan dokumentasi pimpinan | Laporan | 36 | 12 | 12 | 100,00 | 12,00 | 12 | 100% |

| No. | Urusan/ Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 11 | Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan | | | | | | | | | |
| | | Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi keprotokolan | Laporan | 36 | 12 | 12,00 | 100,00 | 12,00 | 12 | 100% |
| | **Biro Adm. Pembangunan Daerah** | | | | | | | | | |
| | | Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100% |
| | | Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Adpem | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100% |
| 1 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| | | Jumlah pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi PD | Dokumen | 18 | 6 | 6 | 100,00 | 6,00 | 6 | 100% |
| 2 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| | | Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Administrasi Pembangunan | Dokumen | 4 | 2 | 2 | 100,00 | 2,00 | 2 | 100% |
| | **Biro Perekonomian Daerah** | | | | | | | | | |
| | | Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100% |

| No. | Urusan/ Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Kegiatan Administrasi Umum | | | | | | | | | |
| | | Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Perekonomian | Laporan | 4 | 2 | 2 | 100,00 | 2,00 | 2 | 100% |
| | **Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa** | | | | | | | | | |
| | | Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro APBJ | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100% |
| 1 | Kegiatan Administrasi Umum | | | | | | | | | |
| | | Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro APBJ | Laporan | 4 | 2 | 2 | 100,00 | 2,00 | 2 | 100% |
| | **Biro Organisasi** | | | | | | | | | |
| | | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100% |
| | | Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100% |
| 1 | Kegiatan Administrasi Umum | | | | | | | | | |

| No. | Urusan/ Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Organisasi dan Asisten Administrasi | Laporan | 44 | 4 | 4 | 100,00 | 4,00 | 4 | 100% |
| 2 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| | | Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Laporan | 44 | 4 | 4 | 100,00 | 4,00 | 4 | 100% |
| | **Biro Hukum** | | | | | | | | | |
| | | Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100% |
| 1 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| | | Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Laporan | 2 | 1 | 1 | 100,00 | 1,00 | 1 | 100% |
| 2 | Kegiatan Administrasi Umum | | | | | | | | | |
| | | Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Hukum | Laporan | 4 | 2 | 2 | 100,00 | 2,00 | 2 | 100% |

| No. | Urusan/ Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | **Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam** | | | | | | | | | |
| | | Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Infrastruktur dan SDA dan Asisten Ekbang | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100% |
| 1 | Kegiatan Administrasi Umum | | | | | | | | | |
| | | Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umumBiro Infrastruktur dan SDA dan Asisten Ekbang | Laporan | 8 | 4 | 4 | 100,00 | 4,00 | 4 | 100% |
| 2 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Orang Yang di Sosialisas Ketentuan si Bidang Cukai | Orang | 16.000 | 8.000 | 8.000 | 100,00 | 8.000,00 | 8.000 | 100% |
| | **Biro Kesejahteraan Rakyat** | | | | | | | | | |
| | | Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100% |
| 1 | Kegiatan Administrasi Umum | | | | | | | | | |

| No. | Urusan/ Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Kesejahteraan Rakyat | Laporan | 4 | 2 | 2 | 100,00 | 2,00 | 2 | 100% |
| | **Biro Pemerintah, Otonomi Daerah dan Kerjasama** | | | | | | | | | |
| | | Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pemotdaker dan Asisten Pemerintahan | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100% |
| 1 | Kegiatan Administrasi Umum | | | | | | | | | |
| | | Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Pemotdaker dan Asisten Pemerintahan | Dokumen | 8 | 2 | 2 | 100,00 | 2,00 | 2 | 100% |

**a. Evaluasai Capaian Kinerja Program**

Untuk meningkatkan efektivitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jawa Tengah dilaksanakan melalui antara lain Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.366.130.000,00 memiliki realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,50%. Program ini memiliki 3 indikator kinerja, seluruhnya dengan ketercapaian sangat tinggi. Realisasi indikator Efektivitas kerjasama daerah; Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti; Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah, seluruhnya dengan realisasi 100%.

Permasalahan yang dihadapi dalam memenuhi 3 indikator program dimaksud antara lain perlunya meningkatkan realisasi kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Lain maupun dengan Badan Usaha/Swasta, adanya problem administrasi perbatasan yaitu jumlah pilar batas belum sesuai, dan terbitnya regulasi baru terkait LPPD, SPM maupun proses administrasi KDH DPRD. Permasalahan dimaksud selanjutnya diatasi dengan: melaksanakan pemetaan potensi kerjasama daerah melalui rapat koordinasi antar Kab/Kota, OPD Jateng dan Badan usaha/swasta, koordinasi serta asistensi dengan Kementerian ATR/BPN, melakukan pengajuan penambahan Pilar Batas, serta melaksanakan sinergi peraturan-peraturan Penyusunan LPPD, SPM maupun proses administrasi KDH DPRD melalui pelaksanaan workshop dan mensinergikan dengan Kemendagri.

Manfaat Penyelenggaraan Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah antara lain peningkatan kerjasama daerah di Provinsi Jawa Tengah, peningkatan pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan demi menunjang efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta adanya peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan sebagai salah satu proses penilaian kinerja Pemerintahan Daerah secara Nasional.

Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.403.244.000,00 memiliki realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp2.400.812.419,00 (99,90%). Program ini terdistribusi ke dalam 4 Indikator Kinerja Program yang semuanya dengan tingkat capaian sangat tinggi yaitu persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang undangan dengan realisasi 100%; persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi dengan realisasi 100%; persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani dengan realisasi 100%; persentase kabupaten/kota peduli HAM dengan realisasi 100%. Capaian kinerja program ini terhadap target akhir RPJMD seluruhnya akan tercapai.

Permasalahan yang dihadapi antara lain kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan rancangan produk hukum daerah semakin komplek, meningkatnya permintaan evaluasi dan fasilitasi rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota, meningkatnya gugatan hukum yang timbul dan harus

ditangani dan pelaporan data kabupaten/kota peduli HAM belum tepat waktu dan memenuhi kaidah.

Upaya mengatasi permasalahan antara lain melalui sinergi proses penyusunan produk hukum daerah provinsi melalui layanan hukum berbasis elektronik pada sistem e-PHD, meningkatkan sistem pelayanan fasilitasi, evaluasi dan pembinaan produk hukum daerah kabupaten/kota melalui sistem aplikasi berbasis elektronik pada SIPPROKUMDA, sinergitas penanganan perkara dan sengketa hukum bersama instansi terkait serta meningkatkan koordinasi dan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memenuhi pelaporan data kabupaten/kota peduli HAM sesuai dengan batas waktu pelaporan yang ditentukan.

Manfaat Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yaitu tersusunnya rancangan produk hukum daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, kepentingan umum dan kesusilaan; terpenuhinya hak-hak masyarakat tidak mampu dalam memperoleh kesempatan yang sama pada proses peradilan dan kesamaan dalam hukum; serta terlaksananya Penghormatan, Pemenuhan, Perlindungan, Penegakan dan Pemajuan HAM (P5HAM) di Provinsi Jawa Tengah.

Program Kesejahteraan Rakyat dengan anggaran sebesar Rp427.620.284.000, memiliki realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 97,8%. Program ini memiliki 3 indikator dengan tingkat capaian sangat tinggi. Capaian kinerja program yaitu Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan dasar dengan realisasi sebesar 91,64% dari target sebesar 90%, Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan non dasar dengan realisasi sebesar 100% dari target sebesar 90%, dan Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik dengan realisasi 40% dari target sebesar 40%.

Permasalahan yang muncul antara lain kesejahteraan pengajar keagamaan dan penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah Madrasah Aliyah (MA). Upaya mengatasi permasalahan antara lain pemberian bantuan insentif pengajar keagamaan dan Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA) Madrasah Aliyah (MA). Manfaat pelaksanaan program kesejahteraan rakyat antara lain meningkatkan motivasi pengajar keagamaan dan meningkatkan kualitas pendidikan pada Sekolah/Madrasah dalam rangka mensukseskan pendidikan menengah yang bermutu.

Program Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.905.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,80%. Program ini memiliki 5 indikator kinerja, seluruhnya tercapai dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Capaian Pelaksanaan APBD realisasi sebesar 99,09% dari target sebesar 98%; Capaian Pelaksanaan APBN realisasi sebesar 91,97% dari target sebesar 95%; Persentase Realisasi Bantuan Keuangan melebihi target dengan realisasi sebesar 99,57%; Persentase Pemenuhan Data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan Daerah realisasi 92% dari

target 80%; dan Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah realisasi 100%.

Permasalahan yang dihadapi antara lain adanya beberapa kegiatan DAK yang mengalami kontrak kritis yaitu penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan kurang efektifnya sistem pengolahan data dalam mendukung fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan di Kab/Kota dan Desa.

Upaya pemecahan masalah yaitu dengan menerbitkan surat percepatan pelaksanaan kegiatan serta melakukan pengembangan terhadap sistem pengolahan data yaitu SIVERO (Sistem Verifikasi Online) dan Pak Bejo (Pelaporan Kinerja Bankeudes Jateng Online). Sistem Verifikasi Online telah dikembangkan dengan beberapa fitur baru antara lain penyajian data dengan format yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, tampilan info yang aktual. Pelaporan Kinerja Bankeudes Jateng Online mengembangkan tampilan menu yang lebih sederhana dan informatif sehingga mempermudah user serta adanya fitur baru untuk cetak rekap data desa yang sudah/belum lapor.

Manfaat Program Kebijakan Administrasi Pembangunan yaitu terkendalinya pelaksanaan pembangunan Daerah dan tersajinya data informasi pembangunan Daerah sebagai dasar rekomendasi kebijakan melalui pelaksanaan pemantauan dan evaluasi berkala.

Program Perekonomian Pembangunan dengan alokasi sebesar Rp7.684.793.000,- memiliki realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 79,96%. Program ini memiliki 8 (delapan) indikator dengan tingkat capaian seluruhnya sangat tinggi. Beberapa capaian kinerja indikator tersebut antara lain: Tingkat kesehatan BUMD Aneka Usaha dengan realisasi 85,71% dari target 75%, Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan dengan realisasi 75% dari target 75%, Persentase Rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan dengan realisasi 87,5% dari target 80%. Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur dengan realisasi 98,99% dari target 95%; Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan dengan realisasi 97,05% dari target 90%; dan Persentase capaian kinerja program bidang pertanian dengan realisasi 93,42% dari target 87%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Program Perekonomian Pembangunan antara lain: usaha yang dijalankan BUMD masih belum spesifik, akses pembiayaan sektor produksi melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum optimal, pengembangan ekonomi kreatif belum optimal, pembangunan infrastruktur PSN di Jawa Tengah masih terdapat kendala seperti adanya tanah musnah pada pembangunan jalan tol tanggul laut Semarang-Demak, masih perlu optimalisasi capaian bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) dan efisiensi energi, terjadinya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi, kerbau, kambing dan domba di Jawa Tengah dan penyusunan Rencana Kegiatan Penganggaran (RKP) DBHCHT melibatkan Pemerintah Pusat.

Upaya mengatasi permasalahan antara lain klasterisasi unit usaha BUMD sesuai core business perusahaan, optimalisasi peran Tim Monitoring dan Evaluasi Program KUR Provinsi Jawa Tengah serta sinkronisasi dan optimalisasi Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah, pembentukan tim percepatan fasilitasi dukungan pembangunan jalan tol terintegrasi tanggul laut Semarang-Demak; pelaksanaan konservasi energi, pembangunan infrastruktur EBT dan diversifikasi energi; penerbitan SK Gubernur Nomor 443/38 tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penanganan PMK Provinsi Jawa Tengah dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait kebijakan DBHCHT agar sesuai kebutuhan daerah.

Manfaat Program Perekonomian dan Pembangunan antara lain meningkatkan efektifitas pengelolaan BUMD, meningkatnya proporsi usaha sektor produksi yang mengakses program KUR tahun 2022, meningkatnya jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif di Jawa Tengah menjadi sebanyak 6.264 pelaku usaha ekonomi kreatif pada tahun 2022, adanya kepastian landasan hukum terkait percepatan pembangunan jalan tol terintegrasi tanggul laut Semarang-Demak; adanya ketahanan energi di Provinsi Jawa Tengah, terkendalinya wabah PMK di Jawa Tengah dan adanya sinergi kegiatan DBHCHT dengan kegiatan lainnya.

Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran Tahun 2022 sebesar Rp3.447.000.000,00. Program ini memiliki realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,04%. Kinerja program sebanyak 3 indikator semuanya memiliki capaian sangat tinggi. Beberapa capaian kinerja pada Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, antara lain: persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa sebesar 94,8% dari target 93%, persentase efektivitas pengadaan secara elektronik dengan realisasi sebesar 95,27% dari target 85%, persentase permasalahan kelembagaan UKPBJ dan proses pengadaan barang/jasa yang terfasilitasi dengan realisasi sebesar 90% dari target 90%.

Permasalahan yang dihadapi antara lain keamanan data pada sistem SPSE rawan peretasan, pelaksanaan PBJ yang belum sesuai dengan perencanaan SKPD dan jumlah Pejabat Fungsional PPBJ belum sesuai rekomendasi ketentuan LKPP RI. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan, yaitu: meningkatkan keamanan data dengan memiliki server sendiri sebagai sistem back up, mendorong SKPD melakukan pengiriman paket PBJ sesuai rencana dan mengusulkan Jabfung PPBJ melalui Inpassing dan pengangkatan ASN baru.

Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa yang lebih baik maka diharapkan pengadaan barang dan jasa akan terlaksana dengan profesional dan akuntabel. Penyusunan perencanaan pengadaan yang cepat dan tepat akan berdampak positif pada proses pemilihan. Penambahan personil Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) sesuai rekomendasi LKPP akan mempercepat proses pemilihan penyedia.

Program Penataan Organisasi dengan alokasi anggaran Rp1.726.180.000,- memiliki realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,33%. Program tersebut memiliki 8 (delapan) indikator program dengan capaian sangat tinggi. Adapun capaian

kinerja program Program Penataan Organisasi antara lain: Persentase OPD yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya sebesar 29,27% dari target 29,27%, Persentase UPP yang mengimplementasikan Standar Pelayanan sebesar 73,65% dari target 73,65% dan Persentase OPD yang nilai PMPRB nya meningkat sebesar 91,84% dari target 91,84%.

Dalam pencapaian kinerja tahun 2022 terdapat beberapa kendala antara lain adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi yang menuntut adanya perubahan yang signifikan dalam hal kelembagaan, penerapan standar pelayanan dalam mendukung kinerja UPP belum optimal dan belum seluruh OPD yang sudah mengimplementasikan SPP mengunggah hasilnya ke sistem SPP serta belum seluruh OPD melaksanakan tatalaksana penyelenggaraan pemerintah dengan optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilaksanakan penyusunan peraturan daerah terkait SOTK di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan penyusunan peta jabatan, kebutuhan pegawai, optimalisasi pendampingan terhadap UPP dalam mengimplementasikan Standar Pelayanan, serta pembuatan aplikasi terintegrasi yaitu aplikasi TNDE dan Tata Praja untuk mendukung sistem kerja agile.

Manfaat program dari adanya sasaran Kelembagaan bersifat dalam pembuatan struktur organisasi yang efektif dan efisien baik dilingkup pemerintah Provinsi maupun di lingkup Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, untuk sasaran Tatalaksana terkait dengan pembuatan mekanisme dan pola hubungan kerja dalam pelaksanaan organisasi dan memastikan setiap unit kerja memberikan pelayanan prima dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder terkait. Percepatan Reformasi Birokrasi memberi manfaat dalam mewujudkan pemerintah yang baik (good governance)

Program Administrasi Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp172.364.039.000,- memiliki realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 97,78%. Program ini memiliki 3 indikator dengan tingkat capaian sangat tinggi. Kinerja Program tersebut antara lain Persentase ketercapaian pelayanan administrasi pelayanan perangkat daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan dengan realisasi sebesar 100% dari target sebesar 100%.

Permasalahan yang dihadapi adalah pelayanan penggunaan gedung sesuai fungsinya kurang optimal karena adanya kebijakan pemanfaatan gedung untuk peruntukan lain, misalnya Gedung Wisma Perdamaian digunakan sebagai gudang penyimpanan alat Kesehatan COVID-19. Upaya mengatasi permasalahan antara lain dilakukan koordinasi dengan OPD pemakai gedung untuk proses pemindahan barang, supaya dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya secara optimal. Manfaat program antara lain pelayanan kepada pimpinan, pegawai dan masyarakat yang mudah, murah, dan cepat.

**b. Evaluasi Capaian Target Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan**

Kegiatan yang mendukung Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebanyak 3 (tiga) kegiatan yaitu Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan keluaran antara

lain 10 naskah kerjasama antar pemerintah dari target 12 naskah dan 11 naskah kerjasama Badan Usaha dan Swasta dari target 10 naskah. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pemerintahan dengan keluaran antara lain 4 dokumen laporan fasilitasi administrasi kebijakan pemerintahan dan LKPJ dari target 4 laporan, Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan keluaran 34 dokumen fasilitasi KDH dan DPRD dari target 32 dokumen dan 4 dokumen laporan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM dari target 4 laporan.

Permasalahan yang dihadapi antara lain beberapa garis batas menerjang lokasi perumahan dan tidak sesuai dengan bentang alam; terbitnya regulasi baru Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan dan Pelaporan SPM Tahun 2022; pengajuan untuk pengeluaran administrasi KDH dan DPRD terkendala masalah waktu karena di undang undang terdapat batas waktu untuk Gubernur dalam menandatangani administrasi KDH maupun DPRD; terbatasnya personil pada OPD yang akan di evaluasi; tidak semua kesepakatan dalam Dokumen PKS dapat terealisasi; adanya potensi keterlambatan dalam realisasi tindak lanjut kerjasama.

Upaya mengatasi dengan melakukan koordinasi dan fasilitasi batas daerah ke Kabupaten/Kota; melakukan koordinasi dengan Sekber SPM (Pusat), Kementerian Teknis dan Tim penerapan SPM khususnya dengan OPD pengampu SPM; penggunaan Aplikasi; melakukan koordinasi secara intensif kepada OPD yang akan di evaluasi; melakukan identifikasi permasalahan pada PKS tersebut serta melakukan penyelesaian masalahnya; melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kerjasama yang sudah berjalan.

Kegiatan yang mendukung Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yaitu Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan dengan keluaran antara lain jumlah Dokumen penyusunan dan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 12 Dokumen sesuai target dan jumlah dokumen kajian produk hukum 12 Dokumen sesuai target. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum dengan keluaran jumlah dokumen penyelesaian penanganan perkara 12 Dokumen sesuai target; dan Jumlah dokumen penyelesaian sengketa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 12 Dokumen sesuai target.

Kendala yang dihadapi antara lain meningkatnya pelaksanaan harmonisasi Perda dan Pergub, pengkajian produk hukum daerah, penanganan penyelesaian perkara memerlukan banyak kelengkapan alat bukti yang valid dan sarana pelayanan penyelesaian sengketa hukum di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Upaya mengatasi permasalahan dengan meningkatkan koordinasi proses penyusunan dan pengkajian produk hukum dengan OPD terkait, meningkatkan pembinaan dan koordinasi pada OPD agar melakukan tertib administrasi khususnya terkait dengan penyiapan data dukung sebagai alat bukti penanganan perkara, pengamanan Barang Milik Daerah, serta mengoptimalkan fungsi Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas).

Kegiatan yang mendukung Program Kesejahteraan Rakyat sebanyak 3 kegiatan yaitu: Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual dengan keluaran antara lain

Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan 2 Dokumen sesuai target; Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dengan keluaran antara lain Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan pelayanan dasar 3 Dokumen sesuai target; Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dengan keluaran antara lain Jumlah pelaksanaan kebijakan non pelayanan dasar 3 Dokumen sesuai target.

Permasalahan yang muncul adalah belum optimalnya peran aktif dunia usaha (perusahaan swasta, BUMN dan BUMD) termasuk perbankan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/CSR bagi program pembangunan daerah di Jawa Tengah; masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat non produktif pada 15 Kabupaten di Jawa tengah; dan masih tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Jawa Tengah.

Solusi yang diambil antara lain telah disusun juknis pemberian CSR award tentang mekanisme dan kriteria penilaian serta bentuk penghargaan pemberian CSR; pelaksanaan program dukungan penanganan Masyarakat Non Produktif oleh masing-masing Kabupaten antara lain melalui Jamkesda, Rantang Berkah dan Bantuan ODKB; serta koordinasi kebijakan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).

Kegiatan yang mendukung Program Kebijakan Administrasi Pembangunan sebanyak 2 kegiatan yaitu Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan output 3 (tiga) dokumen rekomendasi kebijakan percepatan pelaksanaan pembangunan bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD, 2 (dua) dokumen rekomendasi kebijakan percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dengan output 99,60% OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan Pembangunan Daerah secara lengkap, 4 (empat) laporan dokumen hasil evaluasi capaian kinerja Pembangunan Daerah dan 4 (empat) laporan rekomendasi kebijakan teknis Pembangunan Daerah.

Permasalahan yang dihadapi antara lain penetapan target fisik dan keuangan oleh SKPD belum optimal, perubahan/keterlambatan kebijakan pelaksanaan kegiatan yg bersumber dari TKDD (Juknis DAK, DBHCHT, DID) sehingga memerlukan penyesuaian/pergeseran anggaran serta laporan pelaksanaan kegiatan tidak disampaikan secara tepat waktu, lengkap dan informatif.

Upaya pemecahan masalah antara lain dengan melakukan koordinasi dan fasilitasi pengendalian secara intensif, baik secara periodik maupun sewaktu-waktu, melaksanakan rapat koordinasi dan fasilitasi teknis membahas permasalahan dan solusinya serta melakukan pencermatan laporan bulanan dan aktif berkomunikasi dengan pelaksana untuk menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan.

Program Perekonomian Pembangunan didukung 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian, Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD yang terdiri dari 10 (sepuluh) indikator kegiatan serta kegiatan pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam dengan 3 (tiga)

indikator kinerja. Keluaran kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian antara lain jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro sebanyak 4 Dokumen dari target 4 dokumen. Keluaran kegiatan Koordinasi BUMD dan BLUD antara lain Jumlah Dokumen kajian pengembangan BLUD sebanyak 2 Dokumen dari target 2 Dokumen dan Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan sebanyak 2 Dokumen dari target 2. Keluaran kegiatan pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam antara lain Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian dengan target 3 Dokumen sesuai target; Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM dengan target 2 dokumen sesuai target; Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan 2 Dokumen sesuai target.

Kendala yang dihadapi antara lain pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur belum optimal, penggalian pendapatan PT. BPR BKK Jawa Tengah di luar pendapatan dari pemberian kredit belum optimal, belum seluruh BLUD menyusun rencana bisnis, kurangnya tenaga vaksinasi PMK, biaya investasi yang tinggi untuk konservasi energi, dan kepemilikan rumah komunitas terdampak bencana.

Upaya mengatasi permasalahan antara lain melalui koordinasi pengembangan DPSP Borobudur dengan stakeholder terkait, penggunaan aplikasi K-ERIS dengan memanfaatkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai alat transaksi nasabah untuk peningkatan fee based income, mewajibkan seluruh BLUD menyusun Rencana Bisnis, mendorong OPD terkait untuk melakukan optimalisasi Tenaga Kesehatan Hewan melalui pelatihan vaksinasi PMK; inisiasi kerjasama dengan lembaga donor dan pemerintah pusat dalam pembiayaan konservasi energi; dan koordinasi penempatan dan pembangunan pemukiman baru komunitas terdampak bencana.

Kegiatan yang mendukung Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 3 kegiatan. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan indikator kinerja kegiatan yaitu: jumlah laporan kegiatan pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa dengan keluaran 3 laporan sesuai target. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan indikator kinerja kegiatan yaitu jumlah dokumen laporan kegiatan pengelolaan pengadaan barang/jasa dengan keluaran 3 dokumen. Sedangkan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu jumlah laporan kegiatan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa dengan keluaran 3 laporan sesuai target.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan antara lain: keterbatasan kapasitas server sehingga dapat mengurangi kelancaran dalam proses pemilihan penyedia, adanya penumpukan paket pada bulan-bulan tertentu dan meningkatnya permintaan pendampingan advokasi serta kelembagaan UKPBJ. Terhadap permasalahan dimaksud, upaya mengatasi permasalahan yaitu:

mengusulkan untuk penambahan kapasitas server sebagai sistem back up, penambahan jumlah Pejabat Fungsional PPBJ (POKJA), dan peningkatan jumlah dan kompetensi SDM PBJ.

Kegiatan yang mendukung Program Administrasi Umum sebanyak 11 kegiatan, antara lain Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah didukung 1 indikator Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan keluaran 12 laporan sesuai target; dan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung 1 indikator Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan keluaran 12 laporan sesuai target. Permasalahan yang dihadapi antara lain keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya aparatur. Upaya mengatasi permasalahan dengan melakukan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai secara bertahap dan pemeliharaan secara berkala, serta pemenuhan sumber daya aparatur yang kompeten.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah ditunjukkan dengan indikator kinerja program dan kegiatan/sub kegiatan yang tertuang dalam Renja Tahun 2022. Berikut kinerja pelayanan Sekretariat Daerah tahun 2022 dan 2023 sebagaimana tertuang dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

| No. | Indikator | Satuan | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra PD | | Realisasi capaian Tahun 2022 | Proyeksi Capaian Tahun 2023 | Catatan Analasis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani | % | | | 95 | 96 | 100,00 | 100 | Tercapai |
| 2 | Persentase kabupaten/kota peduli HAM | % | | | 95 | 96 | 100,00 | 100 | Tercapai |
| 3 | Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan | % | | | 95 | 96 | 100,00 | 100 | Tercapai |
| 4 | Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi | % | | | 95 | 95 | 100,00 | 100 | Tercapai |
| 5 | Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan dasar | % | | | 90 | 95 | 91,64 | 95,00 | Tercapai |
| 6 | Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan non dasar | % | | | 90 | 95 | 100,00 | 95,00 | Tercapai |
| 7 | Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik | % | | | 40 | 42 | 40,00 | 42,00 | Tercapai |
| 8 | Efektivitas kerjasama daerah | % | | | 90 | 95 | 100,00 | 95,00 | Tercapai |
| 9 | Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti | % | | | 90 | 90 | 100,00 | 90,00 | Tercapai |
| 10 | Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah | % | | | 90 | 95 | 100,00 | 95,00 | Tercapai |
| 12 | Presentase capaian kinerja program bidang infrastruktur | % | | | 95 | 96 | 98,99 | 96,00 | Tercapai |
| 13 | Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan | % | | | 90 | 95 | 97,05 | 95,00 | Tercapai |
| 14 | Presentase capaian kinerja program bidang pertanian | % | | | 87 | 90 | 93,42 | 90,00 | Tercapai |
| 15 | Nilai kemandirian BLUD | % | | | 50 | 55 | 69,34 | 55,00 | Tercapai |
| 16 | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan | % | | | 80 | 82 | 87,50 | 82,00 | Tercapai |
| 17 | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan | % | | | 75 | 77 | 75,00 | 77,00 | Tercapai |
| 18 | Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha | % | | | 75 | 80 | 85,71 | 80,00 | Tercapai |
| 19 | Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan | % | | | 80 | 85 | 94,50 | 85,00 | Tercapai |
| 20 | Capaian Pelaksanaan APBD | % | | | 98 | 98,50 | 99,09 | 98,50 | Tercapai |
| 21 | Capaian Pelaksanaan APBN | % | | | 95 | 95,50 | 98,90 | 95,50 | Tercapai |
| 22 | Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah | % | | | 80 | 85,00 | 92,00 | 85,00 | Tercapai |
| 23 | Persentase realisasi bantuan keuangan | % | | | 83 | 85,00 | 99,57 | 85,00 | Tercapai |
| 24 | Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi | % | | | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Tercapai |
| 25 | Efektivitas Pengadaan secara Elektronik | % | | | 85 | 90 | 95,27 | 90,00 | Tercapai |
| 26 | Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa | % | | | 93 | 95 | 94,80 | 95,00 | Tercapai |
| 27 | Persentase Permasalahan Kelembagaan UKPBJ dan Proses Pengadaan Barang/Jasa yang Terfasilitasi | % | | | 90 | 92 | 90,00 | 92,00 | Tercapai |
| 28 | Efektifitas Pelaksanaan Analisis Jabatan OPD | % | | | 85,36 | 87,80 | 85,36 | 87,80 | Tercapai |
| 29 | Persentase Kabupaten/Kota yang Indeks Reformasi Birokrasinya meningkat | % | | | 85,71 | 91,42 | 85,71 | 91,42 | Tercapai |

| No. | Indikator | Satuan | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra PD | | Realisasi capaian Tahun 2022 | Proyeksi Capaian Tahun 2023 | Catatan Analasis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 30 | Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya | % | | | 77,14 | 80,00 | 77,14 | 80,00 | Tercapai |
| 31 | Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan | % | | | 81,58 | 89,47 | 85,88 | 100,00 | Tercapai |
| 32 | Persentase OPD yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya | % | | | 29,27 | 34,15 | 29,27 | 34,15 | Tercapai |
| 33 | Persentase OPD yang nilai PMPRB nya meningkat | % | | | 91,84 | 95,02 | 91,84 | 95,92 | Tercapai |
| 34 | Persentase OPD yang nilai SAKIP nya meningkat | % | | | 73,17 | 85,37 | 87,80 | 85,37 | Tercapai |
| 35 | Persentase UPP yang mengimplementasikan Standar Pelayanan | % | | | 73,65 | 85,63 | 76,65 | 85,63 | Tercapai |
| 36 | Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol | % | | | 100 | 100 | 100,00 | 100 | Tercapai |
| 37 | Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga | % | | | 100 | 100 | 100,00 | 100 | Tercapai |
| 38 | Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan | % | | | 100 | 100 | 100,00 | 100 | Tercapai |
| 39 | Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda | % | | | 100 | 100 | 100,00 | 100 | Tercapai |
| 40 | Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Adpem | % | | | 100 | 100 | 100,00 | 100 | Tercapai |
| 41 | Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian | % | | | 100 | 100 | 100,00 | 100 | Tercapai |
| 42 | Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro APBJ | % | | | 100 | 100 | 100,00 | 100 | Tercapai |
| 43 | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda | % | | | 100 | 100 | 100,00 | 100 | Tercapai |
| 44 | Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi | % | | | 100 | 100 | 100,00 | 100 | Tercapai |
| 45 | Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum | % | | | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| 46 | Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Infrastruktur dan SDA dan Asisten Ekbang | % | | | 100 | 100 | 100,00 | 100 | Tercapai |
| 47 | Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat | % | | | 100 | 100 | 100,00 | 100 | Tercapai |
| 48 | Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pemotdaker dan Asisten Pemerintahan | % | | | 100 | 100 | 100,00 | 100 | Tercapai |

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Setda

Memperhatikan kondisi saat ini dan kondisi yang dinginkan, maka berdasarkan tugas pokok dan fungsi Setda Provinsi Jawa Tengah agar pelaksanaan pembangunan yang terencana dan mampu menghasilkan kinerja yang sangat baik, berikut isu-isu penting di lingkup Sekretariat Daerah, yaitu:

1) Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 pada 35 Kabupaten/Kota
2) Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Konkuren dan SPM
3) Penyusunan LPPD dan RLPPD Provinsi Jawa Tengah
4) Peningkatan Kerjasama sektor strategis Daerah dengan Pihak Luar Negeri dan Pihak Dalam Negeri
5) Identifikasi Pemetaan dan Potensi Kerjasama Daerah (DN dan LN)
6) Fasilitasi dan koordinasi Forum Kerjasama APPSI dan MPU
7) Penegasan Batas Daerah (Delineasi batas daerah Prov Jateng x Prov Jatim dan Prov Jateng x Prov Jabar)
8) Fasilitasi Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
9) Penyusunan LKPJ Gubernur
10) Peningkatan kualitas Raperda Provinsi Jawa Tengah
11) Peningkatan kualitas Rancangan Peraturan Gubernur
12) Peningkatan kualitas Rancangan Keputusan Gubernur
13) Peningkatan kualitas dokumentasi dan informasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
14) Peningkatan kualitas pengkajian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
15) Peningkatan kualitas Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota
16) Peningkatan efektivitas bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan
17) Peningkatan kualitas penanganan Perkara Perdata/TUN
18) Peningkatan kualitas Implementasi Kebijakan HAM Kabupaten/kota
19) Peningkatan kualitas Penanganan permasalahan hukum non litigasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
20) Pengendalian pembangunan yang bersumber APBD
21) Pengendalian pembangunan yang bersumber APBN
22) Pengendalian Pembangunan Wilayah
23) Koordinasi dan Fasilitasi Pelaporan Pembangunan Daerah
24) Koordinasi Analisis dan Evaluasi capaian kinerja pembangunan Daerah

25) Koordinasi dan Fasilitasi rumusan kebijakan teknis pembangunan daerah
26) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
27) Pembinaan 8 Area Reformasi Birokrasi pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
28) Pembinaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
29) Pembinaan dan Penataan Kelembagaan Provinsi/Kab/Kota
30) Pembinaan dan Evaluasi Kematangan Organisasi dan Kualitas Kebijakan Daerah
31) Pembinaan dan Perumusan Peta Proses Bisnis
32) Pembinaan Indeks Kepuasan Masyarakat
33) Pelaksanaan fasilitasi tatalaksana pemerintahan
34) Pelaksanaan fasilitasi peningkatan pelayanan publik
35) Fasilitasi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Penyusunan/Pemutakhiran SHS
36) Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan E-katalog dengan pendekatan *cluster*
37) Pemantauan dan Evaluasi Proses Pengadaan Barang/Jasa
38) Fasilitasi Sistem dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
39) Pelayanan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa
40) Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa
41) Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan UKPBJ
42) Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah
43) Pendampingan dan Konsultasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa
44) Optimalisasi Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah
45) Optimalisasi Pelayanan Umum pada Pimpinan dan Masyarakat
46) Optimalisasi Pemenuhan Sarana dan Prasarana Biro-biro lingkup Sekretariat Daerah
47) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan kebijakan dan koordinasi bidang pertanian
48) Meningkatkan Kualitas pengelolaan kebijakan dan koordinasi bidang ESDM, lingkungan hidup dan kehutanan
49) Meningkatkan Kualitas pengelolaan kebijakan dan koordinasi bidang Infrastruktur, pekerjaan umum dan tata ruang

## 2.4 Reviu terhadap RKPD

Mencermati realisasi, tingkat ketercapaian indikator kinerja, kondisi keuangan daerah, kondisi makro ekonomi, dan tantangan berbagai bidang, maka dilakukan reviu terhadap RKPD tahun 2024 yang dituangkan dalam Hasil Analisis Kebutuhan sebagaimana tabel 2.4 berikut:

TABEL 2.3
REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Usulan Pagu | No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | 2024 | 2024 | | | | 2024 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA | | | | | BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA | | | |
| I | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | | | 5.415.000.000 | I | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | | | 3.783.000.000 |
| | | Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti | 95% | 1.695.000.000 | | | Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti | 95% | 980.000.000 |
| | | Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah | 95% | 2.350.000.000 | | | Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah | 95% | 1.630.000.000 |
| | | Efektivitas kerjasama daerah | 95% | 1.370.000.000 | | | Tingkat efektivitas kerjasama daerah | 95% | 1.173.000.000 |
| 1 | Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan | | | 1.695.000.000 | 1 | Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan | | | 980.000.000 |
| | | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ | 8 Dokumen | 1.695.000.000 | | | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ | 8 Dokumen | 980.000.000 |
| | Fasilitasi Penataan Wilayah | | | | | Fasilitasi Penataan Wilayah | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah | 4 Dokumen | 270.000.000 | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah | 4 Dokumen | 200.000.000 |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum | | | | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum | 4 Dokumen | 350.000.000 | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum | 4 Dokumen | 230.000.000 |
| | Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan | | | | | Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan | 4 Dokumen | 1.075.000.000 | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan | 4 Dokumen | 550.000.000 |
| 2 | Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | 2.350.000.000 | 2 | Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | 1.630.000.000 |
| | | Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD | 95% | 1.700.000.000 | | | Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD | 95% | 1.100.000.000 |
| | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM | 3 Dokumen | 250.000.000 | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM | 3 Dokumen | 225.000.000 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Usulan Pagu | No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | 2024 | 2024 | | | | 2024 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100% | 400.000.000 | | | Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100% | 305.000.000 |
| | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | | | | | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | 45 Dokumen | 1.700.000.000 | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | 45 Dokumen | 1.100.000.000 |
| | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan | | | | | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan | | | |
| | | Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM | 4 Dokumen | 250.000.000 | | | Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM | 4 Dokumen | 225.000.000 |
| | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | 37 Laporan | 400.000.000 | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | 37 Laporan | 305.000.000 |
| 3 | Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah | | | 1.370.000.000 | 3 | Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah | | | 1.173.000.000 |
| | | Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti | 95% | 620.000.000 | | | Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti | 95% | 605.000.000 |
| | | Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti | 95% | 300.000.000 | | | Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti | 95% | 200.000.000 |
| | | Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah | 95% | 450.000.000 | | | Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah | 95% | 368.000.000 |
| | Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah | | | | | Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah | | | |
| | | Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah dalam negeri | 9 Dokumen | 450.000.000 | | | Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah dalam negeri | 9 Dokumen | 485.000.000 |
| | | Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah luar negeri | 5 Dokumen | 170.000.000 | | | Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah luar negeri | 5 Dokumen | 120.000.000 |
| | Fasilitasi Kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta | | | | | Fasilitasi Kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta | | | |
| | | Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Dalam Negeri | 6 Dokumen | 150.000.000 | | | Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Dalam Negeri | 6 Dokumen | 100.000.000 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Usulan Pagu | No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | 2024 | 2024 | | | | 2024 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Luar Negeri | 4 Dokumen | 150.000.000 | | | Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Luar Negeri | 4 Dokumen | 100.000.000 |
| | Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama | | | | | Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama | | | |
| | | Jumlah Kerja Sama Dalam Negeri yang Dievaluasi | 4 laporan | 150.000.000 | | | Jumlah Kerja Sama Dalam Negeri yang Dievaluasi | 4 laporan | 153.000.000 |
| | | Jumlah Kerja Sama Luar Negeri yang Dievaluasi | 4 laporan | 140.000.000 | | | Jumlah Kerja Sama Luar Negeri yang Dievaluasi | 4 laporan | 107.550.000 |
| | | Persentase layanan izin perjalanan ke Luar Negeri | 100% | 160.000.000 | | | Persentase layanan izin perjalanan ke Luar Negeri | 100% | 107.450.000 |
| | BIRO HUKUM | | | | | BIRO HUKUM | | | |
| II | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | | | 3.892.000.000 | II | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | | | 2.692.444.000 |
| | | Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan | 96% | 1.377.000.000 | | | Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan | 96% | 874.368.000 |
| | | Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji | 96% | 845.000.000 | | | Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji | 96% | 845.000.000 |
| | | Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani | 96% | 1.135.000.000 | | | Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani | 96% | 680.000.000 |
| | | Persentase kabupaten/kota peduli HAM | 96% | 535.000.000 | | | Persentase kabupaten/kota peduli HAM | 96% | 293.076.000 |
| 1 | Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan | | | 2.222.000.000 | 1 | Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan | | | 1.719.368.000 |
| | | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 12 Dokumen | 700.000.000 | | | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 12 Dokumen | 400.250.000 |
| | | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur | 12 Dokumen | 110.000.000 | | | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur | 12 Dokumen | 44.000.000 |
| | | Jumlah dokumen kajian produk hukum | 12 Dokumen | 567.000.000 | | | Jumlah dokumen kajian produk hukum | 12 Dokumen | 430.118.000 |
| | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota | 12 Dokumen | 845.000.000 | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota | 12 Dokumen | 845.000.000 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Usulan Pagu | No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | 2024 | 2024 | | | | 2024 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan | | | | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan | | | |
| | | Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah | 12 Laporan | 450.000.000 | | | Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah | 12 Laporan | 250.250.000 |
| | | Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah | 12 Laporan | 250.000.000 | | | Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah | 12 Laporan | 150.000.000 |
| | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan | | | | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan | | | |
| | | Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Keputusan Gubernur Jawa Tengah | 12 Laporan | 110.000.000 | | | Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Keputusan Gubernur Jawa Tengah | 12 Laporan | 44.000.000 |
| | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | | | | | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | | | |
| | | Jumlah dokumentasi dan Informasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | 12 Laporan | 317.000.000 | | | Jumlah dokumentasi dan Informasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | 12 Laporan | 287.168.000 |
| | | Jumlah Pengkajian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | 12 Laporan | 250.000.000 | | | Jumlah Pengkajian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | 12 Laporan | 142.950.000 |
| | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota | | | | | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota | | | |
| | | Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I | 95 Dokumen | 275.000.000 | | | Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I | 95 Dokumen | 275.000.000 |
| | | Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II | 100 Dokumen | 285.000.000 | | | Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II | 100 Dokumen | 285.000.000 |
| | | Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III | 100 Dokumen | 285.000.000 | | | Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III | 100 Dokumen | 285.000.000 |
| 2 | Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum | | | 1.670.000.000 | 2 | Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum | | | 973.076.000 |
| | | Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara | 12 Dokumen | 1.135.000.000 | | | Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara | 12 Dokumen | 680.000.000 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Usulan Pagu | No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | 2024 | 2024 | | | | 2024 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | 12 Dokumen | 535.000.000 | | | Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | 12 Dokumen | 293.076.000 |
| | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum | | | | | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum | | | |
| | | Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu | 200 Perkara | 625.000.000 | | | Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu | 200 Perkara | 480.000.000 |
| | | Jumlah Fasilitasi penanganan Perkara | 10 Perkara | 510.000.000 | | | Jumlah Fasilitasi penanganan Perkara | 10 Perkara | 200.000.000 |
| | Fasilitasi Penyelesaian masalah Non Litigasi dan HAM | | | | | Fasilitasi Penyelesaian masalah Non Litigasi dan HAM | | | |
| | | Jumlah Fasilitasi Implementasi HAM Kabupaten/kota | 35 Kab/Kota | 175.000.000 | | | Jumlah Fasilitasi Implementasi HAM Kabupaten/kota | 35 Kab/Kota | 103.000.000 |
| | | Jumlah Fasilitasi Penanganan sengketa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | 7 Sengketa | 250.000.000 | | | Jumlah Fasilitasi Penanganan sengketa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | 7 Sengketa | 190.076.000 |
| | | Jumlah dokumen kebijakan yang telah diharmonisasi berdasarkan perspektif HAM | 3 Dokumen | 110.000.000 | | | Jumlah dokumen kebijakan yang telah diharmonisasi berdasarkan perspektif HAM | - | - |
| | BIRO ORGANISASI | | | | | BIRO ORGANISASI | | | |
| III | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | | | 2.290.000.000 | III | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | | | 1.710.656.000 |
| | | Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB | 14,29% | 271.550.000 | | | Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB | 14,29% | 170.000.000 |
| | | Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya | 85,71% | 200.150.000 | | | Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya | 85,71% | 150.470.000 |
| | | Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan | 90,00% | 229.550.000 | | | Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan | 90,00% | 314.520.000 |
| | | Persentase OPD yang Skor Kematangan Organisasinya dalam kategori tinggi | 66,00% | 186.500.000 | | | Persentase Perangkat Daerah yang Skor Kematangan Organisasinya dalam kategori tinggi | 66,00% | 214.000.000 |
| | | Persentase UPP yang mengimplementasikan Standar Pelayanan | 88,73% | 212.750.000 | | | Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan Standar Pelayanan | 88,73% | 313.520.000 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Usulan Pagu | No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | 2024 | 2024 | | | | 2024 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | prosentase OPD dengan nilai SAKIPnya "A" | 66,67% | 362.900.000 | | | prosentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP A | 66,67% | 272.861.000 |
| | | Prosentase OPD yang mengimplementasikan hasil Analisis Jabatan secara efektif | 89,80% | 420.650.000 | | | Prosentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan hasil Analisis Jabatan secara efektif | 89,80% | 179.500.000 |
| | | Persentase OPD yang nilai PMPRB nya A | 74,00% | 405.950.000 | | | Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A | 74,00% | 95.785.000 |
| 1 | Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | 931.600.000 | 1 | Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | 543.970.000 |
| | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 450.000.000 | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 214.000.000 |
| | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi | 1 Dokumen | 240.800.000 | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi | 1 Dokumen | 150.470.000 |
| | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota | 1 Dokumen | 240.800.000 | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota | 1 Dokumen | 179.500.000 |
| | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi | | | | | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi | | | |
| | | Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah | 4 Laporan | 250.000.000 | | | Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah | 4 Laporan | 153.680.000 |
| | | Jumlah laporan koordinasi , fasilitasi dan asistensi peningkatan kematangan organisasi dan kebijakan perangkat daerah | 2 Laporan | 200.000.000 | | | Jumlah laporan koordinasi , fasilitasi dan asistensi peningkatan kematangan organisasi dan kebijakan perangkat daerah | 2 Laporan | 60.320.000 |
| | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | | | | | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | | | |
| | | Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Pembinaan Kematangan Organisasi di Kabupaten/Kota | 4 Laporan | 240.800.000 | | | Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Pembinaan Kematangan Organisasi di Kabupaten/Kota | 4 Laporan | 150.470.000 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Usulan Pagu | No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | 2024 | 2024 | | | | 2024 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Penataan Analisis Jabatan | | | | | Penataan Analisis Jabatan | | | |
| | | Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Analisis Jabatan OPD dan kab/kota | 4 Laporan | 270.200.000 | | | Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Analisis Jabatan OPD dan kab/kota | 4 Laporan | 179.500.000 |
| 2 | Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | | | 1.848.300.000 | 2 | Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | | | 1.166.686.000 |
| | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota | 3 Dokumen | 300.000.000 | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota | 3 Dokumen | 170.000.000 |
| | | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan | 2 Dokumen | 452.650.000 | | | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan | 2 Dokumen | 314.520.000 |
| | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD | 2 Dokumen | 250.000.000 | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD | 2 Dokumen | 95.785.000 |
| | | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik | 4 Dokumen | 450.000.000 | | | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik | 4 Dokumen | 313.520.000 |
| | | Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya | 2 Dokumen | 395.650.000 | | | Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya | 2 Dokumen | 272.861.000 |
| | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | | | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | |
| | | Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di Kab/kota | 4 Laporan | 300.000.000 | | | Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di Kab/kota | 4 Laporan | 170.000.000 |
| | | Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di OPD | 4 Laporan | 250.000.000 | | | Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di OPD | 4 Laporan | 95.785.000 |
| | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | | | | | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | | | |
| | | Jumlah laporan hasil monev AKIP OPD dan Kab/Kota | 4 Laporan | 395.650.000 | | | Jumlah laporan hasil monev AKIP OPD dan Kab/Kota | 4 Laporan | 272.861.000 |
| | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan | | | | | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan | | | |
| | | Jumlah Fasilitasi Tatalaksana Pemerintahan | 4 Laporan | 452.650.000 | | | Jumlah Fasilitasi Tatalaksana Pemerintahan | 4 Laporan | 314.520.000 |
| | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | | | | | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | | | |
| | | Jumlah Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | 6 Laporan | 450.000.000 | | | Jumlah Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | 6 Laporan | 313.520.000 |
| | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | |
| IV | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | 385.894.500.000 | IV | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | 349.171.525.000 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Usulan Pagu | No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | 2024 | 2024 | | | | 2024 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan dasar | 81% | 1.149.500.000 | | | Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan dasar | 81% | 750.000.000 |
| | | Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan non dasar | 82% | 1.426.000.000 | | | Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan non dasar | 82% | 750.000.000 |
| | | Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik | 54% | 383.319.000.000 | | | Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik | 54% | 347.671.525.000 |
| 1 | Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual | | | 383.319.000.000 | 1 | Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual | | | 347.671.525.000 |
| | | Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku | 4 Dokumen | 380.000.000.000 | | | Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku | 4 Dokumen | 344.740.650.000 |
| | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan | 4 Dokumen | 3.319.000.000 | | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan | 4 Dokumen | 2.930.875.000 |
| | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | | | | | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | | | |
| | | Jumlah fasilitasi pelaksanaan hibah sarana prasarana keagamaan | 750 unit | 380.000.000.000 | | | Jumlah fasilitasi pelaksanaan hibah sarana prasarana keagamaan | 750 unit | 344.740.650.000 |
| | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | | | | | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | | | |
| | | Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan | 8 kegiatan | 1.944.000.000 | | | Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan | 8 kegiatan | 1.563.275.000 |
| | | Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji | 1 kegiatan | 1.375.000.000 | | | Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji | 1 kegiatan | 1.367.600.000 |
| 2 | Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | | | 1.149.500.000 | 2 | Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | | | 750.000.000 |
| | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan | 4 Dokumen | 341.000.000 | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan | 4 Dokumen | 250.000.000 |
| | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan | 4 Dokumen | 456.500.000 | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan | 4 Dokumen | 250.000.000 |
| | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial | 4 Dokumen | 352.000.000 | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial | 4 Dokumen | 250.000.000 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Usulan Pagu | No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | 2024 | 2024 | | | | 2024 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | | | | | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | | | |
| | | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 8 Dokumen | 341.000.000 | | | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 8 Dokumen | 250.000.000 |
| | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | | | | | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | | | |
| | | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | 8 Dokumen | 456.500.000 | | | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | 8 Dokumen | 250.000.000 |
| | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | | | | | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | | | |
| | | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | 8 Dokumen | 352.000.000 | | | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | 8 Dokumen | 250.000.000 |
| 3 | Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | | | 1.426.000.000 | 3 | Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | | | 750.000.000 |
| | | Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan | 4 Dokumen | 331.000.000 | | | Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan | 4 Dokumen | 225.000.000 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Usulan Pagu | No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | 2024 | 2024 | | | | 2024 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 4 Dokumen | 755.000.000 | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 4 Dokumen | 300.000.000 |
| | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan administrasi Kependudukan | 4 Dokumen | 340.000.000 | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan administrasi Kependudukan | 4 Dokumen | 225.000.000 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata | | | |
| | | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan | 8 Dokumen | 331.000.000 | | | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan | 8 Dokumen | 225.000.000 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | | |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Usulan Pagu | No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | 2024 | 2024 | | | | 2024 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 8 Dokumen | 755.000.000 | | | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 8 Dokumen | 300.000.000 |
| | | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan | 8 Dokumen | 340.000.000 | | | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan | 8 Dokumen | 225.000.000 |
| V | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | 7.087.000.000 | V | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | 4.912.642.000 |
| | BIRO PEREKONOMIAN | | | 2.947.000.000 | | BIRO PEREKONOMIAN | | | 2.512.448.000 |
| | | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan | 83% | 372.000.000 | | | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan | 83% | 462.448.000 |
| | | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan | 78% | 625.000.000 | | | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan | 78% | 700.000.000 |
| | | Persentase ketercapaian laba BUMD Aneka Usaha | 81% | 325.000.000 | | | Persentase ketercapaian laba BUMD Aneka Usaha | 81% | 300.000.000 |
| | | Persentase ketercapaian laba BUMD Jasa Keuangan | 85% | 1.475.000.000 | | | Persentase ketercapaian laba BUMD Jasa Keuangan | 85% | 1.000.000.000 |
| | | Persetase nilai kemandirian BLUD | 55% | 150.000.000 | | | Persetase nilai kemandirian BLUD | 55% | 50.000.000 |
| 1 | Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian | | | 997.000.000 | 1 | Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian | | | 1.162.448.000 |
| | | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro | 4 Dokumen | 196.000.000 | | | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro | 4 Dokumen | 242.448.000 |
| | | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan | 4 Dokumen | 176.000.000 | | | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan | 4 Dokumen | 220.000.000 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Usulan Pagu | No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | 2024 | 2024 | | | | 2024 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro | 4 Dokumen | 325.000.000 | | | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro | 4 Dokumen | 315.000.000 |
| | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan | 4 Dokumen | 300.000.000 | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan | 4 Dokumen | 385.000.000 |
| | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro | | | | | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro | | | |
| | | Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Ekonomi Makro | 4 Laporan | 196.000.000 | | | Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Ekonomi Makro | 4 Laporan | 242.448.000 |
| | | Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Perhubungan | 2 Laporan | 176.000.000 | | | Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Perhubungan | 2 Laporan | 220.000.000 |
| | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | | | | | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | | | |
| | | Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Ekonomi Mikro | 2 Laporan | 325.000.000 | | | Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Ekonomi Mikro | 2 Laporan | 315.000.000 |
| | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Perindustrian dan Perdagangan | 3 Laporan | 300.000.000 | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Perindustrian dan Perdagangan | 3 Laporan | 385.000.000 |
| 2 | Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD | | | 1.950.000.000 | 2 | Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD | | | 1.350.000.000 |
| | | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi dan kajian Pengembangan BUMD Aneka Usaha | 2 Dokumen | 325.000.000 | | | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi dan kajian Pengembangan BUMD Aneka Usaha | 2 Dokumen | 300.000.000 |
| | | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan | 2 Dokumen | 1.300.000.000 | | | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan | 2 Dokumen | 850.000.000 |
| | | Jumlah dokumen rekomendasi pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan | 2 Dokumen | 175.000.000 | | | Jumlah dokumen rekomendasi pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan | 2 Dokumen | 150.000.000 |
| | | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD | 2 Dokumen | 75.000.000 | | | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD | 2 Dokumen | 25.000.000 |
| | | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD | 2 Dokumen | 75.000.000 | | | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD | 2 Dokumen | 25.000.000 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Usulan Pagu | No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | 2024 | 2024 | | | | 2024 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | | | |
| | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan | 4 Laporan | 1.300.000.000 | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan | 4 Laporan | 850.000.000 |
| | Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMD dan Evaluasi Kebijakan | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMD dan Evaluasi Kebijakan | | | |
| | | Jumlah Laporan Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengembangan BUMD Jasa Keuangan | 4 Laporan | 175.000.000 | | | Jumlah Laporan Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengembangan BUMD Jasa Keuangan | 4 Laporan | 150.000.000 |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | | | |
| | | Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha | 4 Laporan | 325.000.000 | | | Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha | 4 Laporan | 300.000.000 |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | | | |
| | | Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | 2 Laporan | 75.000.000 | | | Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | 2 Laporan | 25.000.000 |
| | Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BLUD | | | | | Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BLUD | | | |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Usulan Pagu | No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | 2024 | 2024 | | | | 2024 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan pengembangan Badan Layanan Umum Daerah | 2 Laporan | 75.000.000 | | | Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan pengembangan Badan Layanan Umum Daerah | 2 Laporan | 25.000.000 |
| | BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM | | | 4.140.000.000 | | BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM | | | 2.400.194.000 |
| | | Presentase capaian kinerja program bidang pertanian | 87% | 2.490.000.000 | | | Presentase capaian kinerja program bidang pertanian | 87% | 1.246.074.000 |
| | | Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan | 85% | 650.000.000 | | | Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan | 85% | 537.760.000 |
| | | Presentase capaian kinerja program bidang infrastruktur | 85% | 1.000.000.000 | | | Presentase capaian kinerja program bidang infrastruktur | 85% | 616.360.000 |
| 3 | Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam | | | 4.140.000.000 | 3 | Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam | | | 2.400.194.000 |
| | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian | 2 Dokumen | 1.940.000.000 | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian | 2 Dokumen | 865.314.000 |
| | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan | 2 Dokumen | 275.000.000 | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan | 2 Dokumen | 199.880.000 |
| | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan | 2 Dokumen | 275.000.000 | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan | 2 Dokumen | 180.880.000 |
| | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2 Dokumen | 325.000.000 | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2 Dokumen | 280.000.000 |
| | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM | 2 Dokumen | 325.000.000 | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM | 2 Dokumen | 257.760.000 |
| | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, | 2 Dokumen | 550.000.000 | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, | 2 Dokumen | 346.560.000 |
| | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 2 Dokumen | 450.000.000 | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 2 Dokumen | 269.800.000 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Usulan Pagu | No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | 2024 | 2024 | | | | 2024 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | | |
| | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian | 4 Laporan | 440.000.000 | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian | 4 Laporan | 265.314.000 |
| | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan DBHCHT | 2 Laporan | 1.500.000.000 | | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan DBHCHT | 2 Laporan | 600.000.000 |
| | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan | 4 Laporan | 275.000.000 | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan | 4 Laporan | 199.880.000 |
| | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan | 4 Laporan | 275.000.000 | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan | 4 Laporan | 180.880.000 |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | | | |
| | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 4 Laporan | 325.000.000 | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 4 Laporan | 280.000.000 |
| | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan ESDM | 4 Laporan | 325.000.000 | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan ESDM | 4 Laporan | 257.760.000 |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | | | |
| | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 4 Laporan | 550.000.000 | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 4 Laporan | 346.560.000 |
| | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 4 Laporan | 450.000.000 | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 4 Laporan | 269.800.000 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Usulan Pagu | No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | 2024 | 2024 | | | | 2024 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA | | | | | BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA | | | |
| VI | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | | | 3.938.000.000 | VI | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | | | 2.505.000.000 |
| | | Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa | 95% | 2.129.000.000 | | | Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa | 95% | 1.355.000.000 |
| | | Efektivitas Pengadaan secara Elektronik | 80% | 1.012.000.000 | | | Tingkat Efektivitas Pengadaan secara Elektronik | 80% | 644.000.000 |
| | | Persentase Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM Fungsional PPBJ | 81% | 797.000.000 | | | Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa | 81% | 506.000.000 |
| 1 | Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 1 | Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | |
| | | Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa | 4 Laporan | 2.129.000.000 | | | Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa | 4 Laporan | 1.355.000.000 |
| | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | | | |
| | | Jumlah fasilitasi perencanaan Strategi pengadaan barang/jasa | 4 Laporan | 220.000.000 | | | Jumlah fasilitasi perencanaan Strategi pengadaan barang/jasa | 4 Laporan | 180.000.000 |
| | | Jumlah Laporan Hasil Penyusunan SHB | 2 Laporan | 220.000.000 | | | Jumlah Laporan Hasil Penyusunan SHB | 2 Laporan | 100.000.000 |
| | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | |
| | | Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai pagu diatas 200 juta | 12 Laporan | 1.100.000.000 | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai pagu diatas 200 juta | 12 Laporan | 700.000.000 |
| | | Jumlah Laporan Pengelolaan e katalog lokal | 4 Laporan | 242.000.000 | | | Jumlah Laporan Pengelolaan e katalog lokal | 4 Laporan | 153.000.000 |
| | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | 4 Laporan | 347.000.000 | | | Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | 4 Laporan | 222.000.000 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Usulan Pagu | No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | 2024 | 2024 | | | | 2024 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2 | Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | 1.012.000.000 | 2 | Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | 644.000.000 |
| | | Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jas | 4 Laporan | 1.012.000.000 | | | Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jas | 4 Laporan | 644.000.000 |
| | Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik | | | | | Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik | | | |
| | | Jumlah Laporan fasilitasi sistem dan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik | 4 Laporan | 319.000.000 | | | Jumlah Laporan fasilitasi sistem dan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik | 4 Laporan | 203.000.000 |
| | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | |
| | | Jumlah Laporan Pengembangan Sistem InformasiPengadaan Barang dan Jasa | 2 Laporan | 495.000.000 | | | Jumlah Laporan Pengembangan Sistem InformasiPengadaan Barang dan Jasa | 2 Laporan | 315.000.000 |
| | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | |
| | | Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | 4 Laporan | 198.000.000 | | | Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | 4 Laporan | 126.000.000 |
| 3 | Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | 797.000.000 | 3 | Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | 506.000.000 |
| | | Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa | 4 Laporan | 797.000.000 | | | Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa | 4 Laporan | 506.000.000 |
| | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa | | | |
| | | Jumlah Laporan pembinaan SDM Pengadaan barang/jasa Provinsi Jawa Tengah | 2 Laporan | 247.500.000 | | | Jumlah Laporan pembinaan SDM Pengadaan barang/jasa Provinsi Jawa Tengah | 2 Laporan | 157.000.000 |
| | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan UKPBJ | 4 Laporan | 272.000.000 | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan UKPBJ | 4 Laporan | 173.000.000 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Usulan Pagu | No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | 2024 | 2024 | | | | 2024 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | | | |
| | | Jumlah Laporan pendampingan dan konsultasi permasalahan pengadaan barang/jasa | 4 Laporan | 277.500.000 | | | Jumlah Laporan pendampingan dan konsultasi permasalahan pengadaan barang/jasa | 4 Laporan | 176.000.000 |
| | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | |
| VII | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | | | 3.397.000.000 | VII | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | | | 1.685.000.000 |
| | | Capaian Pelaksanaan APBD | 98,7% | 1.132.000.000 | | | Capaian Pelaksanaan APBD | 98,7% | 415.000.000 |
| | | Capaian Pelaksanaan APBN | 95,5% | 430.000.000 | | | Capaian Pelaksanaan APBN | 95,5% | 210.000.000 |
| | | Persentase realisasi bantuan keuangan | 85% | 955.000.000 | | | Persentase realisasi bantuan keuangan | 85% | 490.000.000 |
| | | Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah | 85% | 770.000.000 | | | Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah | 85% | 467.000.000 |
| | | Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi | 100% | 110.000.000 | | | Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi | 100% | 103.000.000 |
| 1 | Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | 1.135.000.000 | 1 | Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | 1.135.000.000 |
| | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD | 4 Dokumen | 702.000.000 | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD | 4 Dokumen | 220.000.000 |
| | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD | 4 Dokumen | 430.000.000 | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD | 4 Dokumen | 195.000.000 |
| | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN | 4 Dokumen | 430.000.000 | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN | 4 Dokumen | 210.000.000 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Usulan Pagu | No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | 2024 | 2024 | | | | 2024 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I | 8 Dokumen | 320.000.000 | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I | 8 Dokumen | 207.225.000 |
| | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II | 8 Dokumen | 320.000.000 | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II | 8 Dokumen | 207.775.000 |
| | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III | 8 Dokumen | 315.000.000 | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III | 8 Dokumen | 75.000.000 |
| | Pengendalian Administrasi n Pembangunan APBD | | | | | Pengendalian Administrasi n Pembangunan APBD | | | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD | 12 Laporan | 442.000.000 | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD | 12 Laporan | 195.000.000 |
| | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD | 12 Laporan | 260.000.000 | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD | 12 Laporan | 220.000.000 |
| | Pengendalian Administrasi Pembangunan APBN | | | | | Pengendalian Administrasi Pembangunan APBN | | | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN | 8 laporan | 430.000.000 | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN | 8 laporan | 210.000.000 |
| | Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah | | | | | Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil I | 4 Dokumen | 320.000.000 | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil I | 4 Dokumen | 207.225.000 |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil II | 4 Dokumen | 320.000.000 | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil II | 4 Dokumen | 207.775.000 |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil III | 4 Dokumen | 315.000.000 | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil III | 4 Dokumen | 75.000.000 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Usulan Pagu | No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | 2024 | 2024 | | | | 2024 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2 | Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | 880.000.000 | 2 | Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | 570.000.000 |
| | | Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap | 91% | 550.000.000 | | | Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap | 91% | 347.000.000 |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | 4 Dokumen | 220.000.000 | | | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | 4 Dokumen | 120.000.000 |
| | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | 2 Dokumen | 110.000.000 | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | 2 Dokumen | 103.000.000 |
| | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | |
| | | Jumlah dokumen Koordinasi dan Fasilitasi pelaporan pembangunan daerah | 12 Dokumen | 550.000.000 | | | Jumlah dokumen Koordinasi dan Fasilitasi pelaporan pembangunan daerah | 12 Dokumen | 347.000.000 |
| | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | | | | | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | | | |
| | | Jumlah dokumen Koordinasi, Analisis dan Evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah | 4 Dokumen | 220.000.000 | | | Jumlah dokumen Koordinasi, Analisis dan Evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah | 4 Dokumen | 120.000.000 |
| | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | | | | | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | 2 Dokumen | 110.000.000 | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | 2 Dokumen | 103.000.000 |
| | | | | | | | | | |
| VIII | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | | | 189.597.924.000 | VIII | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | | | 189.597.924.000 |
| | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | 783.947.000 | | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | 698.947.000 |
| | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | 90% | 275.000.000 | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | 90% | 190.000.000 |
| | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daera Biro Pembangunan Daerah | 100% | 508.947.000 | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daera Biro Pembangunan Daerah | 100% | 508.947.000 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Usulan Pagu | No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | 2024 | 2024 | | | | 2024 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | | | | 1 | Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | | | |
| | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | 100% | 275.000.000 | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | 100% | 190.000.000 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah | 6 Dokumen | 165.000.000 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah | 6 Dokumen | 110.000.000 |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah | 8 Laporan | 110.000.000 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah | 8 Laporan | 80.000.000 |
| 2 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 2 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pembangunan Daerah | 100% | 406.000.000 | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pembangunan Daerah | 100% | 437.104.000 |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Adm. Bangda | 16 Laporan | 56.000.000 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Adm. Bangda | 16 Laporan | 75.000.000 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Adm. Bangda | 24 Laporan | 350.000.000 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Adm. Bangda | 24 Laporan | 362.104.000 |
| | BIRO ORGANISASI | | | 738.200.000 | | BIRO ORGANISASI | | | 720.772.000 |
| | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi | 100% | 738.200.000 | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi | 100% | 720.772.000 |
| 1 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 1 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi | 100% | 266.300.000 | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi | 100% | 184.115.000 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Usulan Pagu | No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | 2024 | 2024 | | | | 2024 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | | | |
| | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 35 Orang | 83.650.000 | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 35 Orang | 43.000.000 |
| | Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | | | | | Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | | | |
| | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | 4 Dokumen | 182.650.000 | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | 4 Dokumen | 141.115.000 |
| | Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya | | | |
| | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | 0 | - | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | 0 | - |
| 2 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 2 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi | 100% | 471.900.000 | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi | 100% | 536.657.000 |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | |
| | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Organisasi | 12 Laporan | 80.650.000 | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Organisasi | 12 Laporan | 40.000.000 |
| | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Administrasi | 12 Laporan | 60.650.000 | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Administrasi | 12 Laporan | 20.000.000 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Organisasi | 12 Laporan | 214.950.000 | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Organisasi | 12 Laporan | 246.657.000 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Usulan Pagu | No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | 2024 | 2024 | | | | 2024 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Administrasi | 12 Laporan | 115.650.000 | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Administrasi | 12 Laporan | 230.000.000 |
| | **BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA** | | | 557.000.000 | | **BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA** | | | 840.452.000 |
| | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan | 100% | 557.000.000 | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan | 100% | 840.452.000 |
| 1 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 557.000.000 | 1 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 840.452.000 |
| | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra | 100% | 557.000.000 | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra | 100% | 840.452.000 |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | |
| | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama | 12 Laporan | 22.000.000 | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama | 12 Laporan | 24.206.000 |
| | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip Dinamis Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 12 Laporan | 10.000.000 | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip Dinamis Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 12 Laporan | 10.000.000 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD | | | |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Usulan Pagu | No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | 2024 | 2024 | | | | 2024 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama | 12 Laporan | 325.000.000 | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama | 12 Laporan | 381.246.000 |
| | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 12 Laporan | 200.000.000 | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 12 Laporan | 425.000.000 |
| | **BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM** | | | **1.243.000.000** | | **BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM** | | | **811.595.000** |
| | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang | 100% | 1.243.000.000 | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang | 100% | 811.595.000 |
| 1 | Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 800.000.000 | 1 | Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 400.000.000 |
| | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Biro Isda | 100% | 800.000.000 | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Biro Isda | 100% | 400.000.000 |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai | 8000 orang | 800.000.000 | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai | 8000 orang | 400.000.000 |
| 2 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 443.000.000 | 2 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 411.595.000 |
| | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Isda dan Asisten Ekbang | 100% | 443.000.000 | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Isda dan Asisten Ekbang | 100% | 411.595.000 |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | |
| | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA | 12 Laporan | 20.000.000 | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA | 12 Laporan | 10.000.000 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Usulan Pagu | No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | 2024 | 2024 | | | | 2024 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan | 12 Laporan | 25.000.000 | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan | 12 Laporan | 15.000.000 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA | 12 Laporan | 178.000.000 | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA | 12 Laporan | 176.595.000 |
| | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan | 12 Laporan | 220.000.000 | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan | 12 Laporan | 210.000.000 |
| | **BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | 594.300.000 | | **BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | 495.553.000 |
| | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat | 100% | 594.300.000 | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat | 100% | 495.553.000 |
| 1 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 594.300.000 | 1 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 495.553.000 |
| | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakyat | 100% | 594.300.000 | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakyat | 100% | 495.553.000 |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | |
| | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat | 12 Laporan | 154.000.000 | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat | 12 Laporan | 145.553.000 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Usulan Pagu | No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | 2024 | 2024 | | | | 2024 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat | 12 Laporan | 440.300.000 | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat | 12 Laporan | 350.000.000 |
| | **BIRO HUKUM** | | | 921.707.000 | | **BIRO HUKUM** | | | 526.209.000 |
| | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum | 100% | 921.707.000 | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum | 100% | 526.209.000 |
| 1 | Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 650.000.000 | 1 | Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 350.000.000 |
| | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Hukum | 100% | 650.000.000 | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Hukum | 100% | 350.000.000 |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan DBHCHT | 800 orang | 650.000.000 | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan DBHCHT | 800 orang | 350.000.000 |
| 2 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 271.707.000 | 2 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 176.209.000 |
| | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum | 100% | 271.707.000 | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum | 100% | 176.209.000 |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | |
| | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Hukum | 12 Laporan | 41.707.000 | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Hukum | 12 Laporan | 10.209.000 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Usulan Pagu | No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | 2024 | 2024 | | | | 2024 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Hukum | 12 Laporan | 230.000.000 | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Hukum | 12 Laporan | 166.000.000 |
| | **BIRO PEREKONOMIAN** | | | 385.000.000 | | **BIRO PEREKONOMIAN** | | | 290.000.000 |
| | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian | 100% | 385.000.000 | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian | 100% | 290.000.000 |
| 1 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 385.000.000 | 1 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 290.000.000 |
| | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian | 100% | 385.000.000 | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian | 100% | 290.000.000 |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | |
| | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Perekonomian | 12 Laporan | 30.000.000 | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Perekonomian | 12 Laporan | 15.000.000 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Perekonomian | 12 Laporan | 355.000.000 | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Perekonomian | 12 Laporan | 275.000.000 |
| | **BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA** | | | 408.700.000 | | **BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA** | | | 261.800.000 |
| | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro APBJ | 100% | 408.700.000 | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro APBJ | 100% | 261.800.000 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Usulan Pagu | No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | 2024 | 2024 | | | | 2024 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 408.700.000 | 1 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 261.800.000 |
| | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | 100% | 408.700.000 | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | 100% | 261.800.000 |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | |
| | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | 12 Laporan | 38.700.000 | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | 12 Laporan | 25.000.000 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD | | | |
| | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | 12 Laporan | 370.000.000 | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | 12 Laporan | 236.800.000 |
| | **BIRO UMUM** | | | 374.466.426.000 | | **BIRO UMUM** | | | 200.659.147.000 |
| | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda | 100% | 187.466.844.000 | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda | 100% | 179.018.147.000 |
| 1 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 109.174.607.000 | 1 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 108.516.013.000 |
| | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | 12 Laporan | 109.174.607.000 | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | 12 Laporan | 108.516.013.000 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 12 Bulan | 107.254.177.000 | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 12 Bulan | 106.601.013.000 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Usulan Pagu | No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | 2024 | 2024 | | | | 2024 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | |
| | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | 12 Dokumen | 1.500.000.000 | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | 12 Dokumen | 1.540.000.000 |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| | | Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 337.930.000 | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 300.000.000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | |
| | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | 12 Laporan | 82.500.000 | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | 12 Laporan | 75.000.000 |
| 2 | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 635.250.000 | 2 | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 344.200.000 |
| | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | 12 Laporan | 635.250.000 | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | 12 Laporan | 344.200.000 |
| | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | 12 Dokumen | 412.500.000 | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | 12 Dokumen | 44.200.000 |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah | 12 Laporan | 222.750.000 | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah | 12 Laporan | 300.000.000 |
| 3 | Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | 22.000.000 | 3 | Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | 20.000.000 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Usulan Pagu | No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | 2024 | 2024 | | | | 2024 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah | 12 Laporan | 22.000.000 | | | Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah | 12 Laporan | 20.000.000 |
| | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | |
| | | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah | 12 Laporan | 22.000.000 | | | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah | 12 Laporan | 20.000.000 |
| 4 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 431.452.521.000 | 4 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 237.795.806.000 |
| | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda | 100% | 8.331.222.000 | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda | 100% | 7.418.996.000 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 12 Paket | 442.680.000 | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 12 Paket | 352.437.000 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 12 Paket | 560.789.000 | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 12 Paket | 500.718.000 |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | 12 Paket | 467.500.000 | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | 12 Paket | 425.000.000 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 12 Paket | 132.000.000 | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 12 Paket | 120.000.000 |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 12 Paket | 247.500.000 | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 12 Paket | 150.000.000 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Usulan Pagu | No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | 2024 | 2024 | | | | 2024 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | 12 Laporan | 4.840.000.000 | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | 12 Laporan | 4.241.605.000 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Umum | 12 Laporan | 1.640.753.000 | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Umum | 12 Laporan | 1.629.236.000 |
| | | | | | | | | | |
| 5 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 6.446.000.000 | 5 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 3.835.500.000 |
| | | Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | 2 Paket | 6.446.000.000 | | | Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | 2 Paket | 3.835.500.000 |
| | Pengadaan Mebel | | | | | Pengadaan Mebel | | | |
| | | Jumlah paket mebel yang disediakan | 2 Paket | 330.000.000 | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | 2 Paket | 810.500.000 |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 50 Unit | 6.116.000.000 | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 50 Unit | 3.025.000.000 |
| | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | |
| | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | 0 | - | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | 0 | - |
| 6 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 8.705.298.000 | 6 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 6.658.908.000 |
| | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | 833 Unit | 8.705.298.000 | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | 833 Unit | 6.658.908.000 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Usulan Pagu | No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | 2024 | 2024 | | | | 2024 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 4 Unit | 275.000.000 | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 4 Unit | 250.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 182 unit | 2.062.500.000 | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 182 unit | 1.775.000.000 |
| | Pemeliharaan Mebel | | | | | Pemeliharaan Mebel | | | |
| | | Jumlah mebel yang dipelihara | 30 unit | 68.750.000 | | | Jumlah mebel yang dipelihara | 30 unit | 87.500.000 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 300 Unit | 1.375.000.000 | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 300 Unit | 1.400.000.000 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 17 unit | 4.470.298.000 | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 17 unit | 2.833.908.000 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 300 Unit | 453.750.000 | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 300 Unit | 312.500.000 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Usulan Pagu | No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | 2024 | 2024 | | | | 2024 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 7 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 25.092.334.000 | 7 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 24.231.213.000 |
| | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda | 12 Laporan | 25.092.334.000 | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda | 12 Laporan | 24.231.213.000 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 Laporan | 6.820.000.000 | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 Laporan | 7.000.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 12 Laporan | 914.334.000 | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 12 Laporan | 631.213.000 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 12 Laporan | 16.995.000.000 | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 12 Laporan | 16.100.000.000 |
| | | Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah | 3 Laporan | 33.000.000 | | | Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah | 3 Laporan | 300.000.000 |
| | | Jumlah Penilaian pelayanan Biro umum | 12 Bulan | 330.000.000 | | | Jumlah Penilaian pelayanan Biro umum | 12 Bulan | 200.000.000 |
| 8 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | 29.060.133.000 | 8 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | 27.993.317.000 |
| | | Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda | 100% | 29.060.133.000 | | | Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda | 100% | 27.993.317.000 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Usulan Pagu | No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | 2024 | 2024 | | | | 2024 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | |
| | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah | 2 orang | 266.011.000 | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah | 2 orang | 243.094.000 |
| | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | |
| | | Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah | 2 orang | 28.794.122.000 | | | Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah | 2 orang | 27.750.223.000 |
| | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan | 100% | 164.596.982.000 | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan | 100% | 4.355.000.000 |
| | Kegiatan Administrasi Umum | | | | | Kegiatan Administrasi Umum | | | |
| | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan | 100% | 27.500.000 | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan | 100% | 25.000.000 |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | |
| | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Umum | 12 Laporan | 27.500.000 | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Umum | 12 Laporan | 25.000.000 |
| 7 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 33.000.000 | 7 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 30.000.000 |
| | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan | 12 Laporan | - | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan | 12 Laporan | 30.000.000 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Usulan Pagu | No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | 2024 | 2024 | | | | 2024 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 12 Laporan | 33.000.000 | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 12 Laporan | 30.000.000 |
| | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | |
| | | Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan | 100% | 231.000.000 | | | Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan | 100% | 210.000.000 |
| | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | |
| | | Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah | 4 Paket | 88.000.000 | | | Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah | 4 Paket | 130.000.000 |
| | | Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Wakil Kepala Daerah | 4 Paket | 88.000.000 | | | Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Wakil Kepala Daerah | 4 Paket | 30.000.000 |
| | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | |
| | | Jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala daerah | 4 orang | 27.500.000 | | | Jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala daerah | 4 orang | 40.000.000 |
| | | Jumlah orang yang mengikuti medical check up wakil kepala daerah | 4 orang | 27.500.000 | | | Jumlah orang yang mengikuti medical check up wakil kepala daerah | 4 orang | 10.000.000 |
| 4 | Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | | | 6.380.000.000 | 4 | Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | | | 4.090.000.000 |
| | | Persentase layanan fasilitasi kerumahtanggan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan | 100% | 6.380.000.000 | | | Persentase layanan fasilitasi kerumahtanggan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan | 100% | 4.090.000.000 |
| | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | | | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | | |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Usulan Pagu | No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | 2024 | 2024 | | | | 2024 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan | 12 Paket | 3.245.000.000 | | | Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan | 12 Paket | 2.950.000.000 |
| | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | | | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | | |
| | | Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan | 12 Paket | 1.925.000.000 | | | Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan | 12 Paket | 40.000.000 |
| | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | | | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | | |
| | | Jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang disediakan | 12 Paket | 1.210.000.000 | | | Jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang disediakan | 12 Paket | 1.100.000.000 |
| | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol | 100% | 22.402.600.000 | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol | 100% | 17.286.000.000 |
| 1 | Kegiatan Administrasi Umum | | | 78.100.000 | 1 | Kegiatan Administrasi Umum | | | 165.000.000 |
| | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol | 100% | 78.100.000 | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol | 100% | 165.000.000 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | |
| | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 12 Dokumen | 39.600.000 | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 12 Dokumen | 45.000.000 |
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | |
| | | jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | 4 Dokumen | 38.500.000 | | | jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | 4 Dokumen | 120.000.000 |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Usulan Pagu | No. | Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan) | Target Kinerja | Pagu Indikatif |
| | | | 2024 | 2024 | | | | 2024 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2 | Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan | | | 20.735.000.000 | 2 | Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan | | | 14.870.753.000 |
| | | Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi komunikasi dan Dokumentasi pimpinan | 12 Laporan | 20.735.000.000 | | | Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi komunikasi dan Dokumentasi pimpinan | 12 Laporan | 14.870.753.000 |
| | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | |
| | | Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan | 12 Laporan | 17.325.000.000 | | | Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan | 12 Laporan | 11.570.753.000 |
| | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan | | | | | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan | | | |
| | | Jumlah laporan pengelolaan dokumentasi pimpinan | 12 Laporan | 3.080.000.000 | | | Jumlah laporan pengelolaan dokumentasi pimpinan | 12 Laporan | 3.000.000.000 |
| | Penyiapan Materi Pimpinan | | | | | Penyiapan Materi Pimpinan | | | |
| | | Jumlah dokumen materi pimpinan yang disiapkan | 12 Dokumen | 330.000.000 | | | Jumlah dokumen materi pimpinan yang disiapkan | 12 Dokumen | 300.000.000 |
| 3 | Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan | | | 1.589.500.000 | 3 | Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan | | | 2.250.247.000 |
| | | Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun | 12 Laporan | 1.589.500.000 | | | Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun | 12 Laporan | 2.250.247.000 |
| | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | | | | | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | | | |
| | | Jumlah laporan hasil fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara | 12 Laporan | 1.479.500.000 | | | Jumlah laporan hasil fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara | 12 Laporan | 2.080.247.000 |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | |
| | | Jumlah laporan hasil fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah | 12 Laporan | 88.000.000 | | | Jumlah laporan hasil fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah | 12 Laporan | 150.000.000 |
| | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | | | | | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | | | |
| | | Jumlah laporan pengelolaan hubungan keprotokolan | 12 Laporan | 22.000.000 | | | Jumlah laporan pengelolaan hubungan keprotokolan | 12 Laporan | 20.000.000 |

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tidak melaksanakan usulan kegiatan dari masyarakat karena bukan lembaga teknis. Usulan kegiatan masyarakat yang masuk ke Setda dilaksanakan oleh Dinas Teknis.

TABEL 2.5

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023 PROVINSI JAWA TENGAH

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | BESARAN/VOLUME | CATATAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

NIHIL

# BAB III
# TUJUAN DAN SASARAN
# SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

## 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

Guna mewujudkan pencapaian target-target kinerja pembangunan sebagaimana dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, dan merespon dinamika situasi global, nasional, dan regional perlu diantisipasi dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Sinergi Renja dengan berbagai situasi dinamis tersebut, diarahkan untuk mencapai Tujuan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, "Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari" yang ditunjukkan dengan kemiskinan yang semakin menurun, pendapatan per kapita yang semakin meningkat, serta berkurangnya ketimpangan pendapatan antar masyarakat dan Sasaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, yaitu:

1) Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing, dan berkelanjutan;
2) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif;
3) Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
4) Terujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Pada tahun 2024, kondisi perekonomian Jawa Tengah diprediksi sudah pulih setelah sempat mengalami penurunan disebabkan adanya pandemi covid-19 dan konflik internasional yang menyebabkan ketidakpastian global. Namun begitu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah tetap perlu berhati-hati dan mewaspadai kondisi serupa dapat terjadi kembali dimasa yang akan datang. Pemerintah daerah perlu melakukan upaya prefentif dengan mengembangan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang. Selain itu, sebagai kunci dalam memberikan pelayanan prima dan respon cepat terhadap setiap persoalan yang muncul di masyarakat.

Arah kebijakan strategis nasional dan daerah menjadi penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024. Berikut isu strategis nasional dan daerah tahun 2024 yang perlu sinergikan pencapaiannya dalam pelaksanaan agenda Renja Setda tahun 2024:

1. Arah kebijakan Nasional antara lain:
    a. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
    b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.
    c. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
    d. Penguatan daya saing.
    e. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi.
    f. Perceptan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.
2. Prioritas strategis Provinsi Jawa Tengah antara lain:
    a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas.
    b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata.
    c. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tamping.
    d. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

### 3.2.1 Tujuan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Guna memecahkan permasalahan serta menangani isu strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka ditetapkan rumusan tujuan yang hendak dicapai pada tahun 2024-2026 ditetapkan tujuan Setda yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah;
2. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Daerah.

### 3.2.2 Sasaran Sekretariat Provinsi Jawa Tengah

Guna mencapai hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan Sekretriat Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud, maka rumusan Sasaran yang akan di capai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah:

Tujuan pertama, Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah memiliki satu sasaran, yaitu: Meningkatnya Sinergi Kebijakan yang Adaptif dan Berorientasi Hasil. Sedangkan tujuan kedua, Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Setda memiliki dua sasaran,

yaitu: (1).Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah; dan (2). Meningkatnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah. Guna mewujudkan sasaran tersebut, Sekretariat Daerah dalam dokumen Renstra Perubahan Tahun 2024-2026 merumuskan sejumlah program, yaitu:

Sasaran "Meningkatnya Sinergi Kebijakan yang Adaptif dan Berorientasi Hasil" akan diwujudkan melalui tujuh program, yaitu: (1). Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah; (2). Program Kesejahteraan Rakyat; (3). Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum; (4). Program Perekonomian dan Pembagunan; (5). Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa; (6). Program Kebijakan Administrasi Pembangunan; (7). Program Penataan Organisasi.

Sasaran "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah" dan "Meningkatnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah" keduanya diwujudkan melalui Program Administrasi Umum

Adapun perumusan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 beserta targetnya dituangkan dalam tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan dan Sasaran | Satuan | Target |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah | | Indeks Kematangan Kebijakan | Angka | 36,1 |
| | Meningkatnya Sinergi Kebijakan yang Adaptif dan Berorientasi Hasil | Persentase capaian kinerja program OPD lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah | % | 80 |
| | | Persentase capaian kinerja program OPD lingkup Perekonomian dan Pelayanan PBJ | % | 90 |
| | | Persentase capaian kinerja program OPD lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat | % | 90 |
| Kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Perangkat Daerah | | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | Angka | 76 |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 82 |
| | Meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah | Nilai MRI Perangkat Daerah | Angka | 2,83 |

3.3. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renja Sekretaris Daerah dilakukan pada konteks operasional. Untuk level strategis Sekretaris Daerah tidak dirumuskan proses manajemen risiko.

**Tabel 3.2**
**Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Resiko Strategis Perangkat Daerah Sekretariat Daerah**
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024**

| Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD | Pernyataan Resiko | Skala Risiko | Sebab | Dampak | Rencana Tindak Pengendalian | Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

NIHIL

# BAB IV

# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

# SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

## 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024

Bab ini menjelaskan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2024 dan perkiraan maju tahun 2025 berikut dengan target dan pagu indikatif yang dituangkan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

**Tabel 4.1**
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024**
**dan Prakiraan Maju tahun 2025**
**Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah**

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (3) | (5) | (6) | (8) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (13) | (14) | (15) |
| **Meningkatkan kualitas kebijakan daerah** | | | | | | | | | **434.559.513.000** | | **368.321.299.000** | **SEKRETARIAT DAERAH** |
| | | | | | | Indeks Kematangan Kebijakan | Angka | 36,1 | | 36,1 | | |
| | **Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil** | | | | | | | | **434.559.513.000** | | **368.321.299.000** | |
| | | | | | | **Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah** | **%** | **80** | **3.395.656.000** | 80 | 5.517.525.000 | ASISTEN ADMINISTRASI |
| | | 4.01.02 | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | | | | | | **1.710.656.000** | | **2.766.025.000** | BIRO ORGANISASI |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB | % | 14,29 | 170.000.000 | 14,29 | 295.000.000 | |
| | | 4.01.02.1.02 | | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | | | | | 170.000.000 | | 295.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota | Dokumen | 4 | 170.000.000 | 4 | 295.000.000 | |
| | | 4.01.02.1.02.0001 | | | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | | 170.000.000 | | 295.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di Kab/kota | Laporan | 4 | 170.000.000 | 4 | 295.000.000 | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya | % | 85,71 | 150.470.000 | 85,71 | 232.500.000 | |
| | | 4.01.02.1.01 | | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | | 150.470.000 | | 232.500.000 | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota | Dokumen | 4 | 150.470.000 | 4 | 232.500.000 | |
| | | 4.01.02.1.01.0002 | | | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | | | | 150.470.000 | | 232.500.000 | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Pembinaan Kematangan Organisasi di Kabupaten/Kota | Laporan | 12 | 150.470.000 | 4 | 232.500.000 | |
| | | | | | | Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A | % | 64,28 | 272.861.000 | 64,28 | 395.000.000 | |
| | | 4.01.02.1.02 | | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | | | | | 272.861.000 | | 395.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya | Dokumen | 4 | 272.861.000 | 4 | 395.000.000 | |
| | | 4.01.02.1.02.0002 | | | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | | | | 272.861.000 | | 395.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil monev AKIP OPD dan Kab/Kota | Laporan | 4 | 272.861.000 | 4 | 395.000.000 | |
| | | | | | | Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan | % | 50 | 314.520.000 | 50 | 455.000.000 | |
| | | 4.01.02.1.02 | | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | | | | | 314.520.000 | | 455.000.000 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (3) | (5) | (6) | (8) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (13) | (14) | (15) |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan | Dokumen | 4 | 314.520.000 | 4 | 455.000.000 | |
| | | 4.01.02.1.02.0004 | | | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan | | | | 314.520.000 | | 455.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi Tatalaksana Pemerintahan | Laporan | 12 | 314.520.000 | 4 | 455.000.000 | |
| | | | | | | Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif | % | 88,1 | 179.500.000 | 88,1 | 263.025.000 | |
| | | 4.01.02.1.01 | | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | | 179.500.000 | | 263.025.000 | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota | Dokumen | 4 | 179.500.000 | 4 | 263.025.000 | |
| | | 4.01.02.1.01.0003 | | | Penataan Analisis Jabatan | | | | 179.500.000 | | 263.025.000 | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Analisis Jabatan OPD dan kab/kota | Laporan | 4 | 179.500.000 | 4 | 263.025.000 | |
| | | | | | | Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A | % | 60 | 95.785.000 | 60 | 242.000.000 | |
| | | 4.01.02.1.02 | | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | | | | | 95.785.000 | | 242.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD | Dokumen | 4 | 95.785.000 | 4 | 242.000.000 | |
| | | 4.01.02.1.02.0001 | | | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | | 95.785.000 | | 242.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di OPD | Laporan | 12 | 95.785.000 | 4 | 242.000.000 | |
| | | | | | | Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi | % | 66 | 214.000.000 | 66 | 431.500.000 | |
| | | 4.01.02.1.01 | | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | | 214.000.000 | | 431.500.000 | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi | Dokumen | 4 | 214.000.000 | 4 | 431.500.000 | |
| | | 4.01.02.1.01.0001 | | | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi | | | | 214.000.000 | | 431.500.000 | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah | Laporan | 12 | 153.680.000 | 4 | 241.500.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan koordinasi , fasilitasi dan asistensi peningkatan kematangan organisasi dan kebijakan perangkat daerah | Laporan | 12 | 60.320.000 | 2 | 190.000.000 | |
| | | | | | | Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan | % | 88,73 | 313.520.000 | 88,73 | 452.000.000 | |
| | | 4.01.02.1.02 | | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | | | | | 313.520.000 | | 452.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik | Dokumen | 4 | 313.520.000 | 4 | 452.000.000 | |
| | | 4.01.02.1.02.0005 | | | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | | | | 313.520.000 | | 452.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | Laporan | 12 | 313.520.000 | 6 | 452.000.000 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (3) | (5) | (6) | (8) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (13) | (14) | (15) |
| | | 4.01.08 | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | | | | | | **1.685.000.000** | | **2.751.500.000** | BIRO ADM. BANGDA |
| | | | | | | Persentase capaian pelaksanaan APBD | % | 98,7 | 415.000.000 | 98,7 | 642.000.000 | |
| | | 4.01.08.1.01 | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | 415.000.000 | | 642.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD | Dokumen | 4 | 195.000.000 | 4 | 406.000.000 | |
| | | 4.01.08.1.01.0001 | | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | | | | 195.000.000 | | 406.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD | Laporan | 12 | 195.000.000 | 12 | 406.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD | Dokumen | 4 | 220.000.000 | 4 | 236.000.000 | |
| | | 4.01.08.1.01.0001 | | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | | | | 220.000.000 | | 236.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD | Laporan | 12 | 220.000.000 | 12 | 236.000.000 | |
| | | | | | | Persentase capaian pelaksanaan APBN | % | 95,5 | 210.000.000 | 95,5 | 416.500.000 | |
| | | 4.01.08.1.01 | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | 210.000.000 | | 416.500.000 | |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN | Dokumen | 4 | 210.000.000 | 4 | 416.500.000 | |
| | | 4.01.08.1.01.0002 | | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN | | | | 210.000.000 | | 416.500.000 | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN | Laporan | 8 | 210.000.000 | 8 | 416.500.000 | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah | % | 85 | 467.000.000 | 85 | 733.500.000 | |
| | | 4.01.08.1.02 | | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | 467.000.000 | | 733.500.000 | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | Dokumen | 4 | 120.000.000 | 4 | 200.000.000 | |
| | | 4.01.08.1.02.0001 | | | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | | | | 120.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Koordinasi, Analisis dan Evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah | Dokumen | 4 | 120.000.000 | 4 | 200.000.000 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (3) | (5) | (6) | (8) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (13) | (14) | (15) |
| | | | | | | Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap | % | 91 | 347.000.000 | 91 | 533.500.000 | |
| | | 4.01.08.1.02.0002 | | | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | 347.000.000 | | 533.500.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Koordinasi dan Fasilitasi pelaporan pembangunan daerah | Dokumen | 12 | 347.000.000 | 12 | 533.500.000 | |
| | | | | | | Persentase realisasi bantuan keuangan | % | 85 | 490.000.000 | 85 | 856.500.000 | |
| | | 4.01.08.1.01 | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | 490.000.000 | | 856.500.000 | |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I | Dokumen | 8 | 207.225.000 | 8 | 290.000.000 | |
| | | 4.01.08.1.01.0003 | | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | | | | 207.225.000 | | 290.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil I | Dokumen | 8 | 207.225.000 | 8 | 290.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II | Dokumen | 8 | 207.775.000 | 8 | 290.000.000 | |
| | | 4.01.08.1.01.0003 | | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | | | | 207.775.000 | | 290.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil II | Dokumen | 8 | 207.775.000 | 8 | 290.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III | Dokumen | 8 | 75.000.000 | 8 | 276.500.000 | |
| | | 4.01.08.1.01.0003 | | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | | | | 75.000.000 | | 276.500.000 | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil III | Dokumen | 8 | 75.000.000 | 8 | 276.500.000 | |
| | | | | | | Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah yang direalisasi | % | 100 | 103.000.000 | 100 | 103.000.000 | |
| | | 4.01.08.1.02 | | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | 103.000.000 | | 103.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | Dokumen | 2 | 103.000.000 | 2 | 103.000.000 | |
| | | 4.01.08.1.02.0003 | | | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | | | | 103.000.000 | | 103.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | Dokumen | 2 | 103.000.000 | 2 | 103.000.000 | |
| | | | | | | **Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat** | **%** | **90** | **423.746.215.000** | **90** | **337.140.034.000** | ASISTEN PEMERINTAHAN |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (3) | (5) | (6) | (8) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (13) | (14) | (15) |
| | | 4.01.03 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | | | | | | **3.783.000.000** | | **3.150.000.000** | BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA |
| | | | | | | Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti | % | 95 | 980.000.000 | 95 | 1.010.000.000 | |
| | | 4.01.03.1.01 | | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan | | | | | 980.000.000 | | 1.010.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ | Dokumen | 8 | 980.000.000 | 8 | 1.010.000.000 | |
| | | 4.01.03.1.01.0001 | | | Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan | | | | 550.000.000 | | 575.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan AdministrasiKebijakan Pemerintahan | Dokumen | 4 | 550.000.000 | 4 | 575.000.000 | |
| | | 4.01.03.1.01.0002 | | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum | | | | 230.000.000 | | 235.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi PelaksanaanPemerintahan Umum | Dokumen | 4 | 230.000.000 | 4 | 235.000.000 | |
| | | 4.01.03.1.01.0003 | | | Fasilitasi Penataan Wilayah | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah | Dokumen | 4 | 200.000.000 | 4 | 200.000.000 | |
| | | | | | | Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah | % | 95 | 1.630.000.000 | 95 | 950.000.000 | |
| | | 4.01.03.1.02 | | Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | | 1.630.000.000 | | 950.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM | Dokumen | 3 | 225.000.000 | 3 | 230.000.000 | |
| | | 4.01.03.1.02.0002 | | | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan | | | | 225.000.000 | | 230.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM | Dokumen | 4 | 225.000.000 | 4 | 230.000.000 | |
| | | | | | | Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD | % | 95 | 1.100.000.000 | 95 | 550.000.000 | |
| | | 4.01.03.1.02.0001 | | | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | | | | 1.100.000.000 | | 400.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | Dokumen | 45 | 1.100.000.000 | 45 | 400.000.000 | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | % | 100 | 305.000.000 | 100 | 320.000.000 | |
| | | 4.01.03.1.02.0003 | | | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | 305.000.000 | | 320.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | Laporan | 37 | 305.000.000 | 37 | 320.000.000 | |
| | | | | | | Tingkat efektivitas kerjasama daerah | % | 95 | 1.173.000.000 | 95 | 1.190.000.000 | |
| | | 4.01.03.1.03 | | Fasilitasi Kerjasama Daerah | | | | | 1.173.000.000 | | 1.190.000.000 | |
| | | | | | | Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti | % | 95 | 605.000.000 | 95 | 580.000.000 | |
| | | 4.01.03.1.03.0001 | | | Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah | | | | 605.000.000 | | 580.000.000 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (3) | (5) | (6) | (8) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (13) | (14) | (15) |
| | | | | | | Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah dalam negeri | Dokumen | 9 | 485.000.000 | 10 | 480.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah luar negeri | Dokumen | 5 | 120.000.000 | 6 | 100.000.000 | |
| | | | | | | Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti | % | 95 | 200.000.000 | 95 | 240.000.000 | |
| | | 4.01.03.1.03.0002 | | | Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta | | | | 200.000.000 | | 240.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Dalam Negeri | Dokumen | 6 | 100.000.000 | 7 | 120.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Luar Negeri | Dokumen | 4 | 100.000.000 | 5 | 120.000.000 | |
| | | | | | | Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah | % | 95 | 368.000.000 | 95 | 370.000.000 | |
| | | 4.01.03.1.03.0003 | | | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | | | | 368.000.000 | | 370.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Kerja Sama Dalam Negeri yang Dievaluasi | Laporan | 4 | 153.000.000 | 4 | 130.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Kerja Sama Luar Negeri yang Dievaluasi | Laporan | 4 | 107.550.000 | 4 | 110.000.000 | |
| | | | | | | Persentase layanan izin perjalanan ke Luar Negeri | % | 100 | 107.450.000 | 100 | 130.000.000 | |
| | | 4.01.04 | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | | | **417.524.225.000** | | **329.871.784.000** | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar | % | 81 | 750.000.000 | 81 | 820.000.000 | |
| | | 4.01.04.1.02 | | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | | | | | 750.000.000 | | 820.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan | Dokumen | 4 | 250.000.000 | 4 | 330.000.000 | |
| | | 4.01.04.1.02.0002 | | | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | | | | 250.000.000 | | 330.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | Dokumen | 8 | 250.000.000 | 8 | 330.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan | Dokumen | 4 | 250.000.000 | 4 | 240.000.000 | |
| | | 4.01.04.1.02.0001 | | | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | | | | 250.000.000 | | 240.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | Dokumen | 8 | 250.000.000 | 8 | 240.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial | Dokumen | 4 | 250.000.000 | 4 | 250.000.000 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (3) | (5) | (6) | (8) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (13) | (14) | (15) |
| | | 4.01.04.1.02.0003 | | | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | Dokumen | 8 | 250.000.000 | 8 | 250.000.000 | |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan non dasar | % | 82 | 750.000.000 | 82 | 1.229.500.000 | |
| | | 4.01.04.1.03 | | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | | | | | 750.000.000 | | 1.229.500.000 | |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan | Dokumen | 4 | 225.000.000 | 4 | 300.000.000 | |
| | | 4.01.04.1.03.0001 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata | | | | 225.000.000 | | 300.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan | Dokumen | 8 | 225.000.000 | 8 | 300.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dokumen | 4 | 300.000.000 | 4 | 627.000.000 | |
| | | 4.01.04.1.03.0002 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | | | | 300.000.000 | | 627.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dokumen | 8 | 300.000.000 | 8 | 627.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan administrasi Kependudukan | Dokumen | 4 | 225.000.000 | 4 | 302.500.000 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (3) | (5) | (6) | (8) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (13) | (14) | (15) |
| | | 4.01.04.1.03.0002 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | | | | 225.000.000 | | 302.500.000 | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan | Dokumen | 8 | 225.000.000 | 8 | 302.500.000 | |
| | | | | | | Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik | % | 54 | 416.024.225.000 | 54 | 327.822.284.000 | |
| | | 4.01.04.1.01 | | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual | | | | | 416.024.225.000 | | 327.822.284.000 | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku | Dokumen | 4 | 412.116.350.000 | 4 | 325.291.409.000 | |
| | | 4.01.04.1.01.0001 | | | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | | | | 412.116.350.000 | | 325.291.409.000 | |
| | | | | | | Jumlah fasilitasi pelaksanaan hibah sarana prasarana keagamaan | Unit | 750 | 412.116.350.000 | 750 | 325.291.409.000 | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan | Dokumen | 4 | 3.907.875.000 | 4 | 2.530.875.000 | |
| | | 4.01.04.1.01.0002 | | | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | | | | 3.907.875.000 | | 2.530.875.000 | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji | Kegiatan | 1 | 1.712.600.000 | 1 | 1.150.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan | Kegiatan | 8 | 2.195.275.000 | 8 | 1.380.875.000 | |
| | | 4.01.05 | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | | | | | | **2.438.990.000** | | **4.118.250.000** | **BIRO HUKUM** |
| | | | | | | Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani | % | 96 | 680.000.000 | 96 | 1.356.250.000 | |
| | | 4.01.05.1.02 | | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | | 680.000.000 | | 1.356.250.000 | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara | Dokumen | 12 | 680.000.000 | 12 | 1.356.250.000 | |
| | | 4.01.05.1.02.0001 | | | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum | | | | 680.000.000 | | 1.356.250.000 | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi penanganan Perkara | Perkara | 11 | 200.000.000 | 12 | 510.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu | Perkara | 200 | 480.000.000 | 200 | 846.250.000 | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota peduli HAM | % | 96 | 293.076.000 | 96 | 535.000.000 | |
| | | 4.01.05.1.02 | | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | | 293.076.000 | | 535.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | Dokumen | 12 | 293.076.000 | 12 | 535.000.000 | |
| | | 4.01.05.1.02.0002 | | | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM | | | | 293.076.000 | | 535.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen kebijakan yang telah diharmonisasi berdasarkan perspektif HAM | Dokumen | 0 | - | 0 | - | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi Implementasi HAM Kabupaten/kota | Kabupaten/ Kota | 35 | 103.000.000 | 35 | 235.000.000 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (3) | (5) | (6) | (8) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (13) | (14) | (15) |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi Penanganan sengketa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | Sengketa | 7 | 190.076.000 | 7 | 300.000.000 | |
| | | | | | | Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan | % | 96 | 874.368.000 | 96 | 1.408.250.000 | |
| | | 4.01.05.1.01 | | Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan | | | | | 874.368.000 | | 1.408.250.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen kajian produk hukum | Dokumen | 12 | 430.118.000 | 12 | 575.000.000 | |
| | | 4.01.05.1.01.0003 | | | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | | | | 430.118.000 | | 575.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumentasi dan Informasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | Laporan | 12 | 287.168.000 | 12 | 320.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Pengkajian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | Laporan | 12 | 142.950.000 | 12 | 255.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur | Dokumen | 12 | 44.000.000 | 12 | 110.000.000 | |
| | | 4.01.05.1.01.0002 | | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan | | | | 44.000.000 | | 110.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Keputusan Gubernur Jawa Tengah | Laporan | 12 | 44.000.000 | 12 | 110.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Dokumen | 12 | 400.250.000 | 12 | 723.250.000 | |
| | | 4.01.05.1.01.0001 | | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan | | | | 400.250.000 | | 723.250.000 | |
| | | | | | | Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah | Laporan | 12 | 150.000.000 | 12 | 273.250.000 | |
| | | | | | | Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah | Laporan | 12 | 250.250.000 | 12 | 450.000.000 | |
| | | | | | | Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji | % | 96 | 591.546.000 | 96 | 845.000.000 | |
| | | 4.01.05.1.01 | | Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan | | | | | 591.546.000 | | 818.750.000 | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum serta dokumen klarifikasi produk hukum Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 12 | 591.546.000 | 12 | 818.750.000 | |
| | | 4.01.05.1.01.0004 | | | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota | | | | 591.546.000 | | 818.750.000 | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I | Dokumen | 70 | 191.546.000 | 115 | 265.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II | Dokumen | 75 | 210.000.000 | 120 | 275.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III | Dokumen | 75 | 190.000.000 | 120 | 278.750.000 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (3) | (5) | (6) | (8) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (13) | (14) | (15) |
| | | | | | | **Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa** | **%** | **90** | **7.417.642.000** | **90** | **8.816.260.000** | ASISTEN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN |
| | | 4.01.06 | PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN | | | | | | **4.912.642.000** | | **5.199.200.000** | BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur | % | 85 | 616.360.000 | 85 | 526.000.000 | |
| | | 4.01.06.1.02 | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam | | | | | 616.360.000 | | 526.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, | Dokumen | 2 | 346.560.000 | 2 | 292.000.000 | |
| | | 4.01.06.1.02.0003 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | | | | 346.560.000 | | 292.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Laporan | 4 | 346.560.000 | 4 | 292.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Dokumen | 2 | 269.800.000 | 2 | 234.000.000 | |
| | | 4.01.06.1.02.0003 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | | | | 269.800.000 | | 234.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Laporan | 4 | 269.800.000 | 4 | 234.000.000 | |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan | % | 85 | 537.760.000 | 85 | 487.000.000 | |
| | | 4.01.06.1.02 | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam | | | | | 537.760.000 | | 487.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM | Dokumen | 2 | 257.760.000 | 2 | 214.000.000 | |
| | | 4.01.06.1.02.0002 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | | | | 257.760.000 | | 214.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan ESDM | Laporan | 4 | 257.760.000 | 4 | 214.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Dokumen | 2 | 280.000.000 | 2 | 273.000.000 | |
| | | 4.01.06.1.02.0002 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | | | | 280.000.000 | | 273.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Laporan | 4 | 280.000.000 | 4 | 273.000.000 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (3) | (5) | (6) | (8) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (13) | (14) | (15) |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program bidang pertanian | % | 87 | 1.246.074.000 | 87 | 595.000.000 | |
| | | 4.01.06.1.02 | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam | | | | | 1.246.074.000 | | 595.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan | Dokumen | 2 | 180.880.000 | 2 | 156.000.000 | |
| | | 4.01.06.1.02.0001 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | | | 180.880.000 | | 156.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan | Laporan | 4 | 180.880.000 | 4 | 156.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan | Dokumen | 2 | 199.880.000 | 2 | 175.000.000 | |
| | | 4.01.06.1.02.0001 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | | | 199.880.000 | | 175.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan | Laporan | 4 | 199.880.000 | 4 | 175.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian | Dokumen | 2 | 865.314.000 | 2 | 264.000.000 | |
| | | 4.01.06.1.02.0001 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | | | 865.314.000 | | 264.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan DBHCHT | Laporan | 2 | 600.000.000 | 2 | 4.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian | Laporan | 4 | 265.314.000 | 4 | 260.000.000 | |
| | | | | | | Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha | % | 81 | 300.000.000 | 81 | 325.000.000 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | | 4.01.06.1.03 | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD | | | | | 300.000.000 | | 325.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi dan kajian Pengembangan BUMD Aneka Usaha | Dokumen | 2 | 300.000.000 | 2 | 325.000.000 | |
| | | 4.01.06.1.03.0002 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | | | | 300.000.000 | | 325.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha | Laporan | 4 | 300.000.000 | 4 | 325.000.000 | |
| | | | | | | Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan | % | 85 | 1.000.000.000 | 85 | 1.175.000.000 | |
| | | 4.01.06.1.03 | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD | | | | | 1.000.000.000 | | 1.175.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan | Dokumen | 2 | 850.000.000 | 2 | 1.000.000.000 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (3) | (5) | (6) | (8) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (13) | (14) | (15) |
| | | 4.01.06.1.03.0001 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | | | | 850.000.000 | | 1.000.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan | Laporan | 4 | 850.000.000 | 4 | 1.000.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan | Dokumen | 2 | 150.000.000 | 2 | 175.000.000 | |
| | | 4.01.06.1.03.0003 | | | Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMDdanEvaluasiKebijakan | | | | 150.000.000 | | 175.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengembangan BUMD Jasa Keuangan | Laporan | 4 | 150.000.000 | 4 | 175.000.000 | |
| | | | | | | Persentase nilai kemandirian BLUD | % | 55 | 50.000.000 | 55 | 150.000.000 | |
| | | 4.01.06.1.03 | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD | | | | | 50.000.000 | | 150.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD | Dokumen | 2 | 25.000.000 | 2 | 75.000.000 | |
| | | 4.01.06.1.03.0004 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | | | | 25.000.000 | | 75.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | Laporan | 2 | 25.000.000 | 2 | 75.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD | Dokumen | 2 | 25.000.000 | 2 | 75.000.000 | |
| | | 4.01.06.1.03.0005 | | | Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUDdanEvaluasiKebijakan | | | | 25.000.000 | | 75.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan pengembangan Badan Layanan Umum Daerah | Laporan | 2 | 25.000.000 | 2 | 75.000.000 | |
| | | | | | | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan | % | 83 | 462.448.000 | 83 | 815.000.000 | |
| | | 4.01.06.1.01 | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian | | | | | 462.448.000 | | 815.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan | Dokumen | 4 | 220.000.000 | 4 | 400.000.000 | |
| | | 4.01.06.1.01.0001 | | | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro | | | | 220.000.000 | | 400.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Perhubungan | Laporan | 8 | 220.000.000 | 8 | 400.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro | Dokumen | 4 | 242.448.000 | 4 | 415.000.000 | |
| | | 4.01.06.1.01.0001 | | | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro | | | | 242.448.000 | | 415.000.000 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (3) | (5) | (6) | (8) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (13) | (14) | (15) |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Ekonomi Makro | Laporan | 8 | 242.448.000 | 8 | 415.000.000 | |
| | | | | | | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan | % | 78 | 700.000.000 | 78 | 1.126.200.000 | |
| | | 4.01.06.1.01 | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian | | | | | 700.000.000 | | 1.126.200.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro | Dokumen | 4 | 315.000.000 | 4 | 548.400.000 | |
| | | 4.01.06.1.01.0002 | | | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | | | | 315.000.000 | | 548.400.000 | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Ekonomi Mikro | Laporan | 8 | 315.000.000 | 8 | 548.400.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan | Dokumen | 4 | 385.000.000 | 4 | 577.800.000 | |
| | | 4.01.06.1.01.0002 | | | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | | | | 385.000.000 | | 577.800.000 | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Perindustrian dan Perdagangan | Laporan | 8 | 385.000.000 | 8 | 577.800.000 | |
| | | 4.01.07 | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | | | | | | **2.505.000.000** | | **3.617.060.000** | BIRO ADM PENGADAAN BARANG/JASA |
| | | | | | | Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa | % | 90 | 1.355.000.000 | 90 | 1.880.470.000 | |
| | | 4.01.07.1.01 | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | 1.355.000.000 | | 1.880.470.000 | |
| | | | | | | Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa | Laporan | 4 | 1.355.000.000 | 4 | 1.880.470.000 | |
| | | 4.01.07.1.01.0001 | | | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 280.000.000 | | 404.140.000 | |
| | | | | | | Jumlah fasilitasi perencanaan Strategi pengadaan barang/jasa | Laporan | 4 | 180.000.000 | 4 | 214.140.000 | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyusunan SHB | Laporan | 2 | 100.000.000 | 2 | 190.000.000 | |
| | | 4.01.07.1.01.0002 | | | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 853.000.000 | | 1.157.620.000 | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai pagu diatas 200 juta (non e purchasing) | Laporan | 12 | 700.000.000 | 12 | 935.350.000 | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pengelolaan e katalog lokal | Laporan | 4 | 153.000.000 | 4 | 222.270.000 | |
| | | 4.01.07.1.01.0003 | | | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 222.000.000 | | 318.710.000 | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan | 4 | 222.000.000 | 4 | 318.710.000 | |
| | | | | | | Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa | % | 81 | 506.000.000 | 81 | 807.030.000 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (3) | (5) | (6) | (8) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (13) | (14) | (15) |
| | | 4.01.07.1.03 | | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | 506.000.000 | | 807.030.000 | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa | Laporan | 4 | 506.000.000 | 4 | 807.030.000 | |
| | | 4.01.07.1.03.0001 | | | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 157.000.000 | | 277.320.000 | |
| | | | | | | Jumlah Laporan pembinaan SDM Pengadaan barang/jasa Provinsi Jawa Tengah | Laporan | 2 | 157.000.000 | 2 | 277.320.000 | |
| | | 4.01.07.1.03.0002 | | | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 173.000.000 | | 249.830.000 | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan UKPBJ | Laporan | 4 | 173.000.000 | 4 | 249.830.000 | |
| | | 4.01.07.1.03.0003 | | | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 176.000.000 | | 279.880.000 | |
| | | | | | | Jumlah Laporan pendampingan dan konsultasi permasalahan pengadaan barang/jasa | Laporan | 4 | 176.000.000 | 4 | 279.880.000 | |
| | | | | | | Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik | % | 80 | 644.000.000 | 80 | 929.560.000 | |
| | | 4.01.07.1.02 | | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | | 644.000.000 | | 929.560.000 | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa | Laporan | 4 | 644.000.000 | 4 | 929.560.000 | |
| | | 4.01.07.1.02.0001 | | | Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik | | | | 203.000.000 | | 293.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Laporan fasilitasi sistem dan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik | Laporan | 4 | 203.000.000 | 4 | 293.000.000 | |
| | | 4.01.07.1.02.0002 | | | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 315.000.000 | | 454.650.000 | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pengembangan Sistem InformasiPengadaan Barang dan Jasa | Laporan | 2 | 315.000.000 | 2 | 454.650.000 | |
| | | 4.01.07.1.02.0003 | | | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 126.000.000 | | 181.910.000 | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan | 4 | 126.000.000 | 4 | 181.910.000 | |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi Birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **207.130.432.000** | | **189.661.056.000** | **SEKRETARIAT DAERAH** |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah | Angka | 76 | 207.130.432.000 | 76 | 189.661.056.000 | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **206.940.432.000** | | **189.411.056.000** | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 82 | 206.940.432.000 | 82 | 189.411.056.000 | **SEKRETARIAT DAERAH** |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 206.940.432.000 | | 189.411.056.000 | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan | % | 100 | 4.655.000.000 | 100 | 6.065.000.000 | BIRO UMUM |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (3) | (5) | (6) | (8) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (13) | (14) | (15) |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan | % | 100 | 25.000.000 | 100 | 25.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan | Laporan | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.11 | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | 210.000.000 | | 210.000.000 | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan | % | 100 | 210.000.000 | 100 | 210.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.11.0002 | | | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 160.000.000 | | 160.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah yang disediakan | Paket | 4 | 130.000.000 | 4 | 80.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan wakil kepala daerah yang disediakan | Paket | 4 | 30.000.000 | 4 | 80.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.11.0003 | | | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala daerah | Orang | 4 | 40.000.000 | 4 | 25.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Wakil Kepala Daerah | Orang | 4 | 10.000.000 | 4 | 25.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.12 | | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | | | | | 4.390.000.000 | | 5.800.000.000 | |
| | | | | | | Persentase layanan fasilitasi kerumahtanggan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan | % | 100 | 4.390.000.000 | 100 | 5.800.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.12.0001 | | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | | | 2.950.000.000 | | 2.950.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan | Paket | 12 | 2.950.000.000 | 12 | 2.950.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.12.0002 | | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | | | 40.000.000 | | 1.750.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan | Paket | 12 | 40.000.000 | 12 | 1.750.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.12.0003 | | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | | | 1.400.000.000 | | 1.100.000.000 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (3) | (5) | (6) | (8) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (13) | (14) | (15) |
| | | | | | | Jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang disediakan | Paket | 12 | 1.400.000.000 | 12 | 1.100.000.000 | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah | % | 100 | 437.104.000 | 100 | 396.500.000 | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 437.104.000 | | 396.500.000 | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah | % | 100 | 437.104.000 | 100 | 396.500.000 | BIRO ADM. BANGDA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 362.104.000 | | 360.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Administrasi Pembangunan | Laporan | 24 | 362.104.000 | 24 | 360.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 75.000.000 | | 36.500.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Administrasi Pembangunan | Laporan | 16 | 75.000.000 | 16 | 36.500.000 | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa | % | 100 | 261.800.000 | 100 | 382.940.000 | BIRO ADM. PENGADAAN BARANG/JASA |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 261.800.000 | | 382.940.000 | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | % | 100 | 261.800.000 | 100 | 382.940.000 | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 236.800.000 | | 347.400.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan | 12 | 236.800.000 | 12 | 347.400.000 | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 25.000.000 | | 35.540.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan | 12 | 25.000.000 | 12 | 35.540.000 | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum | % | 100 | 526.209.000 | 100 | 235.457.000 | BIRO HUKUM |
| | | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 350.000.000 | | 1.000.000 | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Hukum | % | 100 | 350.000.000 | 100 | 1.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 350.000.000 | | 1.000.000 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (3) | (5) | (6) | (8) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (13) | (14) | (15) |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan DBHCHT | Orang | 800 | 350.000.000 | 800 | 1.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 176.209.000 | | 234.457.000 | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum | % | 100 | 176.209.000 | 100 | 234.457.000 | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 166.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Hukum | Laporan | 12 | 166.000.000 | 12 | 200.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 10.209.000 | | 34.457.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Hukum | Laporan | 12 | 10.209.000 | 12 | 34.457.000 | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang | % | 100 | 811.595.000 | 100 | 336.000.000 | BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM |
| | | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 400.000.000 | | - | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam | % | 100 | 400.000.000 | 100 | - | |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 400.000.000 | | 6.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai | Orang | 8000 | 400.000.000 | 8000 | 6.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 411.595.000 | | 336.000.000 | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dan Asisten Ekbang | % | 100 | 411.595.000 | 100 | 336.000.000 | BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 386.595.000 | | 296.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan | Laporan | 12 | 210.000.000 | 12 | 146.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA | Laporan | 12 | 176.595.000 | 12 | 150.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 25.000.000 | | 40.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan | Laporan | 12 | 15.000.000 | 12 | 20.000.000 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (3) | (5) | (6) | (8) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (13) | (14) | (15) |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA | Laporan | 12 | 10.000.000 | 12 | 20.000.000 | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat | % | 100 | 495.553.000 | 100 | 495.000.000 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 495.553.000 | | 495.000.000 | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakyat | % | 100 | 495.553.000 | 100 | 495.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 350.000.000 | | 375.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat | Laporan | 12 | 350.000.000 | 12 | 375.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 145.553.000 | | 120.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat | Laporan | 12 | 145.553.000 | 12 | 120.000.000 | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi | % | 100 | 720.772.000 | 100 | 657.975.000 | BIRO ORGANISASI |
| | | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 184.115.000 | | 239.000.000 | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi | % | 100 | 184.115.000 | 100 | 239.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | - | | - | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | Paket | 0 | - | 0 | - | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 141.115.000 | | 172.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 4 | 141.115.000 | 4 | 172.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 43.000.000 | | 67.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 12 | 43.000.000 | 35 | 67.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 536.657.000 | | 418.975.000 | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi | % | 100 | 536.657.000 | 100 | 418.975.000 | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 476.657.000 | | 310.975.000 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (3) | (5) | (6) | (8) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (13) | (14) | (15) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Administrasi | Laporan | 12 | 230.000.000 | 12 | 100.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Organisasi | Laporan | 12 | 246.657.000 | 12 | 210.975.000 | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 60.000.000 | | 108.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Administrasi | Laporan | 12 | 20.000.000 | 12 | 43.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Organisasi | Laporan | 12 | 40.000.000 | 12 | 65.000.000 | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan | % | 100 | 840.452.000 | 100 | 584.206.000 | BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 840.452.000 | | 584.206.000 | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra | % | 100 | 840.452.000 | 100 | 584.206.000 | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 806.246.000 | | 550.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Laporan | 12 | 425.000.000 | 12 | 200.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama | Laporan | 12 | 381.246.000 | 12 | 350.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 34.206.000 | | 34.206.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip Dinamis Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Laporan | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama | Laporan | 12 | 24.206.000 | 12 | 24.206.000 | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian | % | 100 | 290.000.000 | 100 | 380.274.000 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 290.000.000 | | 380.274.000 | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian | % | 100 | 290.000.000 | 100 | 380.274.000 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (3) | (5) | (6) | (8) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (13) | (14) | (15) |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 275.000.000 | | 355.274.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Perekonomian | Laporan | 12 | 275.000.000 | 12 | 355.274.000 | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 15.000.000 | | 25.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Perekonomian | Laporan | 12 | 15.000.000 | 12 | 25.000.000 | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol | % | 100 | 17.286.000.000 | 100 | 20.052.723.000 | BIRO UMUM |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 165.000.000 | | 71.000.000 | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol | % | 100 | 165.000.000 | 100 | 71.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 45.000.000 | | 36.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 45.000.000 | 12 | 36.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 120.000.000 | | 35.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 120.000.000 | 4 | 35.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.13 | | Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan | | | | | 14.870.753.000 | | 18.336.723.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan | Laporan | 12 | 14.870.753.000 | 12 | 18.336.723.000 | |
| | | X.XX.01.1.13.0001 | | | Penyiapan Materi Pimpinan | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen materi pimpinan yang disiapkan | Dokumen | 12 | 300.000.000 | 12 | 300.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.13.0002 | | | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | 11.570.753.000 | | 15.236.723.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan | Laporan | 12 | 11.570.753.000 | 12 | 15.236.723.000 | |
| | | X.XX.01.1.13.0003 | | | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan | | | | 3.000.000.000 | | 2.800.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengelolaan dokumentasi pimpinan | Laporan | 12 | 3.000.000.000 | 12 | 2.800.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.14 | | Fasilitasi Keprotokolan | | | | | 2.250.247.000 | | 1.645.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun | Laporan | 12 | 2.250.247.000 | 12 | 1.645.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.14.0001 | | | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | | | | 2.080.247.000 | | 1.345.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara | Laporan | 12 | 2.080.247.000 | 12 | 1.345.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.14.0002 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 150.000.000 | | 80.000.000 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (3) | (5) | (6) | (8) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (13) | (14) | (15) |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah | Laporan | 12 | 150.000.000 | 12 | 80.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.14.0003 | | | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengelolaan hubungan keprotokolan | Laporan | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda | % | 100 | 180.615.947.000 | 100 | 159.824.981.000 | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 108.516.013.000 | | 87.886.332.000 | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Laporan | 12 | 108.516.013.000 | 12 | 87.886.332.000 | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 106.601.013.000 | | 85.604.123.000 | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Bulan | 12 | 106.601.013.000 | 12 | 85.604.123.000 | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1.540.000.000 | | 1.900.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 1.540.000.000 | 12 | 1.900.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 300.000.000 | | 307.209.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 12 | 300.000.000 | 12 | 307.209.000 | |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 12 | 75.000.000 | 12 | 75.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 742.000.000 | | 577.500.000 | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | 12 | 742.000.000 | 12 | 577.500.000 | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 442.000.000 | | 375.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 12 | 442.000.000 | 12 | 375.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 300.000.000 | | 202.500.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | 12 | 300.000.000 | 12 | 202.500.000 | |
| | | X.XX.01.1.04 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah | Laporan | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (3) | (5) | (6) | (8) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (13) | (14) | (15) |
| | | X.XX.01.1.04.0007 | | | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah | Laporan | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 7.418.996.000 | | 7.573.155.000 | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda | % | 100 | 7.418.996.000 | 100 | 7.573.155.000 | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 352.437.000 | | 402.437.000 | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 352.437.000 | 12 | 402.437.000 | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 500.718.000 | | 500.718.000 | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 500.718.000 | 12 | 500.718.000 | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 425.000.000 | | 425.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 12 | 425.000.000 | 12 | 425.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 120.000.000 | | 120.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 12 | 120.000.000 | 12 | 120.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 150.000.000 | | 225.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | 150.000.000 | 12 | 225.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 4.241.605.000 | | 4.400.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 4.241.605.000 | 12 | 4.400.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1.629.236.000 | | 1.629.236.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 1.629.236.000 | 12 | 1.500.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 3.835.500.000 | | 5.300.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Paket | 2 | 3.835.500.000 | 2 | 5.300.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 810.500.000 | | 300.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 2 | 810.500.000 | 2 | 300.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 3.025.000.000 | | 5.000.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 50 | 3.025.000.000 | 50 | 5.000.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | - | | - | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan | Unit | | - | | - | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 24.231.213.000 | | 23.561.213.000 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (3) | (5) | (6) | (8) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (13) | (14) | (15) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda | Laporan | 12 | 24.231.213.000 | 12 | 23.561.213.000 | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 7.000.000.000 | | 6.200.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 7.000.000.000 | 12 | 6.200.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 631.213.000 | | 831.213.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 631.213.000 | 12 | 831.213.000 | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 16.600.000.000 | | 16.530.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 16.100.000.000 | 12 | 16.000.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Penilaian pelayanan Biro umum | Laporan | 4 | 200.000.000 | 4 | 200.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah | Laporan | 2 | 300.000.000 | 2 | 330.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 7.858.908.000 | | 7.775.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 833 | 7.858.908.000 | 833 | 7.775.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 4 | 250.000.000 | 4 | 250.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 1.975.000.000 | | 2.000.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 182 | 1.975.000.000 | 182 | 2.000.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 87.500.000 | | 62.500.000 | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 30 | 87.500.000 | 30 | 62.500.000 | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 1.400.000.000 | | 1.250.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 300 | 1.400.000.000 | 300 | 1.250.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 3.833.908.000 | | 3.800.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 17 | 3.833.908.000 | 17 | 3.800.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 312.500.000 | | 412.500.000 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | |
| (1) | (3) | (5) | (6) | (8) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (13) | (14) | (15) |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 300 | 312.500.000 | 300 | 412.500.000 | |
| | | X.XX.01.1.11 | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | 27.993.317.000 | | 27.131.781.000 | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda | % | 100 | 27.993.317.000 | 100 | 27.131.781.000 | |
| | | X.XX.01.1.11.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 243.094.000 | | 266.011.000 | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah | Orang | 2 | 243.094.000 | 2 | 266.011.000 | |
| | | X.XX.01.1.11.0004 | | | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 27.750.223.000 | | 26.865.770.000 | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah | Orang | 2 | 27.750.223.000 | 2 | 26.865.770.000 | |
| | **Meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah** | | | | | | | | **190.000.000** | | **250.000.000** | **ASISTEN ADMINISTRASI** |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3 | 190.000.000 | 3 | 250.000.000 | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 190.000.000 | | 250.000.000 | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 90 | 190.000.000 | 90 | 250.000.000 | BIRO ADM. BANGDA |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 190.000.000 | | 250.000.000 | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 190.000.000 | 100 | 250.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 110.000.000 | | 150.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah | Dokumen | 6 | 110.000.000 | 6 | 150.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 80.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah | Laporan | 8 | 80.000.000 | 8 | 100.000.000 | |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **641.689.945.000** | | **557.982.355.000** | |

## 4.2. Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Manajemen resiko merupakan proses pengelolaan terhadap resiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi resiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renja Sekretaris Daerah dilakukan pada konteks operasional. Untuk level operasional Sekretaris Daerah dilakukan proses manajemen risiko program dan kegiatan yang hasilnya seperti pada tabel 4.2 berikut:

**Tabel 4.2**
**Rencana Tindak Pengendalian**

| Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD | Pernyataan Resiko | Skala Risiko | Sebab | Dampak | Rencana Tindak Pengendalian | Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **BIRO PEMOTDAKER** | | | | | | | | |
| Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang pemerintahan, kerjasama dan otonomi daerah | Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti | Adanya aduan masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban umum | 12 | Rekomendasi kebijakan kurang mengakomodir permasalahan di lapangan | Menghambat proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat | Mengadakan rapat koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kab./Kota | Kepala Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama | 1 tahun |
| Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang pemerintahan, kerjasama dan otonomi daerah | Persentase tertib administrasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Ketidakpatuhan Kab/Kota terhadap administrasi penataan urusan | 12 | Kurangnya pemahaman Kab/Kota terhadap Peraturan yang berlaku | Proses penyelenggaraan pemerintah terhambat | (1) Mengadakan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kab/Kota<br>(2) Penertiban pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai kewenangan | Kepala Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama | 1 tahun |

| Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD | Pernyataan Resiko | Skala Risiko | Sebab | Dampak | Rencana Tindak Pengendalian | Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BIRO HUKUM** | | | | | | | | |
| Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah | Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan | Perencanaan penyusunan produk hukum belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan perundang undangan | 12 | Kajian penyusunan produk hukum belum dilakukan secara optimal dan melibatkan pemangku kepentingan terkait | Produk Hukum Daerah tidak terimplementasi secara efektif | (1) Monitoring terhadap produk hukum<br>(2) Analisis dan evaluasi produk hukum<br>(3) Penyusunan produk hukum sesuai hasil evaluasi | Kepala Biro Hukum | 1 tahun |
| Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah | Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani | Tidak tertanganinya permasalahan hukum di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | 12 | Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan permasalahan hukum di Jawa Tengah | Ketidakpastian hukum terhadap permasalahan hukum yang ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | (1) Melaksanakan koordinasi dengan instansi yang berkepentingan (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, APH maupun masyarakat)<br>(2) Melaksanakan pengkajian dan pemetaan terkait permasalahan hukum<br>(3) Melaksanakan fasilitasi penyelesaian aduan masyarakat baik secara langsung (mediasi dan koordinasi) dan secara bersurat (surat tanggapan)<br>(4) Melaksanakan negosiasi guna penyelesaian sengketa aset antara Pemerintah dengan Masyarakat<br>(5) Penyusunan dokumen pengadilan dalam rangka penanganan permasalahan hukum di Peradilan | Kepala Biro Hukum | 1 tahun |

| Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD | Pernyataan Resiko | Skala Risiko | Sebab | Dampak | Rencana Tindak Pengendalian | Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah | Persentase rancangan produk hukum yang kabupaten/kota yang dikaji | Ketidaksesuaian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya | 12 | Ketidaksesuaian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya | Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota tidak terimplementasi secara efektif | (1) Penyusunan surat rekomendasi hasil fasilitasi dan evaluasi rancangan produk hukum Kab/Kota<br>(2) Pembinaan dan pengawasan rancangan produk hukum sesuai hasil rekomendasi | Kepala Biro Hukum | 1 tahun |
| Meningkatkan kualitas dan efektifitas produk hukum daerah Kabupaten/Kota | Persentase rancangan produk hukum yang kabupaten/kota yang dikaji | Ketidaksesuaian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya | 16 | Ketidaksesuaian substansi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya | Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota tidak terimplementasi secara efektif | (1) Penyusunan surat rekomendasi hasil fasilitasi dan evaluasi rancangan produk hukum Kab/Kota<br>(2) Pembinaan dan pengawasan rancangan produk hukum sesuai hasil rekomendasi | Kepala Biro Hukum | 1 tahun |

| Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD | Pernyataan Resiko | Skala Risiko | Sebab | Dampak | Rencana Tindak Pengendalian | Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah Biro Hukum | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Hukum | Masih banyaknya pelaku usaha rokok yang belum diberdayakan | 12 | Belum adanya dukungan dana yang maksimal | Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota tidak terimplementasi secara efektif | Fasilitasi dalam perijinan | Kepala Biro Hukum | 1 tahun |
| **BIRO KESRA** | | | | | | | | |
| Meningkatnya efektivitas pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik | Pemenuhan persyaratan pencairan dana hibah membutuhkan waktu lama. | 12 | Verifikasi proposal membutuhkan waktu karena masih dilakukan secara manual | Tidak terfasilitasinya sarana dan prasarana keagamaan karena persyaratan yang tidak lengkap | (1) Pembuatan aplikasi proposal Dana Hibah<br>(2) Sosialisasi mekanisme pengelolaan hibah<br>(3) Bintek pengelolaan aplikasi | Kepala Biro Kesra | 1 tahun |
| Meningkatnya kualitas Pembinaan Mental Spiritual | Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku | Pemenuhan persyaratan dana hibah membutuhkan waktu yang lama | 12 | Verifikasi masih dilakukan secara manual | Tidak terfasilitasinya sarana dan prasarana keagamaan | (1) Pembuatan aplikasi proposal Dana Hibah<br>(2) Sosialisasi mekanisme pengelolaan hibah<br>(3) Bintek pengelolaan aplikasi | Kepala Biro Kesra | 1 tahun |
| **BIRO PEREKONOMIAN** | | | | | | | | |
| Meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan perekonomian mikro | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan | Kualitas data kurang valid | 12 | kurangnya kualitas data dan informasi dari stakeholder | Rekomendasi Kebijakan kurang sesuai dengan kebutuhan penyelesaian masalah | (1) Melaksanakan Koordinasi dengan stakeholder terkait dan penyedia data<br>(2) Pengumpulan dan validasi data | Kepala Biro Perekonomian | 1 tahun |

| Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD | Pernyataan Resiko | Skala Risiko | Sebab | Dampak | Rencana Tindak Pengendalian | Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan perekonomian makro | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan | Kualitas data kurang valid | 12 | kurangnya kualitas data dan informasi dari stakeholder | Rekomendasi Kebijakan kurang sesuai dengan kebutuhan penyelesaian masalah | (1) Melaksanakan Koordinasi dengan stakeholder terkait dan penyedia data<br>(2) Pengumpulan dan validasi data | Kepala Biro Perekonomian | 1 tahun |
| Meningkatkan Capaian Kinerja BUMD Jasa Keuangan | Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan | Adanya fraud (penyalahgunaan keuangan) yang terjadi di BUMD | 16 | GCG belum sepenuhnya dilaksanakan | Adanya kerugian perusahaan yang dapat berdampak pada turunnya laba. | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan GCG untuk seluruh BUMD | Kepala Biro Perekonomian | 1 tahun |
| Meningkatkan Capaian Kinerja BUMD Jasa Aneka Usaha | Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha | Kurang maksimalnya ketercapaian laba dari BUMD | 12 | Pelaksanaan GCG dan roadmap penyertaan modal belum optimal | Reputasi Pemerintah Daerah akan menurun di mata masyarakat apabila terjadi Likuidasi | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan GCG untuk seluruh BUMD | Kepala Biro Perekonomian | 1 tahun |
| **BIRO ISDA** | | | | | | | | |
| Meningkatkan kualitas pengelolaan kebijakan dan koordinasi bidang Infrastruktur dan SDA | Persentase capaian kinerja program bidang pertanian | Rekomendasi kebijakan tidak ditindaklanjuti oleh OPD teknis bidang pertanian | 12 | Koordinasi kebijakan bidang pertanian yang belum optimal dalam mensinergikan agenda pemerintah (Kab./Kota, Provinsi dan pusat ) | Rekomendasi Kebijakan tidak bisa mengakomodir penyelesaian masalah di lapangan | (1) Menentukan agenda masalah kebijakan dan formulasi kebijakan penyelesaian dengan melibatkan bersama OPD, Pemerintah Pusat dan stakeholder terkait<br>(2) Melakukan monitoring implementasi kebijakan bidang pertanian | Kepala Biro Infrastruktur dan SDA | 1 tahun |

| Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD | Pernyataan Resiko | Skala Risiko | Sebab | Dampak | Rencana Tindak Pengendalian | Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan kualitas pengelolaan kebijakan dan koordinasi bidang Infrastruktur dan SDA | Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan | Rekomendasi kebijakan tidak ditindaklanjuti oleh OPD teknis bidang lingkungan hidup dan pertambangan | 12 | Koordinasi kebijakan bidang lingkungan hidup dan pertambangan yang belum optimal dalam mensinergikan agenda pemerintah (Kab./Kota, Provinsi dan pusat ) | Rekomendasi Kebijakan tidak bisa mengakomodir penyelesaian masalah di lapangan | (1) Menentukan agenda masalah kebijakan dan formulasi kebijakan penyelesaian dengan melibatkan bersama OPD, Pemerintah Pusat dan stakeholder terkait (2) Melakukan monitoring implementasi kebijakan LH dan Pertambangan | Kepala Biro Infrastruktur dan SDA | 1 tahun |
| Meningkatkan kualitas pengelolaan kebijakan dan koordinasi bidang Infrastruktur dan SDA | Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur | Rekomendasi kebijakan tidak ditindaklanjuti oleh OPD teknis | 12 | Koordinasi kebijakan bidang pertanian yang belum optimal dalam mensinergikan agenda pemerintah (Kab./Kota, Provinsi dan pusat ) | Rekomendasi Kebijakan tidak bisa mengakomodir penyelesaian masalah di lapangan | (1) Menentukan agenda masalah kebijakan dan formulasi kebijakan penyelesaian dengan melibatkan bersama OPD, Pemerintah Pusat dan stakeholder terkait (2) Melakukan monitoring implementasi kebijakan bidang Infrastruktur | Kepala Biro Infrastruktur dan SDA | 1 tahun |

| Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD | Pernyataan Resiko | Skala Risiko | Sebab | Dampak | Rencana Tindak Pengendalian | Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah Biro Isda | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam | Masih banyaknya pelaku usaha rokok yang belum diberdayakan | 12 | Belum adanya dukungan dana yang maksimal | Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota tidak terimplementasi secara efektif | Fasilitasi dalam perijinan | Kepala Biro Isda | 1 tahun |
| **BIRO APBJ** | | | | | | | | |
| Meningkatnya Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa | Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa | Keuangan (realisasi anggaran), dan kinerja (tidak tercapainya output) | 12 | a) terdapat kesalahan dalam proses evaluasi,<br>b) tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan<br>c) tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran,<br>d) ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah, perubahan dan aturan turunannya,<br>e) seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, nepotisme,<br>f) seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat,<br>g) seluruh penawaran harga tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya di atas HPS,<br>h)negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai,<br>i) korupsi, kolusi, nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan / PPK | Pengelolaan Pengadaan Kurang Optimal | (1) Bintek permasalahan Bidang Hukum PBJ<br>(2) Sosialisasi legalitas mekanisme proses pengadaan<br>(3) Pendampingan Penyusunan RUP<br>(4) Review dokumen PBJ | Kepala Biro APBJ | 1 tahun |

| Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD | Pernyataan Resiko | Skala Risiko | Sebab | Dampak | Rencana Tindak Pengendalian | Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BIRO ADM. BANGDA** | | | | | | | | |
| Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang administrasi pembangunan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan | Persentase capaian pelaksanaan APBN | Pelaksanaan kegiatan APBN tidak sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan | 16 | Rencana kegiatan tidak disusun dengan cermat (tidak mempertimbangkan faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan) | Pelaksanaan kegiatan terlambat dan/atau tidak selesai dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran | Pemantauan dan evaluasi progres pelaksanaan kegiatan APBN secara berkala | Kepala Biro Bangda | 1 tahun |
| Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang administrasi pembangunan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan | Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah | Laporan pelaksanaan kegiatan dan kinerja tidak lengkap dan informatif | 12 | Data kurang lengkap dan tidak sesuai dengan kaidah pelaporan | Laporan tidak bisa ditindaklanjuti sebagai bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan | (1) maintanance secara rutin sistem aplikasi yang ada<br>(2) Desk Rekonsiliasi data laporan pelaksanaan APBD<br>(3) Desk Validasi capaian kinerja triwulanan<br>(4) Asistensi dan konsultasi pelaporan kinerja dan pelaksanaan APBD | Kepala Biro Bangda | 1 tahun |

| Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD | Pernyataan Resiko | Skala Risiko | Sebab | Dampak | Rencana Tindak Pengendalian | Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang administrasi pembangunan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan | Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah yang direalisasi | Rekomendasi kebijakan yang disusun tidak relevan dengan kondisi sumber daya yang ada | 16 | Keterbatasan sumber daya dalam menindaklanjuti rekomendasi | Rekomendasi kebijakan yang disusun tidak dapat diterapkan | Pemantauan dan evaluasi progres pelaksanaan rekomendasi kebijakan | Kepala Biro Bangda | 1 tahun |
| Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | Tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan | 10 | Dinamika kondisi di lapangan | Perlu dilakukan penyesuaian dokumen perencanaan dan target | Mapping Biro-Biro lingkup Setda yang masih bermasalah dalam penyajian data kinerja untuk kemudian dilaksanakan monitoring dan evaluasi | Kepala Biro Bangda | 1 tahun |
| Meningkatkan kualitas pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | Laporan evaluasi capaian kinerja tidak lengkap dan informatif | 20 | Kurangnya pemahaman OPD terhadap definisi operasional indikator kinerjanya | Data capaian kinerja yang disajikan tidak sesuai | Mapping OPD yang masih bermasalah dalam penyajian data kinerja untuk kemudian dilaksanakan monitoring dan evaluasi | Analis Kebijakan Ahli Madya | 1 tahun |
| Meningkatkan kualitas pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah | Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap | Ketidakpatuhan user pelaporan bantuan keuangan desa dalam melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan | 12 | Pergantian user pelaporan tidak disertai transfer ilmu antara personil lama dengan yang baru | Data progres pelaksanaan bantuan keuangan desa kurang valid | Memaksimalkan pelaksanaan pendampingan penggunaan aplikasi bantuan keuangan Desa | Analis Kebijakan Ahli Madya | 1 tahun |

| Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD | Pernyataan Resiko | Skala Risiko | Sebab | Dampak | Rencana Tindak Pengendalian | Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan APBD | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN | Anggaran DAK tidak tersalur sesuai tahapannya dari Pusat | 15 | Persyaratan penyaluran DAK tidak terpenuhi | Kegiatan yang anggarannya bersumber dari DAK tidak dapat dilaksanakan/dilanjutkan | Mapping OPD/kegiatan yang masih bermasalah dalam progres pelaksanaan DAK untuk kemudian dilaksanakan pemantauan dan evaluasi | Analis Kebijakan Ahli Muda | 1 tahun |
| **BIRO ORGANISASI** | | | | | | | | |
| Meningkatnya efektivitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Jawa Tengah | Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi | Capaian nilai Tingkat Kematangan Organisasi Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai target | 12 | 1. OPD kurang peduli terhadap pentingnya proses penilaian Kematangan Organisasi Daerah<br>2. Kurangnya pemahaman pejabat pengampu akan variabel penilaian karena terjadinya alih tugas jabatan<br>3. OPD kurang memperhatikan target waktu yang telah ditetapkan | Indeks kematangan Kebijakan prov Jateng tidak optimal | 1. Asistensi tingkat lanjut hasil pengukuran TKOD OPD.<br>2. Penguatan kapasitas sumberdaya pengukuran indeks kematangan kebijakan ( Bimtek anjak, Asistensi Anjak, FGD , penyusunan aplikasi )<br>3. Evaluasi dan Pembinaan OPD dalam rangka peningkatan kualitas kematangan TKOD<br>4. Fasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah<br>5. Monitoring dan evaluasi penataa kelembagaan perangkat daerah | Kepala Biro Organisasi | 1 Tahun |

| Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD | Pernyataan Resiko | Skala Risiko | Sebab | Dampak | Rencana Tindak Pengendalian | Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah | Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A | perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A nilainya dapat menurun | 12 | 1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah belum maksimal.<br>2. Bukti Dukung dalam pelaksanaan PMPRB belum terpenuhi.<br>3. Belum adanya Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah.<br>4. Evaluator yang melaksanakan evaluasi PMPRB Perangkat Daerah belum maksimal dikarenakan belum adanya pedoman/juknis evaluasi.<br>5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum disesuaikan dengan Rencana Kerja RB turunan dari Road Map RB.<br>6. Belum adanya standarisasi dan pedoman dalam pemenuhan bukti dukung PMPRB.<br>7. Perbedaan persepsi antara evaluator dengan perangkat | Nilai Indeks RB Perangkat Daerah rendah. | 1. Pengawalan tindaklanjut hasil verifikasi data dukung PMPRB OPD<br>2. Validasi PMPRB OPD<br>3. Pendampingan tindaklanjut hasil validasi PMPRB OPD<br>4. Pembinaan implementasi core values ASN BerAKHLAK di OPD | Kepala Biro Organisasi | 1 tahun |
| Meningkatnya efektivitas pelaksanaan ketatalaksanan dan pelayanan publik di Jawa Tengah | Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan | Nilai kepatuhan standar pelayanan publik dan indeks kualitas pelayanan publik tidak tercapai | 12 | 1. Kurangnya pemahaman UPP terhadap pentingnya Standar Pelayanan.<br>2. Masih kurangnya pendampingan dan monitoring kepada UPP terkait Standar Pelayanan,<br>3. Tidak adanya sanksi yang tegas bagi UPP yang tidak menyusun dan mengimplementasikan Standar Pelayanan | 1. Kualitas pelayanan publik belum optimal<br>2. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayan publik rendah | 1. Sosialisasi Standar Pelayanan kepada UPP di Jawa Tengah<br>2. Fasilitasi/Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanann di UPP<br>3. Reviu Standar Pelayanan di UPP<br>4. Monitoring dan Evaluasi implementasi kepatuhan Standar Pelayanan di UPP | Kepala Biro Organisasi | 1 tahun |

| Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD | Pernyataan Resiko | Skala Risiko | Sebab | Dampak | Rencana Tindak Pengendalian | Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya efektifitas pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi Kab/Kota | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD | perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A nilainya dapat menurun | 12 | 1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah belum maksimal.<br>2. Bukti Dukung dalam pelaksanaan PMPRB belum terpenuhi.<br>3. Belum adanya Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah.<br>4. Evaluator yang melaksanakan evaluasi PMPRB Perangkat Daerah belum maksimal dikarenakan belum adanya pedoman/juknis evaluasi.<br>5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum disesuaikan dengan Rencana Kerja RB turunan dari Road Map RB.<br>6. Belum adanya standarisasi dan pedoman dalam pemenuhan bukti dukung PMPRB. | Nilai Indeks RB Perangkat Daerah rendah. | 1. Pengawalan tindaklanjut hasil verifikasi data dukung PMPRB OPD<br>2. Validasi PMPRB OPD<br>3. Pendampingan tindaklanjut hasil validasi PMPRB OPD<br>4. Pembinaan implementasi core values ASN BerAKHLAK di OPD | Kepala Biro Organisasi | 1 tahun |
| Meningkatnya efektifitas pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi Kab/Kota | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik | Nilai kepatuhan standar pelayanan publik dan indeks kualitas pelayanan publik tidak tercapai | 12 | 1. Kurangnya pemahaman UPP terhadap pentingnya Standar Pelayanan.<br>2. Masih kurangnya pendampingan dan monitoring kepada UPP terkait Standar Pelayanan,<br>3. Tidak adanya sanksi yang tegas bagi UPP yang tidak menyusun dan mengimplementasikan Standar Pelayanan | 1. Kualitas pelayanan publik belum optimal<br>2. Tingkat Kepuasan Msyarakat terhadap pelayanan publik rendah | 1. Sosialisasi Standar Pelayanan kepada UPP di Jawa Tengah<br>2. Fasilitasi/Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanann di UPP<br>3. Reviu Standar Pelayanan di UPP<br>4. Monitoring dan Evaluasi implementasi kepatuhan Standar Pelayanan di UPP | Kepala Biro Organisasi | 1 tahun |

| Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD | Pernyataan Resiko | Skala Risiko | Sebab | Dampak | Rencana Tindak Pengendalian | Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BIRO UMUM** | | | | | | | | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian Rumah Tangga Setda | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda | Terjadinya pelayanan pimpinan dan masyarakat yang tidak maksimal karena keterbatasan peralatan pendukung kegiatan yang memadai | 12 | Banyak sarana dan prasarana yang sudah tidak representatif dikarenakan usia dan waktu pemakaian | Pelayanan yang tidak maksimal kepada pimpinan dan masyarakat yang rentan terjadi kendala pada saat pelaksanaan kegiatan | Akan dilakukan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan secara bertahap dan pemeliharaan secara berkala | Kepala Biro Umum | 1 tahun |
| Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Terjadinya pelayanan masyarakat yang tidak maksimal karena keterbatasan anggaran pemeliharaan peralatan pendukung kegiatan | 12 | Banyak sarana dan prasarana yang sudah tdak laik pakai dikarenakan usia dan waktu pemakaian | Pelayanan yang tidak maksimal kepada masyarakat dan rentan terjadi kendala pada saat pelaksanaan kegiatan | Akan dilakukan pemeliharaan barang secara berkala | Kepala Biro Umum | 1 tahun |

# BAB V
# PENUTUP

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 merupakan rangkaian proses perencanaan tahun pertama pencapaian Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026, penjabaran RKPD tahun 2024, dan pelaksanaan tahun pertama RPD Tahun 2024-2026. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 mengikuti prinsip *money follows program* dan berorientasi pada pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Hasil capaian pembangunan diharapkan mampu memberikan kebermanfaatan langsung kepada masyarakat secara adil dan merata.

Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dijabarkan ke dalam RKA sebagai perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan dan menjamin pencapaian target–target kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Oleh karena itu, ketersediaan anggaran menjadi hal yang penting agar target-target pembangunan dapat tercapai secara efektif dan akuntabel. Dalam hal ketersediaan anggaran apabila tidak mencukupi, maka biro-biro lingkup Setda perlu menentukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dicapai. Inovasi pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi guna efisiensi pemanfaatan anggaran. Pencapaian target-target kinerja tahun 2024 diharapkan menjadi titik tolak pencapaian kinerja Renstra dan RPD 2024-2026.

**Lampiran 1**
**Identifikasi Resiko**

| No | Jenis Konteks Resiko | Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja | Risiko | Kategori Resiko | Sebab | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Uraian | Pihak yang terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **BIEO PEMOTDAKER** | | | | | | | | |
| 1 | Sasaran Program | Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang pemerintahan, kerjasama dan otonomi daerah | Efektivitas Kerjasama Daerah | Kerjasama antar daerah tidak berbasis potensi unggulan daerah | Risiko Strategis | belum adanya pemetaan potensi kerjasama daerah | Kurang optimalnya pelaksanaan kerjasama daerah di Provinsi Jawa Tengah | Masyarakat lingkup Prov.Jateng |
| 2 | Sasaran Program | Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang pemerintahan, kerjasama dan otonomi daerah | Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti | Adanya aduan masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban umum | Risiko Strategis | Rekomendasi kebijakan kurang mengakomodir permasalahan di lapangan | Menghambat proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat | Masyarakat lingkup Prov.Jateng |
| 3 | Sasaran Program | Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang pemerintahan, kerjasama dan otonomi daerah | Persentase tertib administrasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Ketidakpatuhan Kab/Kota terhadap administrasi penataan urusan | Risiko Strategis | Kurangnya pemahaman Kab/Kota terhadap Peraturan yang berlaku | Proses penyelenggaraan pemerintah terhambat | Masyarakat lingkup Prov.Jateng |
| 4 | Sasaran Program | Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang pemerintahan, kerjasama dan otonomi daerah | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan | Keterlambatan penyusunan laporan keuangan | Risiko Operasional | Kurangnya data dukung pada laporan keuangan | Terhambatnya operasional kegiatan | Pegawai lingkup Biro Pem Otda Kerjasama |

| No | Jenis Konteks Resiko | Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja | Risiko | Kategori Resiko | Sebab | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Uraian | Pihak yang terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra | adanya informasi yang tidak tersampaikan | Risiko Operasional | Keterbatasan SDM | Terhambatnya proses pelayanan jasa surat | Pegawai lingkup Biro Pem Otda Kerjasama |
| 6 | Sasaran Kegiatan | Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan kerjasama antar pemerintah, Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta. | Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti | Perbedaan regulasi antara Pemerintah dengan Badan Usaha/Swasta | Risiko Kemitraan | Dinamika peraturan Pemerintah Indonesia | terhambatnya implementasi kerjasama | Pemda |
| 7 | Sasaran Kegiatan | Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan kerjasama antar pemerintah, Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta. | Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti | Perbedaan regulasi antar Negara | Risiko Kemitraan | Dinamika peraturan Pemerintah Indonesia | terhambatnya pelaksanaan fasilitasi kerjasama | pemda |
| 8 | Sasaran Kegiatan | Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan kerjasama antar pemerintah, Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta. | Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah | Perjanjian Kerjasama (PKS) tidak berjalan sesuai kesepakatan | Risiko Kemitraan | Belum semua Kab/kota melaksanakan Urusan Pemerintahan sesuai kewenangan | Pergantian SDM yang menangani kerjasama | Pemda |
| 9 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya Kualitas Tertib Administrasi KDH dan DPRD | Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD | SK Gubernur terkait administrasi KDH dan DPRD tidak selesai tepat waktu | Risiko strategis | Terbatasnya waktu proses administrasi dan panjangnya proses birokrasi | Tertundanya dokumen administrasi | Pemprov |

| No | Jenis Konteks Resiko | Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja | Risiko | Kategori Resiko | Sebab | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Uraian | Pihak yang terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya Kualitas Tertib Administrasi KDH dan DPRD | Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM | Pelaporan penerapan SPM belum sesuai dengan permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM | Risiko operasional | Terbitnya regulasi baru sehingga belum dapat terakomodir dalam RPJMD | belum semua urusan wajib pelayanan dasar (SPM) teranggarkan dalam dokumen perencanaan | OPD Pengampu SPM dan BAPPEDA |
| 11 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya Kualitas Tertib Administrasi KDH dan DPRD | Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | Keterlambatan penyampaian data dukung LPPD Provinsi Jawa Tengah | Risiko strategis | Waktu release data dukung LPPD tidak sesuai dengan Surat Edaran Penyampaian data Dukung LPPD Prov. Jateng | Penyusunan dokumen LPPD tidak tepat waktu | Pemprov |
| 12 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya Kualitas rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan umum | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ | adanya tuntutan hukum terhadap keputusan gubernur | Risiko Strategis | Rekomendasi kebijakan kurang mengakomodir permasalahan di lapangan | Menghambat proses pembangunan Proyek Nasional dan/atau Daerah | pemda dan masyarakat |
| 13 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya Kualitas rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan umum | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ | adanya tuntutan hukum terhadap keputusan gubernur | Risiko Operasional | Lokasi sulit dijangkau, kendala cuaca | Batas Daerah di Lokasi tersebut tidak jelas | Pemprov, Pemerintah Kab./Kota dan masyarakat |
| **BIRO HUKUM** | | | | | | | | |
| 1 | Sasaran Program | Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah | Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan | Perencanaan penyusunan produk hukum belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan perundang undangan | Resiko Strategis | Kajian penyusunan produk hukum belum dilakukan secara optimal dan melibatkan pemangku kepentingan terkait | Produk Hukum Daerah tidak terimplementasi secara efektif | Pemprov., OPD Pemprov, Pem. Kab/Kota dan masyarakat |

| No | Jenis Konteks Resiko | Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja | Risiko | Kategori Resiko | Sebab | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Uraian | Pihak yang terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Sasaran Program | Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah | Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani | Tidak tertanganinya permasalahan hukum di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | Risiko Operasional | Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan permasalahan hukum di Jawa Tengah | Ketidakpastian hukum terhadap permasalahan hukum yang ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | OPD Pemrov dan masyarakat |
| 3 | Sasaran Program | Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah | Persentase rancangan produk hukum yang kabupaten/kota yang dikaji | Ketidaksesuaian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya | Risiko Kepatuhan | Ketidaksesuaian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya | Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota tidak terimplementasi secara efektif | OPD Kab/Kota dan masyarakat |
| 4 | Sasaran Kegiatan | Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah | Persentase kabupaten/kota peduli HAM | Tidak tercatatnya aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada di daerah | Risiko Operasional | Pengamanan aset oleh pembantu pengelola barang milik daerah dan pengguna barang milik daerah kurang maksimal | Hilangnya aset Pemerintah Provinsi Jateng di daerah yang bermula dari pemanfaatan liar oleh orang yang tidak bertanggungjawab | Masyarakat dan Pemerintah Daerah |

| No | Jenis Konteks Resiko | Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja | Risiko | Kategori Resiko | Sebab | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Uraian | Pihak yang terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | Sasaran Program | Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum | Keterlambatan penyusunan laporan keuangan | Risiko Operasional | Kurangnya data dukung pada laporan keuangan | Terhambatnya operasional kegiatan | Pegawai lingkup Biro Hukum |
| 6 | Sasaran Kegiatan | Meningkatkan kualitas rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 'Ketidaksesuaian Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya. | Resiko Operasional | Organisasi Perangkat Daerah pemrakarsa rancangan Peraturan Daerah kurang tanggap dengan peraturan perundang-undangan sektor lain dan terbaru namun hanya mengetahui substansi peraturan perundang-undangan sektornya | Ditetapkannya Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum | Masyarakat dan Pemerintah Daerah |

| No | Jenis Konteks Resiko | Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja | Risiko | Kategori Resiko | Sebab | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Uraian | Pihak yang terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | Sasaran Kegiatan | Meningkatkan kualitas rancangan Keputusan Gubernur | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur | Ketidaksesuaian Keputusan Gubernur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya | Risiko Operasional | Organisasi Perangkat Daerah pemrakarsa Keputusan Gubernur kurang tanggap dengan peraturan perundang-undangan sektor lain dan terbaru namun hanya mengetahui substansi peraturan perundang-undangan sektornya | Ditetapkannya Keputusan Gubernur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum | Masyarakat dan Pemerintah Daerah |
| 8 | Sasaran Kegiatan | Meningkatkan kualitas dokumen kajian produk hukum | Jumlah dokumen kajian produk hukum | Ketidaksesuaian kajian produk Hukum dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya | Risiko Operasional | Organisasi Perangkat Daerah pemrakarsa dalam kajian produk hukum kurang tanggap dengan peraturan perundang-undangan sektor lain dan terbaru namun hanya mengetahui substansi peraturan perundang-undangan sektornya | Ditetapkannya kajian produk hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum | Masyarakat dan Pemerintah Daerah |

| No | Jenis Konteks Resiko | Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja | Risiko | Kategori Resiko | Sebab | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Uraian | Pihak yang terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | Sasaran Kegiatan | Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengkajian produk hukum kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum serta dokumen klarifikasi produk hukum Daerah Kabupaten/Kota | Ketidaksesuaian Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah/ Peraturan DPRD Kabupaten/ Kota dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan sehingga menimbulkan permasalahan | Risiko Operasional | Pemerintah Kabupaten/Kota tidak menyampaikan Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah/ Peraturan DPRD Kabupaten/ Kota yang telah ditetapkan | Terdapat Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum | Masyarakat dan Pemerintah Daerah |
| 10 | Sasaran Kegiatan | Meningkatkan kualitas penanganan bantuan hukum dan penyelesaian perkara perdata TUN | Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara | Tidak tertanganinya perkara Perdata/Tata Usaha Negara yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan baik | Risiko Operasional | Kurangnya jumlah SDM yang memahami mekanisme penanganan perkara Perdata/Tata Usaha Negara | Kalahnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam sengketa perkara Perdata/Tata Usaha Negara | Masyarakat dan Pemerintah Daerah |
| 11 | Sasaran Kegiatan | Meningkatkan kualitas penanganan bantuan hukum dan penyelesaian perkara perdata TUN | Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara | Tidak tertanganinya perkara masyarakat miskin dengan baik | Risiko Operasional | Kurangnya anggaran dan jumlah Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi untuk bekerjasama dengan Pemprov Jateng dalam penanganan masyarakat miskin | Tidak terpenuhinya hak masyarakat miskin untuk mendapatkan perlindungan hukum | Masyarakat dan Pemerintah Daerah |

| No | Jenis Konteks Resiko | Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja | Risiko | Kategori Resiko | Sebab | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Uraian | Pihak yang terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | Sasaran Kegiatan | Meningkatkan kualitas penanganan penyelesaian sengketa hukum Provinsi Jawa Tengah | Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | Tidak tercatatnya aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada di daerah | Risiko Operasional | Pengamanan aset oleh pembantu pengelola barang milik daerah dan pengguna barang milik daerah kurang maksimal | Hilangnya aset Pemerintah Provinsi Jateng di daerah yang bermula dari pemanfaatan liar oleh orang yang tidak bertanggungjawab | Masyarakat dan Pemerintah Daerah |
| 13 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah Biro Hukum | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Hukum | Masih banyaknya pelaku usaha rokok yang belum diberdayakan | Risiko Hukum | Belum adanya dukungan dana yang maksimal | Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota tidak terimplementasi secara efektif | Adanya rokok ilegal |
| 14 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Biro Hukum | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum | adanya informasi yang tidak tersampaikan | Risiko Operasional | Keterbatasan SDM | Terhambatnya proses pelayanan jasa surat | Pegawai lingkup Biro Hukum |
| **BIRO KESRA** | | | | | | | | |
| 1 | Sasaran Program | Meningkatnya efektivitas pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar | Belum optimalnya sinergi dan efektifitas pencapaian kinerja kebijakan Bidang Kesra pelayanan dasar | Risiko Operasional | Belum optimalnya koordinasi dengan SKPD ampuan dan sinergi kebijakan antara Provinsi dengan Pusat dan Kab/Kota | Target Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesra pelayanan dasar tidak terpenuhi dan umpan balik perencanaan tidak maksimal | Biro Kesejahteraan Rakyat |

| No | Jenis Konteks Resiko | Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja | Risiko | Kategori Resiko | Sebab | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Uraian | Pihak yang terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Sasaran Program | Meningkatnya efektivitas pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan non dasar | Belum optimalnya sinergi dan efektifitas pencapaian kinerja kebijakan bidang kesra non pelayanan dasar | Risiko Operasional | Belum optimalnya koordinasi dengan SKPD ampuan dan sinergi kebijakan antara Provinsi dengan Pusat dan Kab/Kota | Target Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Non pelayanan dasar tidak terpenuhi dan umpan balik perencanaan tidak maksimal | Biro Kesejahteraan Rakyat |
| 3 | Sasaran Program | Meningkatnya efektivitas pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik | Pemenuhan persyaratan pencairan dana hibah membutuhkan waktu lama. | Risiko Kepatuhan | Verifikasi proposal membutuhkan waktu karena masih dilakukan secara manual | Tidak terfasilitasinya sarana dan prasarana keagamaan karena persyaratan yang tidak lengkap | Masyarakat |
| 4 | Sasaran Program | Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesra | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat | Keterlambatan penyusunan laporan keuangan | Risiko Operasional | Kurangnya data dukung pada laporan keuangan | Terhambatnya operasional kegiatan | Pegawai lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat |
| 5 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakyat | adanya informasi yang tidak tersampaikan | Risiko Operasional | Keterbatasan SDM | Terhambatnya proses pelayanan jasa surat | Pegawai lingkup Biro Kesra |
| 6 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya kualitas Pembinaan Mental Spiritual | Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku | Pemenuhan persyaratan dana hibah membutuhkan waktu yang lama | Risiko Kepatuhan | Verifikasi masih dilakukan secara manual | Tidak terfasilitasinya sarana dan prasarana keagamaan | Masyarakat |
| 7 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya kualitas Pembinaan Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan | Kurangnya sinergisitas Pemahaman calon petugas haji daerah | Risiko Operasional | Kurang koordinasi pelaksanaan ibadah haji dengan Kab./Kota | Pelaksanaan Ibadah haji tidak berjalan dengan baik | Masyarakat |

| No | Jenis Konteks Resiko | Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja | Risiko | Kategori Resiko | Sebab | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Uraian | Pihak yang terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya kualitas fasilitasi perumusan kebijakan Non Pelayanan Dasar | Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan | Tidak didapatkannya data dan informasi yang relevan serta terintegrasi dengan OPD ampuan dalam pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan | Risiko Operasional | Belum optimalnya koordinasi dengan SKPD ampuan dan sinergi kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan | Target capaian kinerja perangkat daerah Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan tidak terpenuhi | OPD ampuan |
| 9 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya kualitas fasilitasi perumusan kebijakan Non Pelayanan Dasar | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Tidak didapatkannya data dan informasi yang relevan serta terintegrasi dengan OPD ampuan dalam pelaksanaan Kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Risiko Operasional | Belum optimalnya koordinasi dengan SKPD ampuan dan sinergi kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Target capaian kinerja perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak terpenuhi | OPD ampuan |

| No | Jenis Konteks Resiko | Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja | Risiko | Kategori Resiko | Sebab | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Uraian | Pihak yang terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya kualitas fasilitasi perumusan kebijakan Non Pelayanan Dasar | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan administrasi Kependudukan | Tidak didapatkannya data dan informasi yang relevan serta terintegrasi dengan OPD ampuan dalam pelaksanaan Kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan administrasi Kependudukan | Risiko Operasional | Belum optimalnya koordinasi dengan SKPD ampuan dan sinergi kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan administrasi Kependudukan | Target capaian kinerja perangkat daerah bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan administrasi Kependudukan tidak terpenuhi | OPD ampuan |
| 11 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya kualitas fasilitasi perumusan kebijakan Pelayanan Dasar | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan | Tidak didapatkannya data dan informasi yang relevan serta terintegrasi dengan OPD ampuan dalam pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan | Risiko Operasional | Belum optimalnya koordinasi dengan SKPD ampuan dan sinergi kebijakan Bidang Pendidikan | Target capaian kinerja perangkat daerah bidang pendidikan tidak terpenuhi | OPD ampuan |
| 12 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya kualitas fasilitasi perumusan kebijakan Pelayanan Dasar | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan | Tidak didapatkannya data dan informasi yang relevan serta terintegrasi dengan OPD ampuan dalam pelaksanaan Kebijakan bidang Kesehatan | Risiko Operasional | Belum optimalnya koordinasi dengan SKPD ampuan dan sinergi kebijakan bidang Kesehatan | Target capaian kinerja perangkat daerah bidang Kesehatan tidak terpenuhi | OPD ampuan |

| No | Jenis Konteks Resiko | Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja | Risiko | Kategori Resiko | Sebab | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Uraian | Pihak yang terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya kualitas fasilitasi perumusan kebijakan Pelayanan Dasar | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial | Tidak didapatkannya data dan informasi yang relevan serta terintegrasi dengan OPD ampuan dalam pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial | Risiko Operasional | Belum optimalnya koordinasi dengan SKPD ampuan dan sinergi kebijakan Bidang Sosial | Target capaian kinerja perangkat daerah Bidang Sosial tidak terpenuhi | OPD ampuan |
| **BIRO PEREKONOMIAN** | | | | | | | | |
| 1 | Sasaran Program | Meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan perekonomian mikro | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan | Kualitas data kurang valid | Risiko Operasional | kurangnya kualitas data dan informasi dari stakeholder | Rekomendasi Kebijakan kurang sesuai dengan kebutuhan penyelesaian masalah | SKPD terkait dan masyarakat |
| 2 | Sasaran Program | Meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan perekonomian makro | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan | Kualitas data kurang valid | Risiko Operasional | kurangnya kualitas data dan informasi dari stakeholder | Rekomendasi Kebijakan kurang sesuai dengan kebutuhan penyelesaian masalah | SKPD terkait dan masyarakat |
| 3 | Sasaran Program | Meningkatkan Capaian Kinerja BUMD Jasa Keuangan | Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan | Adanya fraud (penyalahgunaan keuangan) yang terjadi di BUMD | Risiko Fraud | GCG belum sepenuhnya dilaksanakan | Adanya kerugian perusahaan yang dapat berdampak pada turunnya laba. | Pemerintah dan BUMD |
| 4 | Sasaran Program | Meningkatkan Capaian Kinerja BUMD Jasa Aneka Usaha | Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha | Kurang maksimalnya ketercapaian laba dari BUMD | Risiko Operasional | Pelaksanaan GCG dan roadmap penyertaan modal belum optimal | Reputasi Pemerintah Daerah akan menurun di mata masyarakat apabila terjadi Likuidasi | Pemerintah Daerah dan BUMD |
| 5 | Sasaran Program | Meningkatkan capaian kinerja BLUD | Persentase nilai kemandirian BLUD | Ketidakpuasaan masyarakat terhadap pelayanan umum BLUD | Risiko Operasional | 1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal belum optimal | Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan umum BLUD | Masyarakat dan BLUD |

| No | Jenis Konteks Resiko | Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja | Risiko | Kategori Resiko | Sebab | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Uraian | Pihak yang terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | Sasaran Program | Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian | Keterlambatan penyusunan laporan keuangan | Risiko Operasional | Kurangnya data dukung pada laporan keuangan | Terhambatnya operasional kegiatan | Pegawai lingkup Biro Perekonomian |
| 7 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian | Adanya informasi yang tidak tersampaikan | Risiko operasional | Keterbatasan SDM | Terhambatnya proses pelayanan jasa surat | Pegawai lingkup Biro Perekonomian |
| 8 | Sasaran Kegiatan | Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi Evaluasi kebijakan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan | Review hasil evaluasi kinerja BUMD jasa keuangan belum maksimal | Risiko Operasional | 1. Personil yang kompeten untuk melaksanakan evaluasi kinerja belum dioptimalkan | Pengelolaan dan kinerja BUMD belum sesuai target | Pemegang saham |
| 9 | Sasaran Kegiatan | Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi Evaluasi kebijakan BUMD dan BLUD | Jumlah dokumen rekomendasi pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan | Adanya wanprestasi kerjasama dengan pihak ketiga dalam kegiatan seleksi direksi BUMD | Risiko Operasional | Perjanjian kerjasama antara para pihak hanya menguntungkan salah satu pihak | Terhambatnya pelaksanaan seleksi Direksi BUMD | BUMD dan pemegang saham |
| 10 | Sasaran Kegiatan | Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi Evaluasi kebijakan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi dan kajian Pengembangan BUMD Aneka Usaha | Implementasi atas kebijakan pemegang saham tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh BUMD | Risiko Operasional | Kajian pengembangan bisnis tidak feasible | Harus mencari potensi pengembangan bisnis yang baru | pemegang saham |
| 11 | Sasaran Kegiatan | Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi Evaluasi kebijakan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD | Data hasil evaluasi BLUD tidak valid | Risiko Operasional | Keterbatasan SDM | Rekomendasi kebijakan menjadi kurang relevan dengan kondisi lapangan | BLUD |
| 12 | Sasaran Kegiatan | Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi Evaluasi kebijakan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD | Rekomendasi kebijakan tidak ditindaklanjuti sepenuhnya oleh BLUD | Risiko Operasional | Keterbatasan Sumber Daya di BLUD | Pelayanan BLUD tidak berkembang | Masyarakat, BLUD |

| No | Jenis Konteks Resiko | Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja | Risiko | Kategori Resiko | Sebab | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Uraian | Pihak yang terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | Sasaran Kegiatan | Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan perekonomian | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro | Data investasi, penanaman modal dan pariwisata kurang valid | Risiko Operasional | Sumber daya yang kurang memadai | Rekomendasi kebijakan yang disusun belum merepresentasikan permasalahan di lapangan | Masyarakat |
| 14 | Sasaran Kegiatan | Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan perekonomian | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan | Data transportasi kurang valid | Risiko Operasional | Sumber daya yang kurang memadai | Rekomendasi kebijakan yang disusun belum merepresentasikan permasalahan di lapangan | Masyarakat |
| 15 | Sasaran Kegiatan | Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan perekonomian | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro | Kurang validnya data KUR | Risiko Operasional | 1. Keterbatasan SDM<br>2. Keterbatasan waktu penginputan data | Penyaluran KUR kurang tepat sasaran | Masyarakat |
| 16 | Sasaran Kegiatan | Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan perekonomian | Jumlah dokumen rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan | Kurang validnya data IPH | Risiko Operasional | 1. Keterbatasan SDM<br>2. Keterbatasan waktu penginputan data | Reputasi kinerja tim pengendalian inflasi daerah Kab./Kota dan Provinsi Jateng kurang baik | Tim pengendalian inflasi daerah |
| **BIRO ISDA** | | | | | | | | |
| 1 | Sasaran Program | Meningkatkan kualitas pengelolaan kebijakan dan koordinasi bidang Infrastruktur dan SDA | Persentase capaian kinerja program bidang pertanian | Rekomendasi kebijakan tidak ditindaklanjuti oleh OPD teknis bidang pertanian | Risiko Strategis | Koordinasi kebijakan bidang pertanian yang belum optimal dalam mensinergikan agenda pemerintah (Kab./Kota, Provinsi dan pusat ) | Rekomendasi Kebijakan tidak bisa mengakomodir penyelesaian masalah di lapangan | SKPD terkait dan masyarakat |
| 2 | Sasaran Program | Meningkatkan kualitas pengelolaan kebijakan dan koordinasi bidang Infrastruktur dan SDA | Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan | Rekomendasi kebijakan tidak ditindaklanjuti oleh OPD teknis bidang lingkungan hidup dan pertambangan | Risiko Strategis | Koordinasi kebijakan bidang lingkungan hidup dan pertambangan yang belum optimal dalam mensinergikan agenda pemerintah (Kab./Kota, Provinsi dan pusat ) | Rekomendasi Kebijakan tidak bisa mengakomodir penyelesaian masalah di lapangan | SKPD terkait dan masyarakat |

| No | Jenis Konteks Resiko | Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja | Risiko | Kategori Resiko | Sebab | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Uraian | Pihak yang terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Sasaran Program | Meningkatkan kualitas pengelolaan kebijakan dan koordinasi bidang Infrastruktur dan SDA | Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur | Rekomendasi kebijakan tidak ditindaklanjuti oleh OPD teknis | Risiko Strategis | Koordinasi kebijakan bidang pertanian yang belum optimal dalam mensinergikan agenda pemerintah (Kab./Kota, Provinsi dan pusat ) | Rekomendasi Kebijakan tidak bisa mengakomodir penyelesaian masalah di lapangan | SKPD terkait dan masyarakat |
| 4 | Sasaran Program | Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang | Keterlambatan penyusunan laporan keuangan | Risiko Operasional | Kurangnya data dukung pada laporan keuangan | Terhambatnya operasional kegiatan | Pegawai lingkup Biro ISDA |
| 5 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur dan SDA | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian | Belum adanya data komoditas pertanian berbasis spasial near real time | Risiko Operasional | 1. Belum maksimalnya Input data dalam Aplikasi Panen oleh admin aplikasi panen kecamatan<br>2. Belum optimalnya fungsi KP3 kabupaten/kota | Penentuan kebijakan di bidang pertanian terkait ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga belum bisa ditetapkan secara cepat | Pemerintah provinsi serta kabupaten/kota, Petani |
| 6 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah Biro Isda | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam | Masih banyaknya pelaku usaha rokok yang belum diberdayakan | Risiko Hukum | Belum adanya dukungan dana yang maksimal | Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota tidak terimplementasi secara efektif | Adanya rokok ilegal |

| No | Jenis Konteks Resiko | Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja | Risiko | Kategori Resiko | Sebab | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Uraian | Pihak yang terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur dan SDA | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan | Kegiatan yang berkaitan dengan Komisi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (KP3K) belum bersinergi dengan kegiatan yang ada di Kab/Kota. | Risiko Operasional | 1. Belum terbentuknya Tim KP3K ditingkat Kab/Kota;<br>2. Peningkatan kualitas kebijakan secara teknokratif. | 1. Terkendala terhadap monitoring kebijakan penyuluhan yang berjalan di Kab/Kota;<br>2. Dengan adanya Tim KP3K Jateng dapat meningkatkan kualitas kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi Kab/Kota. | 1. Petani, Nelayan, Peternak<br>2. Pelaku usaha sektor pertanian, perikanan dan kehutanan |
| 8 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur dan SDA | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan | Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir belum bersinergi | Risiko Operasional | Belum Optimalnya sinergitas pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pesisir di Jawa Tengah | 1. Serapan Industri Terhadap Produksi Garam Rakyat Terkendala Kualitas<br>2. Terhambatnya Investasi dan Pembangunan di Kawasan Pesisir dan Pulau pulau kecil<br>3. Belum Optimalnya Kartu Nelayan Untuk Pembelian BBM bersubsidi | Pemerintah Pusat, Provinsi, Kab/Kota |
| 9 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur dan SDA | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Penurunan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Peningkatan Lahan Kritis di Jawa Tengah | Risiko Operasional | Kerusakan Lingkungan Hidup dan DAS ( Daerah Aliran Sungai ) di Jawa Tengah | Terjadinya Bencana Banjir,Longsor, Kekeringan, Erosi dan Sedimentasi di Jawa Tengah | Pemerintah pusat, provinsi, Kab./Kota |

| No | Jenis Konteks Resiko | Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja | Risiko | Kategori Resiko | Sebab | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Uraian | Pihak yang terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur dan SDA | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM | Sinergitas kebijakan konservasi energi tidak dilaksanakan | Risiko Operasional | Pelaksanaan program konservasi energi di Jawa Tengah kurang optimal | Target bauran energi baru terbarukan di Jawa Tengah tidak tercapai | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah |
| 11 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur dan SDA | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, | Kebijakan Pemerintah pusat dan daerah dalam Pelaksanaan PSN Sektor Infrastruktur di Jawa Tengah tidak tersinergi | Risiko Operasional | Belum optimalnya sinergitas Pelaksanaan PSN Sektor Infrastruktur di Jawa Tengah | Pelaksanaan PSN Sektor Infrastruktur di Jawa Tengah tidak sesuai target | Pemerintah pusat, provinsi, Kab./Kota |
| 12 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur dan SDA | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Sinergitas Kebijakan Kawasan Permukiman tidak Optimal | Risiko Operasional | Kurang Optimalnya Penanganan Kawasan Kumuh antar Stakeholder baik Pemerintah Pusat Maupun Daerah | Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Masih Rendah Sesuai dengan Kewenangannya | Masyarakat |
| 13 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Biro Isda dan Asisten Ekbang | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dan Asisten Ekbang | adanya informasi yang tidak tersampaikan | Risiko Operasional | Keterbatasan SDM | Terhambatnya proses pelayanan jasa surat | Pegawai lingkup Biro ISDA |
| **BIRO APBJ** | | | | | | | | |
| 1 | Sasaran Program | Meningkatnya Efektivitas Pengadaan secara Elektronik | Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik | Terjadinya malfunction SPSE | Risiko operasional | a) adanya gangguan dari server<br>b) adanya gangguan dari luar berupa serangan hacker pada SPSE<br>c) kurangnya pemahaman dan perhatian user dalam penggunaan SPSE<br>d) Bug system, karena adanya pengembangan aplikasi | Tertundanya proses pengadaan barang/jasa | 1. Pokja Pemilihan<br>2. SKPD terkait<br>3. Penyedia Barang/Jasa |

| No | Jenis Konteks Resiko | Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja | Risiko | Kategori Resiko | Sebab | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Uraian | Pihak yang terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Sasaran Program | Meningkatnya Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa | Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa | Keuangan (realisasi anggaran), dan kinerja (tidak tercapainya output) | Risiko Kepatuhan | a) terdapat kesalahan dalam proses evaluasi,<br>b) tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan<br>c) tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran,<br>d) ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah, perubahan dan aturan turunannya,<br>e) seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, nepotisme,<br>f) seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat,<br>g) seluruh penawaran harga tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya di atas HPS,<br>h)negosiasi biaya pada seleksi | Pengelolaan Pengadaan Kurang Optimal | 1. Pokja Pemilihan<br>2. SKPD terkait<br>3. Penyedia Barang/Jasa |
| 3 | Sasaran Program | Meningkatnya Persentase Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM Fungsional PPBJ | Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa | Munculnya Aduan dan sengketa hukum bidang pengadaan barang dan jasa | Risiko Reputasi | a) ketidakpuasan Penyedia Barang/Jasa dalam proses pemilihan barang/jasa<br>b) kurangnya kompetensi SDM JF PBJ<br>c) kurangnya pengetahuan PA/KPA dan PPK.<br>d) Adanya benturan kepentingan antara pihak terkait. | Permasalahan yang tidak dapat diselesaikan maka akan berlanjut menjadi persoalan hukum dan berpengaruh terhadap reputasi Biro APBJ | 1. Pokja Pemilihan<br>2. SDM Biro APBJ<br>3. SKPD terkait |

| No | Jenis Konteks Resiko | Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja | Risiko | Kategori Resiko | Sebab | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Uraian | Pihak yang terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Sasaran Program | Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah SDM pendukung terbatas | Risiko Operasional | 1. Rekruitmen pegawai menunggu proses seleksi dari BKD | Menghambat proses pelayanan di Biro APBJ | Biro APBJ |
| 5 | Sasaran Program | Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa | Terhambatnya pelayanan administrasi umum pada Biro APBJ | Risiko Operasional | Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang Administrasi Umum pada Biro APBJ | Pelayananan kurang optimal | Biro APBJ |
| 6 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | Penataan arsip belum sesuai prosedur | Risiko operasional | Keterbatasan Sumber daya | Arsip tidak bisa ditelusuri dengan cepat | Biro APBJ |
| 7 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya kualitas pembinaan sumber daya manusia, pembinaan kelembagaan serta pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa | Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa | Adanya keberatan PPK terhadap hasil proses pemilihan penyedia oleh Pokja | Risiko operasional | Kurangnya pemahaman PA/KPA dan PPK terkait proses tender | Permasalahan dapat berlanjut ke permasalahan hukum | 1. PA/KPA dan PPK<br>2. Penyedia |
| 8 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya kualitas pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa | Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa | Terjadinya kendala sistem pendukung pengadaan barang dan jasa | Risiko Operasional | 1. Adanya gangguan server<br>2. BUG sistem, karena pengembangan aplikasi<br>3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarananya pendukung | Tertundanya proses pengadaan barang dan jasa | 1. Penyedia barang dan jasa<br>2. PPK, KPA, PA<br>3. Biro APBJ |

| No | Jenis Konteks Resiko | Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja | Risiko | Kategori Resiko | Sebab | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Uraian | Pihak yang terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya kualitas pengelolaan strategi, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa | Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa | Tender / Seleksi Gagal | Risiko Kepatuhan | a) terdapat kesalahan dalam proses evaluasi,<br>b) tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan<br>c) tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran,<br>d) ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah, perubahan dan aturan turunannya,<br>e) seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, nepotisme,<br>f) seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat,<br>g) seluruh penawaran harga tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya di atas HPS,<br>h)negosiasi biaya pada seleksi | Kinerja (tidak tercapainya output) | 1. Pokja Pemilihan<br>2. SKPD terkait<br>3. Penyedia Barang/Jasa |
| **BIRO ADM. BANGDA** | | | | | | | | |
| 1 | Sasaran Program | Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang administrasi pembangunan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan | Persentase capaian pelaksanaan APBD | pelaksanaan kegiatan APBD tidak sesuai dengan rencana kerja yang sudah ditetapkan (RKO) | Risiko Operasional | RKO tidak disusun dengan cermat (tidak mempertimbangkan faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan) | Pelaksanaan kegiatan terlambat dan/atau tidak selesai dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran | Masyarakat, Biro Administrasi Pembangunan Daerah, skpd pelaksana |

| No | Jenis Konteks Resiko | Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja | Risiko | Kategori Resiko | Sebab | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Uraian | Pihak yang terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Sasaran Program | Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang administrasi pembangunan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan | Persentase capaian pelaksanaan APBN | Pelaksanaan kegiatan APBN tidak sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan | Risiko Operasional | Rencana kegiatan tidak disusun dengan cermat (tidak mempertimbangkan faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan) | Pelaksanaan kegiatan terlambat dan/atau tidak selesai dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran | Masyarakat, Biro Administrasi Pembangunan Daerah, skpd pelaksana |
| 3 | Sasaran Program | Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang administrasi pembangunan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan | Persentase realisasi bantuan keuangan | Kegiatan yang bersumber dari Bantuan keuangan tidak bisa segera dilaksanakan | Risiko Kepatuhan | Pem Kab/Kota terlambat dalam memenuhi dokumen bantuan keuangan | kegiatan yang dilaksanakan mundur sampai dengan tahun berikutnya dan target tahun berjalan tidak terpenuhi | Masyarakat, Biro Administrasi Pembangunan Daerah, SKPD pelaksana |
| 4 | Sasaran Program | Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang administrasi pembangunan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan | Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah | Laporan pelaksanaan kegiatan dan kinerja tidak lengkap dan informatif | Risiko Operasional | Data kurang lengkap dan tidak sesuai dengan kaidah pelaporan | Laporan tidak bisa ditindaklanjuti sebagai bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan | Biro Administrasi Pembangunan Daerah |
| 5 | Sasaran Program | Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang administrasi pembangunan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan | Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah yang direalisasi | Rekomendasi kebijakan yang disusun tidak relevan dengan kondisi sumber daya yang ada | Risiko Operasional | Keterbatasan sumber daya dalam menindaklanjuti rekomendasi | Rekomendasi kebijakan yang disusun tidak dapat diterapkan | SKPD yang menerima rekomendasi |

| No | Jenis Konteks Resiko | Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja | Risiko | Kategori Resiko | Sebab | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Uraian | Pihak yang terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Bangda | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah | Besaran uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan operasional kegiatan Biro Adm. Bangda | Risiko Operasional | Kurangnya kekuatan revolving pada tahun anggaran sebelumnya | Pelaksanaan kegiatan seluruh Biro terhambat | Biro Administrasi Pembangunan Daerah |
| 7 | Sasaran Program | Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | Tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan | Risiko Operasional | Dinamika kondisi di lapangan | Perlu dilakukan penyesuaian dokumen perencanaan dan target | Biro Administrasi Pembangunan Daerah |
| 8 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Biro Pembangunan Daerah | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah | Pimpinan tidak menghadiri suatu kegiatan/agenda | Risiko Operasional | Surat masuk tidak diinventarisir dengan baik sehingga terjadi kesalahan dalam penyusunan jadwal agenda pimpinan | Reputasi pimpinan menjadi kurang baik | Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah |
| 9 | Sasaran Kegiatan | Meningkatkan kualitas pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah | Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap | Ketidakpatuhan user pelaporan bantuan keuangan desa dalam melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan | Risiko Operasional | Pergantian user pelaporan tidak disertai transfer ilmu antara personil lama dengan yang baru | Data progres pelaksanaan bantuan keuangan desa kurang valid | Biro Administrasi Pembangunan Daerah |
| 10 | Sasaran Kegiatan | Meningkatkan kualitas pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | Laporan evaluasi capaian kinerja tidak lengkap dan informatif | Risiko Operasional | Kurangnya pemahaman OPD terhadap definisi operasional indikator kinerjanya | Data capaian kinerja yang disajikan tidak sesuai | Biro Administrasi Pembangunan Daerah |

| No | Jenis Konteks Resiko | Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja | Risiko | Kategori Resiko | Sebab | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Uraian | Pihak yang terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | Sasaran Kegiatan | Meningkatkan kualitas pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | Pengajuan perubahan sub sub kegiatan yang tidak sesuai ketentuan | Risiko Operasional | Ketidakpatuhan pelaksana kegiatan terhadap ketentuan/kebijakan terkait Pengajuan perubahan sub sub kegiatan (contoh : tidak disertai dengan dasar yang kuat maka tidak direkomendasikan untuk dilakukan perubahan/penyesuaian) | Keterlambatan pelaksanaan sub sub kegiatan | Biro Administrasi Pembangunan Daerah, SKPD pelaksana |
| 12 | Sasaran Kegiatan | Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan APBD | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD | pelaksanaan kegiatan APBD Bidang Ekonomi tidak sesuai dengan rencana kerja yang sudah ditetapkan (RKO) | Risiko Operasional | RKO tidak disusun dengan cermat (tidak mempertimbangkan faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan) | Pelaksanaan kegiatan terlambat dan/atau tidak selesai dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran | Masyarakat, Biro Administrasi Pembangunan Daerah, SKPD pelaksana |
| 13 | Sasaran Kegiatan | Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan APBD | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD | Laporan pelaksanaan kegiatan dan kinerja tidak lengkap dan informatif | Risiko Operasional | RKO tidak disusun dengan cermat (tidak mempertimbangkan faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan) | Pelaksanaan kegiatan terlambat dan/atau tidak selesai dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran | Masyarakat, Biro Administrasi Pembangunan Daerah, SKPD pelaksana |
| 14 | Sasaran Kegiatan | Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan APBD | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN | Anggaran DAK tidak tersalur sesuai tahapannya dari Pusat | Risiko Operasional | Persyaratan penyaluran DAK tidak terpenuhi | Kegiatan yang anggarannya bersumber dari DAK tidak dapat dilaksanakan/dilanjutkan | Masyarakat, Biro Administrasi Pembangunan Daerah, SKPD pelaksana |
| 15 | Sasaran Kegiatan | Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan APBD | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I | Kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan pada kab/kota Wilayah I tidak bisa segera dilaksanakan | Risiko Operasional | Pem Kab/Kota Wilayah I terlambat dalam memenuhi dokumen bantuan keuangan | kegiatan bantuan keuangan pada kab/kota Wilayah I yang dilaksanakan mundur sampai dengan tahun berikutnya sehingga kepercayaan masyarakat menurun terhadap Pemprov Jateng | Masyarakat, Biro Administrasi Pembangunan Daerah, SKPD pelaksana |

| No | Jenis Konteks Resiko | Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja | Risiko | Kategori Resiko | Sebab | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Uraian | Pihak yang terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16 | Sasaran Kegiatan | Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan APBD | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II | Kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan pada kab/kota Wilayah II tidak bisa segera dilaksanakan | Risiko Operasional | Pem Kab/Kota Wilayah II terlambat dalam memenuhi dokumen bantuan keuangan | kegiatan bantuan keuangan pada kab/kota Wilayah II yang dilaksanakan mundur sampai dengan tahun berikutnya sehingga kepercayaan masyarakat menurun terhadap Pemprov Jateng | Masyarakat, Biro Administrasi Pembangunan Daerah, skpd pelaksana |
| 17 | Sasaran Kegiatan | Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan APBD | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III | Kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan pada kab/kota Wilayah III tidak bisa segera dilaksanakan | Risiko Operasional | Pem Kab/Kota Wilayah III terlambat dalam memenuhi dokumen bantuan keuangan | kegiatan bantuan keuangan pada kab/kota Wilayah III yang dilaksanakan mundur sampai dengan tahun berikutnya sehingga kepercayaan masyarakat menurun terhadap Pemprov Jateng | Masyarakat, Biro Administrasi Pembangunan Daerah, SKPDpelaksana |
| 18 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | Penyajian laporan hasil evaluasi kinerja beberapa Biro lingkup Setda belum sesuai ketentuan | Risiko Operasional | terdapat perbedaan persepsi antar tim evaluasi | Proses penyusunan kompilasi laporan hasil evaluasi kinerja Setda menjadi lebih lama | Biro Administrasi Pembangunan Daerah |
| **BIRO ORGANISASI** | | | | | | | | |

| No | Jenis Konteks Resiko | Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja | Risiko | Kategori Resiko | Sebab | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Uraian | Pihak yang terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Sasaran Program | Meningkatnya efektivitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Jawa Tengah | Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi | Capaian nilai Tingkat Kematangan Organisasi Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai target | Risiko Operasional | 1. OPD kurang peduli terhadap pentingnya proses penilaian Kematangan Organisasi Daerah<br>2. Kurangnya pemahaman pejabat pengampu akan variabel penilaian karena terjadinya alih tugas jabatan<br>3. OPD kurang memperhatikan target waktu yang telah ditetapkan | Indeks kematangan Kebijakan prov Jateng tidak optimal | Kepala Biro Organisasi, Perangkat Daerah Terkait |
| 2 | Sasaran Program | Meningkatnya efektivitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Jawa Tengah | Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya | Penggunaan instrumen penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota yang tidak seragam | Risiko Operasional | Permendagri No 99 Th 2018 hanya menyebutkan indikator pengukuran KOD belum sampai pada data dukung/evidence yang harus dipenuhi untuk mencapai suatu tingkat kematangan tertentu | Implementasi Penilaian KOD Kabupaten/Kota belum optimal | Kepala Biro Organisasi, Pemda Kabupaten/Kota terkait |
| 3 | Sasaran Program | Meningkatnya efektivitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Jawa Tengah | Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif | OPD tidak memenuhi target waktu dan kinerja dalam pelaksanaan analisis jabatan | Risiko Operasional | OPD kurang peduli dan kurang memahami pentingnya penyelesaian analisis jabatan sesuai target kinerja dan waktu | Manajemen Kepegawaian dan Kinerja Perangkat Daerah kurang optimal | Kepala Biro Organisasi, Perangkat Daerah Terkait, Pemda Kab/Kota |

| No | Jenis Konteks Resiko | Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja | Risiko | Kategori Resiko | Sebab | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Uraian | Pihak yang terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Sasaran Program | Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah | Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A | perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A nilainya dapat menurun | Risiko Operasional | 1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah belum maksimal.<br>2. Bukti Dukung dalam pelaksanaan PMPRB belum terpenuhi.<br>3. Belum adanya Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah.<br>4. Evaluator yang melaksanakan evaluasi PMPRB Perangkat Daerah belum maksimal dikarenakan belum adanya pedoman/juknis evaluasi.<br>5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum disesuaikan dengan Rencana Kerja RB turunan dari Road Map RB.<br>6. Belum adanya standarisasi dan pedoman dalam pemenuhan bukti dukung PMPRB.<br>7. Perbedaan persepsi antara evaluator dengan perangkat | Nilai Indeks RB Perangkat Daerah rendah. | Kepala Biro Organisasi, Perangkat Daerah Terkait |

| No | Jenis Konteks Resiko | Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja | Risiko | Kategori Resiko | Sebab | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Uraian | Pihak yang terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | Sasaran Program | Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah | Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB | Beberapa Kab/Kota Indeks Reformasi Birokrasinya menurun | Risiko Operasional | 1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kab/Kota belum maksimal.<br>2. Bukti Dukung dalam pelaksanaan PMPRB belum terpenuhi.<br>3. Belum adanya Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kab/Kota.<br>4. Evaluator yang melaksanakan evaluasi PMPRB Perangkat Daerah belum maksimal dikarenakan belum adanya pedoman/juknis evaluasi.<br>5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum disesuaikan dengan Rencana Kerja RB turunan dari Road Map RB.<br>6. Belum adanya standarisasi dan pedoman dalam pemenuhan bukti dukung PMPRB.<br>7. Kurangnya pemahaman Kab/Kota atas terbitnya | Banyak Kab/Kota yang Indeks RBnya turun menggambarkan Pemerintah Provinsi tidak menjalankan pembinaan dan fasilitasi hingga monev atas pelaksanaan RB di Kab/Kota sehingga mengakibatkan Indeks RB Provinsi juga turun | Pemda Kabupaten/Kota Terkait |
| 6 | Sasaran Program | Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah | Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A | Keterlambatan pemenuhan Dokumen SAKIP oleh Perangkat daerah | Risiko Kepatuhan | Ketidakpatuhan Perangkat daerah terhadap ketentuan yang ada | Pelaksanaan evaluasi SAKIP terhambat sehingga mempengaruhi penilaian SAKIP Pemerintah Provinsi | Kepala Biro Organisasi, Perangkat Daerah Terkait |
| 7 | Sasaran Program | Meningkatnya efektivitas pelaksanaan ketatalaksanan dan pelayanan publik di Jawa Tengah | Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan | SOP tidak dilaksanakan. | Risiko Operasional | Kurangnya internalisasi dan monev pelaksanaan SOP. | Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tidak optimal | Kepala Biro Organisasi, Perangkat Daerah Terkait |

| No | Jenis Konteks Resiko | Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja | Risiko | Kategori Resiko | Sebab | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Uraian | Pihak yang terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | Sasaran Program | Meningkatnya efektivitas pelaksanaan ketatalaksanan dan pelayanan publik di Jawa Tengah | Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan | Nilai kepatuhan standar pelayanan publik dan indeks kualitas pelayanan publik tidak tercapai | Risiko Operasional | 1. Kurangnya pemahaman UPP terhadap pentingnya Standar Pelayanan.<br>2. Masih kurangnya pendampingan dan monitoring kepada UPP terkait Standar Pelayanan,<br>3. Tidak adanya sanksi yang tegas bagi UPP yang tidak menyusun dan mengimplementasikan Standar Pelayanan | 1. Kualitas pelayanan publik belum optimal<br>2. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayan publik rendah | Perangkat Daerah Terkait dan pengguna layanan |
| 9 | Sasaran Program | Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi | Capaian realisasi keuangan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan | Risiko Operasional | 1. Data dukung SPJ kurang lengkap.<br>2. kurangnya tertibnya administrasi dalam penginputan SPJ ke system | 1. SPJ terlambat.<br>2. Realisasi kinerja keuangan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. | Kepala Biro Organisasi |
| 10 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah Biro Organisasi | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi | Layanan Administrasi Kepegawaian lambat dan tidak optimal | Risiko Operasional | 1. Kurangnya pemahaman dan pemenuhan persyaratan KP KGB<br>2. Kurangnya pemahaman dan pemenuhan persyaratan Mutasi, Cuti, IB TB, Pensiun<br>3. Masih belum tersampaikannya informasi peningkatan kompetensi ke ASN<br>4. kurangnya pengawasan dan pengendalian serta reward and Punishment dalam penegakan disiplin ASN | 1. KP dan KGB terlambat sehingga merugikan ASN<br>2. Administrasi kepegawaian terhambat<br>3. Kompetensi ASN menurun<br>4. Meningkatnya Pelanggaran Disiplin ASN | PNS terkait |
| 11 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi | Capaian realisasi keuangan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan | Risiko Operasional | 1. Data dukung SPJ kurang lengkap.<br>2. kurangnya tertibnya administrasi dalam pengimputan SPJ ke system. | 1.SPJ terlambat.<br>2.Realisasi kinerja keuangan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. | Kepala Biro Organisasi |

| No | Jenis Konteks Resiko | Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja | Risiko | Kategori Resiko | Sebab | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Uraian | Pihak yang terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya efektifitas penataan kelembagaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi | Capaian nilai Tingkat Kematangan Organisasi Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai target | Risiko Operasional | Pembinaan ketatalaksanaan OPD belum optimal | Ketatalaksanaan OPD tidak berjalan optimal | OPD dan Pemprov |
| 13 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya efektifitas penataan kelembagaan Kab/kota | Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota | Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi tidak ditindaklanjuti oleh Kabupaten/Kota | Risiko Operasional | 1. Kabupaten/Kota kurang peduli terhadap pentingnya proses penilaian Kematangan Organisasi Daerah<br>2. Kurangnya pemahaman pejabat pengampu akan variabel penilaian karena terjadinya alih tugas jabatan | Nilai IKOD Kabupaten/Kota kurang baik | Pemda Kabupaten/Kota Terkait |
| 14 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya efektifitas penataan kelembagaan Perangkata Daerah dan Kab/Kota | Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota | OPD tidak memenuhi target waktu dan kinerja dalam pelaksanaan analisis jabatan | Risiko Operasional | OPD kurang peduli dan kurang memahami pentingnya penyelesaian analisis jabatan sesuai target kinerja dan waktu | Manajemen Kepegawaian dan Kinerja Perangkat Daerah kurang optimal | Kepala Biro Organisasi, Perangkat Daerah Terkait |

| No | Jenis Konteks Resiko | Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja | Risiko | Kategori Resiko | Sebab | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Uraian | Pihak yang terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya efektifitas pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi Kab/Kota | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD | perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A nilainya dapat menurun | Risiko Operasional | 1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah belum maksimal.<br>2. Bukti Dukung dalam pelaksanaan PMPRB belum terpenuhi.<br>3. Belum adanya Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah.<br>4. Evaluator yang melaksanakan evaluasi PMPRB Perangkat Daerah belum maksimal dikarenakan belum adanya pedoman/juknis evaluasi.<br>5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum disesuaikan dengan Rencana Kerja RB turunan dari Road Map RB.<br>6. Belum adanya standarisasi dan pedoman dalam pemenuhan bukti dukung PMPRB. | Nilai Indeks RB Perangkat Daerah rendah. | Kepala Biro Organisasi, Perangkat Daerah Terkait |

| No | Jenis Konteks Resiko | Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja | Risiko | Kategori Resiko | Sebab | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Uraian | Pihak yang terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya efektifitas pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi Kab/Kota | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota | Beberapa Kab/Kota Indeks Reformasi Birokrasinya menurun | Risiko Operasional | 1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kab/Kota belum maksimal.<br>2. Bukti Dukung dalam pelaksanaan PMPRB belum terpenuhi.<br>3. Belum adanya Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kab/Kota.<br>4. Evaluator yang melaksanakan evaluasi PMPRB Perangkat Daerah belum maksimal dikarenakan belum adanya pedoman/juknis evaluasi.<br>5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum disesuaikan dengan Rencana Kerja RB turunan dari Road Map RB.<br>6. Belum adanya standarisasi dan pedoman dalam pemenuhan bukti dukung PMPRB.<br>7. Kurangnya pemahaman Kab/Kota atas terbitnya | Banyak Kab/Kota yang Indeks RBnya turun menggambarkan Pemerintah Provinsi tidak menjalankan pembinaan dan fasilitasi hingga monev atas pelaksanaan RB di Kab/Kota sehingga mengakibatkan Indeks RB Provinsi juga turun | Pemda Kabupaten/Kota Terkait |
| 17 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya efektifitas pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi Kab/Kota | Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya | Keterlambatan pemenuhan Dokumen SAKIP oleh Perangkat daerah | Risiko Operasional | Ketidakpatuhan Perangkat daerah terhadap ketentuan yang ada | Pelaksanaan evaluasi SAKIP terhambat sehingga mempengaruhi penilaian SAKIP Pemerintah Provinsi | Kepala Biro Organisasi, Perangkat Daerah Terkait |
| 18 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya efektifitas pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi Kab/Kota | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan | SOP tidak dilaksanakan. | Risiko Operasional | Kurangnya internalisasi dan monev pelaksanaan SOP. | Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tidak optimal | Kepala Biro Organisasi, Perangkat Daerah Terkait |

| No | Jenis Konteks Resiko | Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja | Risiko | Kategori Resiko | Sebab | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Uraian | Pihak yang terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya efektifitas pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi Kab/Kota | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik | Nilai kepatuhan standar pelayanan publik dan indeks kualitas pelayanan publik tidak tercapai | Risiko Operasional | 1. Kurangnya pemahaman UPP terhadap pentingnya Standar Pelayanan.<br>2. Masih kurangnya pendampingan dan monitoring kepada UPP terkait Standar Pelayanan,<br>3. Tidak adanya sanksi yang tegas bagi UPP yang tidak menyusun dan mengimplementasikan Standar Pelayanan | 1. Kualitas pelayanan publik belum optimal<br>2. Tingkat Kepuasan Msyarakat terhadap pelayanan publik rendah | Perangkat Daerah Terkait dan Pengguna Layanan |
| **BIRO UMUM** | | | | | | | | |
| 1 | Sasaran Program | Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian Rumah Tangga Setda | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda | Terjadinya pelayanan pimpinan dan masyarakat yang tidak maksimal karena keterbatasan peralatan pendukung kegiatan yang memadai | Risiko Strategis | Banyak sarana dan prasarana yang sudah tidak representatif dikarenakan usia dan waktu pemakaian | Pelayanan yang tidak maksimal kepada pimpinan dan masyarakat yang rentan terjadi kendala pada saat pelaksanaan kegiatan | Pimpinan dan Masyarakat |
| 2 | Sasaran Program | Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan | Penyediaan kebutuhan pimpinan tidak sesuai dengan SHS yang ada saat ini | Risiko Strategis | Selera pimpinan yang berbeda spesifikasinya | Kebutuhan pimpinan tidak terpenuhi secara optimal | Pimpinan |
| 3 | Sasaran Program | Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian Humas dan Protokol | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol | Terjadinya beda persepsi antara pemerintah dan masyarakat penerima berita tentang informasi yang diterima | Risiko Strategis | Tidak tersampaikannya informasi kegiatan pimpinan secara benar dan terbuka | pandangan negatif masyarakat akan infomasi kegiatan pimpinan | Masyarakat |

| No | Jenis Konteks Resiko | Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja | Risiko | Kategori Resiko | Sebab | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Uraian | Pihak yang terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Terjadinya lebih bayar tunjangan keluarga pegawai | Risiko operasional | Banyak pegawai yang kurang teliti terhadap pelaporan data tunjangan keluarga | Pengembalian kelebihan pembayaran tunjangan keluarga oleh pegawai | Pegawai |
| 5 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | 1. Barang Milik Daerah tidak dapat diamankan<br>2. penatausahaan Barang Milik Daerah tidak dapat dipertanggungjawbakan | Risiko operasional | 1. Barang Milik Daerah tidak diamankan, Barang Milik Daerah terkena musibah bencana alam/sosial/kecelakaan<br>2. tidak terlaksananya pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan | 1. Barang Milik Daerah rusak/hilang<br>2. administrasi Barang Milik Daerah tidak akuntabel | Pimpinan dan pegawai lingkup Setda Provinsi Jawa Tengah |
| 6 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah | Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah | Belum adanya klausul tentang tanggang jawab bila terjadi force majeure | Risiko operasional | Bila terjadi kehilangan barang, siapa yang tanggung jawab (force majeure) | Kontrol tanggung jawab tidak bisa direalisasikan | Biro Umum dan stake holder |
| 7 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian Rumah Tangga Setda | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda | Terjadinya pelayanan masyarakat yang tidak maksimal karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan | Risiko operasional | Banyak sarana dan prasarana yang belum terakomodir dalam setiap pelaksanaan kegiatan | Pelayanan yang tidak maksimal kepada masyarakat | Masyarakat |
| 8 | Sasaran Kegiatan | Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset | Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Sarana dan prasarana kerja pimpinan dan pegawai lingkup Setda Provinsi Jawa Tengah tidak terpenuhi secara optimal | Risiko operasional | 1. kurangnya informasi kebutuhan BMD masing-masing unit kerja lingkup Setda Provinsi Jawa Tengah<br>2. adanya keterbatasan penganggaran/kemampuan pendanaan | tidak terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kerja pimpinan dan pegawai | Pimpinan dan pegawai lingkup Setda Provinsi Jawa Tengah |

| No | Jenis Konteks Resiko | Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja | Risiko | Kategori Resiko | Sebab | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Uraian | Pihak yang terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | Sasaran Kegiatan | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah Bagian Rumah Tangga Setda | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda | Terjadinya pelayanan masyarakat yang tidak maksimal karena keterbatasan sumber daya pendukung kegiatan | Risiko operasional | Banyak kegiatan yang tidak bisa tercapai karena banyaknya kegiatan yang harus dipenuhi | Pelayanan yang tidak maksimal kepada masyarakat | Masyarakat |
| 10 | Sasaran Kegiatan | Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Terjadinya pelayanan masyarakat yang tidak maksimal karena keterbatasan anggaran pemeliharaan peralatan pendukung kegiatan | Risiko operasional | Banyak sarana dan prasarana yang sudah tdak laik pakai dikarenakan usia dan waktu pemakaian | Pelayanan yang tidak maksimal kepada masyarakat dan rentan terjadi kendala pada saat pelaksanaan kegiatan | Pegawai dan Masyarakat |
| 11 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Bagian Rumah Tangga Setda | Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda | Terjadinya lebih bayar pengeluaran biaya operasional KDH / WKDH | Risiko operasional | Ada yang kurang teliti terhadap pelaporan data pengeluaran biaya operasional KDH/WKDH | Pengembalian kelebihan pembayaran terkait pengeluaran biaya operasional KDH/WKDH | KDH/WKDH |
| 12 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya layanan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah | Persentase layanan fasilitasi kerumahtanggan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan | Penyediaan kebutuhan pimpinan tidak sesuai dengan SHS yang ada saat ini | Risiko operasional | Selera pimpinan yang berbeda spesifikasinya | Kebutuhan pimpinan tidak terpenuhi secara optimal | Pimpinan |
| 13 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya layanan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan | Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan | Terjadinya beda persepsi antara pemerintah dan masyarakat penerima berita tentang informasi yang diterima | Risiko operasional | Tidak tersampaikannya informasi kegiatan pimpinan secara benar dan terbuka | pandangan negatif masyarakat akan infomasi kegiatan pimpinan | masyarakat |

| No | Jenis Konteks Resiko | Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja | Risiko | Kategori Resiko | Sebab | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Uraian | Pihak yang terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14 | Sasaran Kegiatan | Meningkatnya layanan fasilitasi keprotokolan | Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun | "1. Terjadinya beda persepsi antara petugas protokol dengan penyelenggara kegiatan.<br>2. Adanya ketidakpuasan dari Pimpinan (Gub, Wagub, Sekda) terhadap pelayanan keprotokolan" | Risiko operasional | "1. Kurangnya koordinasi sebelum acara / kegiatan pimpinan<br>2. Dinamika Agenda Pimpinan yang sangat tinggi" | "1. Acara tidak berjalan sebagaimana mestinya.<br>2. Pelayanan keprotokolan terhadap Pimpinan yang kurang optimal" | Pimpinan, Penyelenggara kegiatan dan peserta kegiatan |

lampiran 2
Analisis Resiko

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **BIRO PEMOTDAKER** | | | | | | | | | |
| Adanya aduan masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban umum | 4 | 4 | 16 | Ada | Memproses arahan pemprov kepada kab/kota terkait ketentraman dan ketertiban umum | memadai | 3 | 4 | 12 |
| Ketidakpatuhan Kab/Kota terhadap administrasi penataan urusan | 4 | 4 | 16 | Ada | Bersurat kepada Pemerintah Kab/Kota agar melaksanaan penataan urusan sesuai dengan kewenangannya | memadai | 3 | 4 | 12 |
| Keterlambatan penyusunan laporan keuangan | 1 | 3 | 3 | Ada | Peningkatan koordinasi antar masing-masing pemegang kas | memadai | 1 | 2 | 2 |

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| adanya informasi yang tidak tersampaikan | 1 | 3 | 3 | Ada | Peningkatan kelengkapan alat guna jasa surat menyurat dan kearsipan | memadai | 1 | 2 | 2 |
| Perbedaan regulasi antara Pemerintah dengan Badan Usaha/Swasta | 3 | 3 | 9 | Ada | Melakukan koordinasi dengan Pihak Ketiga | memadai | 2 | 3 | 6 |
| Perbedaan regulasi antar Negara | 3 | 3 | 9 | Ada | Komunikasi secara intensif | memadai | 2 | 3 | 6 |
| Perjanjian Kerjasama (PKS) tidak berjalan sesuai kesepakatan | 3 | 3 | 9 | Ada | melaksanakan identifikasi pelaksanaan kerjasama daerah | memadai | 2 | 3 | 6 |
| SK Gubernur terkait administrasi KDH dan DPRD tidak selesai tepat waktu | 3 | 3 | 9 | Ada | Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan pihak terkait | memadai | 3 | 2 | 6 |

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pelaporan penerapan SPM belum sesuai dengan permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM | 3 | 3 | 9 | Ada | monitoring dan evaluasi ke kab/kota di Jawa Tengah | memadai | 2 | 3 | 6 |
| Keterlambatan penyampaian data dukung LPPD Provinsi Jawa Tengah | 3 | 3 | 9 | Ada | Melakukan Koordinasi secara intensif kepada OPD Prov. Jateng dan BPS Prov. Jateng | memadai | 2 | 3 | 6 |
| adanya tuntutan hukum terhadap keputusan gubernur | 3 | 3 | 9 | Ada | Mediasi para pihak dan instansi terkait | Memadai | 2 | 3 | 6 |
| adanya tuntutan hukum terhadap keputusan gubernur | 3 | 3 | 9 | Ada | Melakukan Survey Secara Detail , Memilih Pihak ketiga yang Profesional, penetapan jadwal lapangan | Memadai | 2 | 3 | 6 |

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| BIRO HUKUM | | | | | | | | | |
| Ketidaksesuaian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya | 4 | 4 | 16 | Ada | Koordinasi dengan Bagian Hukum dan OPD Kab/Kota | memadai | 3 | 4 | 12 |
| Tidak tercatatnya aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada di daerah | 3 | 3 | 9 | Ada | Fasilitasi permasalahan aset kepada SKPD, inventarisasi permasalahan aset di daerah | memadai | 2 | 2 | 4 |
| Keterlambatan penyusunan laporan keuangan | 2 | 3 | 6 | Ada | Peningkatan koordinasi antar masing-masing pemegang kas | memadai | 2 | 2 | 4 |

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 'Ketidaksesuaian Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya. | 3 | 4 | 12 | Ada | Penjelasan dan Pembinaan serta pengawasan mengenai mekanisme dan jangka waktu fasilitasi, klarifikasi atau evaluasi | memadai | 3 | 3 | 9 |
| Ketidaksesuaian Keputusan Gubernur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya | 3 | 4 | 12 | Ada | Dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Keputusan Gubernur yang diajukan oleh SKPD dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Peraturan Gubernur yang lain. | memadai | 3 | 3 | 9 |

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ketidaksesuaian kajian produk Hukum dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya | 4 | 3 | 12 | Ada | Memberikan masukan dari aspek hukum yang proporsional dan normatif dalam setiap kajian produk hukum antara eksekutif dengan DPRD agar tercipta peraturan daerah yang baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum | memadai | 3 | 3 | 9 |

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ketidaksesuaian Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah/ Peraturan DPRD Kabupaten/ Kota dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan sehingga menimbulkan permasalahan | 3 | 4 | 12 | Ada | Penjelasan mekanisme evaluasi Peraturan daerah tentang pajak daerah atau retribusi daerah ke Bagian Hukum SETDA Kabupaten/ Kota | memadai | 3 | 4 | 12 |
| Tidak tertanganinya perkara Perdata/Tata Usaha Negara yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan baik | 3 | 3 | 9 | Ada | Koordinasi dengan Kejati selaku Jaksa Pengacara Negara untuk menjadi kuasa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | memadai | 2 | 2 | 4 |

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Tidak tertanganinya perkara masyarakat miskin dengan baik | 3 | 3 | 9 | Ada | Koordinasi dengan Kanwil Kemenkumham Jateng untuk penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Jateng | memadai | 2 | 2 | 4 |
| Tidak tercatatnya aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada di daerah | 3 | 3 | 9 | Ada | Fasilitasi permasalahan aset kepada SKPD, inventarisasi permasalahan aset di daerah | memadai | 2 | 2 | 4 |
| Masih banyaknya pelaku usaha rokok yang belum diberdayakan | 4 | 4 | 16 | Ada | Sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang terkait | Belum | 3 | 4 | 12 |
| adanya informasi yang tidak tersampaikan | 2 | 3 | 6 | Ada | Peningkatan kelengkapan alat guna jasa surat menyurat dan kearsipan | Memadai | 2 | 2 | 4 |

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **BIRO KESRA** | | | | | | | | | |
| Belum optimalnya sinergi dan efektifitas pencapaian kinerja kebijakan Bidang Kesra pelayanan dasar | 3 | 4 | 12 | Ada | Koordinasi dan Sinergitas | Memadai | 3 | 3 | 9 |
| Belum optimalnya sinergi dan efektifitas pencapaian kinerja kebijakan bidang kesra non pelayanan dasar | 3 | 4 | 12 | Ada | Koordinasi dan sinergitas | Memadai | 3 | 3 | 9 |
| Pemenuhan persyaratan pencairan dana hibah membutuhkan waktu lama. | 4 | 4 | 16 | Ada | Koordinasi | Memadai | 3 | 4 | 12 |
| Keterlambatan penyusunan laporan keuangan | 2 | 3 | 6 | Ada | Peningkatan koordinasi a | Memadai | 2 | 2 | 4 |
| adanya informasi yang tidak tersampaikan | 2 | 3 | 6 | Ada | Peningkatan kelengkapan alat guna jasa surat menyurat dan kearsipan | Memadai | 2 | 2 | 4 |

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pemenuhan persyaratan dana hibah membutuhkan waktu yang lama | 4 | 4 | 16 | Ada | Koordinasi dan sinergitas | Memadai | 3 | 4 | 12 |
| Kurangnya sinergisitas Pemahaman calon petugas haji daerah | 3 | 3 | 9 | Ada | Melaksanakan Koordinasi | Memadai | 2 | 3 | 6 |
| Tidak didapatkannya data dan informasi yang relevan serta terintegrasi dengan OPD ampuan dalam pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan | 3 | 4 | 12 | Ada | Pelaksanaan Rakor dengan OPD ampuan dalam rangka sinkronisasi kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan | Memadai | 3 | 3 | 9 |

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Tidak didapatkannya data dan informasi yang relevan serta terintegrasi dengan OPD ampuan dalam pelaksanaan Kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 3 | 4 | 12 | Ada | Pelaksanaan Rakor dengan OPD ampuan dalam rangka sinkronisasi kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Memadai | 3 | 3 | 9 |
| Tidak didapatkannya data dan informasi yang relevan serta terintegrasi dengan OPD ampuan dalam pelaksanaan Kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan administrasi Kependudukan | 3 | 4 | 12 | Ada | Pelaksanaan Rakor dengan OPD ampuan dalam rangka sinkronisasi kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan administrasi Kependudukan | Memadai | 3 | 3 | 9 |

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Tidak didapatkannya data dan informasi yang relevan serta terintegrasi dengan OPD ampuan dalam pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan | 3 | 4 | 12 | Ada | Pelaksanaan Rakor dengan OPD ampuan dalam rangka sinkronisasi kebijakan Bidang Pendidikan | Memadai | 3 | 3 | 9 |
| Tidak didapatkannya data dan informasi yang relevan serta terintegrasi dengan OPD ampuan dalam pelaksanaan Kebijakan bidang Kesehatan | 3 | 4 | 12 | Ada | Pelaksanaan Rakor dengan OPD ampuan dalam rangka sinkronisasi kebijakan bidang Kesehatan | Memadai | 3 | 3 | 9 |
| Tidak didapatkannya data dan informasi yang relevan serta terintegrasi dengan OPD ampuan dalam pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial | 3 | 4 | 12 | Ada | Pelaksanaan Rakor dengan OPD ampuan dalam rangka sinkronisasi kebijakan Bidang Sosial | Memadai | 3 | 3 | 9 |
| **BIRO PEREKONOMIAN** | | | | | | | | | |
| Kualitas data kurang valid | 4 | 4 | 16 | Ada | Pengumpulan dan validasi data | memadai | 3 | 4 | 12 |

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Adanya fraud (penyalahgunaan keuangan) yang terjadi di BUMD | 4 | 5 | 20 | Ada | Bimtek, peningkatan pengawasan | memadai | 4 | 4 | 16 |
| Kurang maksimalnya ketercapaian laba dari BUMD | 4 | 4 | 16 | Ada | Koordinasi dengan BUMD | memadai | 3 | 4 | 12 |
| Ketidakpuasaan masyarakat terhadap pelayanan umum BLUD | 3 | 4 | 12 | Ada | 1. Monitoring dan evaluasi Pelayanan umum BLUD | memadai | 3 | 3 | 9 |
| Keterlambatan penyusunan laporan keuangan | 2 | 3 | 6 | Ada | Peningkatan koordinasi antar masing-masing pemegang kas | memadai | 2 | 2 | 4 |
| Data hasil evaluasi BLUD tidak valid | 3 | 3 | 9 | Ada | Desk dan Monitoring hasil evaluasi BLUD | memadai | 2 | 3 | 6 |
| Rekomendasi kebijakan tidak ditindaklanjuti sepenuhnya oleh BLUD | 3 | 3 | 9 | Ada | Monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut rekomendasi BLUD | memadai | 2 | 3 | 6 |
| Data investasi, penanaman modal dan pariwisata kurang valid | 3 | 3 | 9 | Ada | 1. Koordinasi dan sinkronisasi data<br>2. Monitoring dan Evaluasi | memadai | 2 | 3 | 6 |

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Data transportasi kurang valid | 3 | 3 | 9 | Ada | 1. Koordinasi dan sinkronisasi data<br>2. Monitoring dan Evaluasi | memadai | 2 | 3 | 6 |
| Kurang validnya data KUR | 3 | 3 | 9 | Ada | Monitoring dan evaluasi, Rakor KUR | memadai | 2 | 3 | 6 |
| Kurang validnya data IPH | 3 | 3 | 9 | Ada | Monitoring dan evaluasi, Rakor TPID | memadai | 2 | 3 | 6 |
| **BIRO ISDA** | | | | | | | | | |
| Rekomendasi kebijakan tidak ditindaklanjuti oleh OPD teknis bidang pertanian | 4 | 4 | 16 | Ada | Koordinasi | memadai | 3 | 4 | 12 |
| Rekomendasi kebijakan tidak ditindaklanjuti oleh OPD teknis bidang lingkungan hidup dan pertambangan | 4 | 4 | 16 | Ada | Koordinasi | memadai | 3 | 4 | 12 |
| Rekomendasi kebijakan tidak ditindaklanjuti oleh OPD teknis | 4 | 4 | 16 | Ada | Koordinasi | memadai | 3 | 4 | 12 |

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Keterlambatan penyusunan laporan keuangan | 2 | 3 | 6 | Ada | Peningkatan koordinasi antar masing-masing pemegang kas | memadai | 2 | 2 | 4 |
| Belum adanya data komoditas pertanian berbasis spasial near real time | 3 | 4 | 12 | Ada | 1. Refreshing dan workshop Aplikasi Panen untuk admin Aplikasi Panen kab/kota dan kecamatan<br>2. Optimalisasi peran Tim KP3 Provinsi dan kabupaten/kota | Memadai | 3 | 3 | 9 |
| Masih banyaknya pelaku usaha rokok yang belum diberdayakan | 4 | 4 | 16 | Ada | Sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang terkait | Belum | 3 | 4 | 12 |

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Kegiatan yang berkaitan dengan Komisi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (KP3K) belum bersinergi dengan kegiatan yang ada di Kab/Kota. | 3 | 4 | 12 | Ada | Memberikan Rancangan Policy Brief terkait dengan kepenyuluhan pertanian sesuai dengan kondisi terkini di Kab/Kota kepada Gubernur Jawa Tengah. | Memadai | 3 | 3 | 9 |
| Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir belum bersinergi | 3 | 3 | 9 | Ada | Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring Sinkronisasi Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pesisir di Jawa Tengah | Memadai | 2 | 3 | 6 |
| Penurunan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Peningkatan Lahan Kritis di Jawa Tengah | 3 | 3 | 9 | Ada | Koordinasi capaian kinerja program OPD bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Memadai | 2 | 3 | 6 |

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Sinergitas kebijakan konservasi energi tidak dilaksanakan | 3 | 3 | 9 | Ada | Koordinasi capaian kinerja program OPD bidang ESDM dalam upaya kesesuaian target bauran energi Jawa Tengah | Memadai | 2 | 3 | 6 |
| Kebijakan Pemerintah pusat dan daerah dalam Pelaksanaan PSN Sektor Infrastruktur di Jawa Tengah tidak tersinergi | 3 | 3 | 9 | Ada | Fasilitasi, koordinasi dan monitoring sinkronisasi Pelaksanaan kebijakan PSN Sektor Infrastruktur di Jawa Tengah | Memadai | 2 | 3 | 6 |
| Sinergitas Kebijakan Kawasan Permukiman tidak Optimal | 3 | 3 | 9 | Ada | Peningkatan Koordinasi Forum PKP di tingkat Pusat Maupun Daerah | Memadai | 2 | 3 | 6 |

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| adanya informasi yang tidak tersampaikan | 2 | 3 | 6 | Ada | Peningkatan kelengkapan alat guna jasa surat menyurat dan kearsipan | Memadai | 2 | 2 | 4 |
| **BIRO APBJ** | | | | | | | | | |
| Munculnya Aduan dan sengketa hukum bidang pengadaan barang dan jasa | 3 | 4 | 12 | Ada | melakukan peningkatan kompetensi SDM JF PBJ dengan cara sosialisasi regulasi, mekanisme penanganan benturan kepentingan dalam proses PBJ | Memadai | 2 | 3 | 6 |
| Jumlah SDM pendukung terbatas | 3 | 3 | 9 | Ada | 1. Peningkatan Kompetensi<br>2. Mengusulkan penambahan pegawai | Memadai | 2 | 3 | 6 |
| Terhambatnya pelayanan administrasi umum pada Biro APBJ | 3 | 3 | 9 | Ada | Mengusulkan pemenuhan Sarpras | Memadai | 2 | 3 | 6 |

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Penataan arsip belum sesuai prosedur | 3 | 3 | 9 | Ada | Optimalisasi penyusunan arsip | Memadai | 2 | 3 | 6 |
| Adanya keberatan PPK terhadap hasil proses pemilihan penyedia oleh Pokja | 3 | 3 | 9 | Ada | Membangun pola komunikasi antara PPK, PA/KPA, Pokja Pemilihan, penyedia dan tim clearing house | Memadai | 2 | 3 | 6 |
| Terjadinya kendala sistem pendukung pengadaan barang dan jasa | 2 | 3 | 6 | Ada | 1. Sosialisasi penggunaan sistem pendukung<br>2. Penambahan server baru | Memadai | 2 | 2 | 4 |
| Tender / Seleksi Gagal | 2 | 3 | 6 | Ada | Pemberian penghargaan reward dan punishment secara obyektif. | Memadai | 2 | 2 | 4 |
| **BIRO BANGDA** | | | | | | | | | |

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| pelaksanaan kegiatan APBD tidak sesuai dengan rencana kerja yang sudah ditetapkan (RKO) | 4 | 3 | 12 | Ada | (1) Fasilitasi penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan melalui sistem e-RKO<br>(2) Fasilitasi dan koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan OPD<br>(3) Desk pendampingan input dan pencermatan rencana kerja kegiatan pada sistem e-RKO<br>(4) Pengendalian pelaksanaan RKO secara intensif baik berkala maupun sewaktu-waktu (desk inventarisir permasalahan dan pemantauan lapangan)<br>(5) menindaklanjuti hasil pengendalian dengan sebagai bahan kebijakan yang dituangkan dalam SE dan rakor, untuk langkah perbaikan/percepatan pelaksanaaan APBD | memadai | 3 | 3 | 9 |

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pelaksanaan kegiatan APBN tidak sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan | 5 | 4 | 20 | Ada | Penyusunan data rencana kegiatan APBN, koordinasi pengendalian pelaksanaan APBN | memadai | 4 | 4 | 16 |
| Kegiatan yang bersumber dari Bantuan keuangan tidak bisa segera dilaksanakan | 4 | 3 | 12 | Ada | (1) rapat koordinasi bersama dengan kabupaten/kota untuk percepatan pemenuhan dokumen<br>(2) melaksanakan rakor dengan tim RKO (Bappeda, BPKAD, Disdik dan dispermades)<br>(3) melaksanakan desk pendampingan penginputan dan penyempurnaan dokumen pengajuan bankeu (RKO) | memadai | 3 | 3 | 9 |

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Laporan pelaksanaan kegiatan dan kinerja tidak lengkap dan informatif | 3 | 5 | 15 | Ada | (1) pencermatan laporan bulanan melalui sistem<br>(2) pelaksanaan monitoring secara berkala | memadai | 3 | 4 | 12 |
| Rekomendasi kebijakan yang disusun tidak relevan dengan kondisi sumber daya yang ada | 4 | 5 | 20 | Ada | Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka implementasi rekomendasi yang telah disusun | memadai | 4 | 4 | 16 |
| Besaran uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan operasional kegiatan Biro Adm. Bangda | 4 | 3 | 12 | Ada | (1) Memaksimalkan kuantitas revolving GU<br>(2) Percepatan jadwal penyelesaian SPJ<br>(3) Memaksimalkan penggunaan mekanisme pencairan keuangan lainnya sesuai ketentuan (TU, LS, dsb) | memadai | 3 | 3 | 9 |

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan | 3 | 5 | 15 | Ada | Desk capaian kinerja Biro-Biro lingkup Setda secara triwulan | memadai | 2 | 5 | 10 |
| Pimpinan tidak menghadiri suatu kegiatan/agenda | 3 | 4 | 12 | Ada | (1) Pelaksanaan pencermatan agenda harian<br>(2) Pelaksanaan pencermatan agenda mingguan<br>(3) Inventarisir surat masuk dan disposisi pimpinan melalui sistem dan google sheet | memadai | 4 | 2 | 8 |
| Ketidakpatuhan user pelaporan bantuan keuangan desa dalam melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan | 4 | 5 | 20 | Ada | Sosialisasi dan asistensi secara daring dan melaksanakan sampling luring | memadai | 4 | 4 | 16 |
| Laporan evaluasi capaian kinerja tidak lengkap dan informatif | 5 | 5 | 25 | Ada | Desk capaian kinerja OPD secara triwulan | memadai | 4 | 5 | 20 |

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pengajuan perubahan sub sub kegiatan yang tidak sesuai ketentuan | 4 | 3 | 12 | Ada | Melakukan kajian atas pengajuan perubahan sub sub kegiatan | memadai | 3 | 3 | 9 |

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| pelaksanaan kegiatan APBD Bidang Ekonomi tidak sesuai dengan rencana kerja yang sudah ditetapkan (RKO) | 4 | 3 | 12 | Ada | (1) Fasilitasi penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan melalui sistem e-RKO<br>(2) Fasilitasi dan koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan OPD<br>(3) Desk pendampingan input dan pencermatan rencana kerja kegiatan pada sistem e-RKO<br>(4) Pengendalian pelaksanaan RKO secara intensif baik berkala maupun sewaktu-waktu (desk inventarisir permasalahan dan pemantauan lapangan)<br>(5) menindaklanjuti hasil pengendalian dengan sebagai bahan kebijakan yang dituangkan dalam SE dan rakor, untuk langkah perbaikan/percepatan pelaksanaaan APBD | memadai | 3 | 3 | 9 |

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Laporan pelaksanaan kegiatan dan kinerja tidak lengkap dan informatif | 4 | 3 | 12 | Ada | (1) Fasilitasi penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan melalui sistem e-RKO<br>(2) Fasilitasi dan koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan OPD<br>(3) Desk pendampingan input dan pencermatan rencana kerja kegiatan pada sistem e-RKO<br>(4) Pengendalian pelaksanaan RKO secara intensif baik berkala maupun sewaktu-waktu (desk inventarisir permasalahan dan pemantauan lapangan)<br>(5) menindaklanjuti hasil pengendalian dengan sebagai bahan kebijakan yang dituangkan dalam SE dan rakor, untuk langkah perbaikan/percepatan pelaksanaaan APBD | memadai | 3 | 3 | 9 |

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Anggaran DAK tidak tersalur sesuai tahapannya dari Pusat | 4 | 5 | 20 | Ada | Penyusunan data rencana kegiatan DAK, koordinasi pengendalian pelaksanaan DAK | memadai | 3 | 5 | 15 |
| Kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan pada kab/kota Wilayah I tidak bisa segera dilaksanakan | 4 | 3 | 12 | Ada | (1) rapat koordinasi bersama dengan kabupaten/kota untuk percepatan pemenuhan dokumen<br>(2) Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan Bankeu sesuai rencana<br>(3) melaksanakan rakor dengan tim RKO (Bappeda, BPKAD, Disdik dan dispermades)<br>(4) melaksanakan desk pendampingan penginputan dan penyempurnaan dokumen pengajuan bankeu (RKO) | memadai | 3 | 3 | 9 |

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan pada kab/kota Wilayah II tidak bisa segera dilaksanakan | 4 | 3 | 12 | Ada | (1) rapat koordinasi bersama dengan kabupaten/kota untuk percepatan pemenuhan dokumen<br>(2) Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan Bankeu sesuai rencana<br>(3) melaksanakan rakor dengan tim RKO (Bappeda, BPKAD, Disdik dan dispermades)<br>(4) melaksanakan desk pendampingan penginputan dan penyempurnaan dokumen pengajuan bankeu (RKO) | memadai | 3 | 3 | 9 |

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan pada kab/kota Wilayah III tidak bisa segera dilaksanakan | 4 | 3 | 12 | Ada | (1) rapat koordinasi bersama dengan kabupaten/kota untuk percepatan pemenuhan dokumen<br>(2) Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan Bankeu sesuai rencana<br>(3) melaksanakan rakor dengan tim RKO (Bappeda, BPKAD, Disdik dan dispermades)<br>(4) melaksanakan desk pendampingan penginputan dan penyempurnaan dokumen pengajuan bankeu (RKO) | memadai | 3 | 3 | 9 |
| Penyajian laporan hasil evaluasi kinerja beberapa Biro lingkup Setda belum sesuai ketentuan | 4 | 3 | 12 | Ada | Melakukan desk evaluasi kinerja Biro lingkup Setda secara triwulan | memadai | 3 | 3 | 9 |

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **BIRO ORGANISASI** | | | | | | | | | |
| Capaian nilai Tingkat Kematangan Organisasi Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai target | 4 | 4 | 16 | Ada | 1. Asistensi tingkat lanjut hasil pengukuran TKOD OPD.<br>2. Penguatan kapasitas sumberdaya pengukuran indeks kematangan kebijakan ( Bimtek anjak, Asistensi Anjak, FGD , penyusunan aplikasi )<br>3. Evaluasi dan Pembinaan OPD dalam rangka peningkatan kualitas kematangan TKOD<br>4. Fasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah<br>5. Monitoring dan evaluasi penataa kelembagaan perangkat daerah | memadai | 3 | 4 | 12 |

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Penggunaan instrumen penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota yang tidak seragam | 3 | 3 | 9 | Ada | Workshop, Desk, Pendampingan Kabupaten/Kota | memadai | 3 | 3 | 9 |
| OPD tidak memenuhi target waktu dan kinerja dalam pelaksanaan analisis jabatan | 3 | 3 | 9 | Ada | Bimtek, Rakor, Sosialisasi, Monev, Fasilitasi, Pendampingan Perangkat daerah dan Kab/Kota | memadai | 3 | 3 | 9 |
| perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A nilainya dapat menurun | 4 | 4 | 16 | Ada | Pembinaan, Pendampingan, Desk, Monev, Rakor, Sosialisasi, dan FGD Perangkat daerah | memadai | 3 | 4 | 12 |
| Beberapa Kab/Kota Indeks Reformasi Birokrasinya menurun | 3 | 4 | 12 | Ada | Pembinaan, Pendampingan, Desk, Monev, Rakor, dan FGD Pemda Kab/Kota Terkait | memadai | 3 | 3 | 9 |

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Keterlambatan pemenuhan Dokumen SAKIP oleh Perangkat daerah | 3 | 4 | 12 | Ada | Bimtek, Rakor, Sosialisasi, Monev, Fasilitasi, Pendampingan, SE Sekda | memadai | 3 | 3 | 9 |
| SOP tidak dilaksanakan. | 3 | 3 | 9 | Ada | 1. Pembinaan dan pendampingan SOP ke UPP dan Kab/Kota.<br>2. Desk SOP ke UPP dan Kab/Kota.<br>3. Monev SOP ke UPP dan Kab/Kota.<br>4. Pemeliharaan dan pengembangan app SOP online. | memadai | 3 | 3 | 9 |
| Nilai kepatuhan standar pelayanan publik dan indeks kualitas pelayanan publik tidak tercapai | 4 | 4 | 16 | Ada | Sosialisasi, Fasilitasi, Monev, Pendampingan Perangkat Daerah dan Pemda Kab/Kota | memadai | 3 | 4 | 12 |

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Capaian realisasi keuangan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan | 3 | 3 | 9 | Ada | 1. Pembinaan penataan keuangan biro organisasi.<br>2. Sosialisasi terkait anggaran dan pelaksanaannya.<br>1. Sosialiasi dan Rapat Koordinasi dan Desk KP KGB<br>2. Sosialiasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian<br>3. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelayanan administrasi kepegawaian secara periodik. | memadai | 3 | 3 | 9 |

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Layanan Administrasi Kepegawaian lambat dan tidak optimal | 3 | 4 | 12 | Ada | 1. Sosialiasi dan Rapat Koordinasi dan Desk KP KGB.<br>2. Sosialiasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian.<br>3. Penyampaian Informasi Diklat secara berkala dan melalui media sosial.<br>4. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Disiplin ASN dan Pemberian Reward and Punishment yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<br>5. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelayanan administrasi kepegawaian secara periodik. | Memadai | 3 | 3 | 9 |

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Capaian realisasi keuangan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan | 3 | 4 | 12 | Ada | 1. Pembinaan penataan keuangan biro organisasi.<br>2. Sosialisasi terkait anggaran dan pelaksanaannya. | Memadai | 3 | 3 | 9 |

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Capaian nilai Tingkat Kematangan Organisasi Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai target | 4 | 4 | 16 | Ada | 1. Asistensi tingkat lanjut hasil pengukuran TKOD OPD.<br>2. Penguatan kapasitas sumberdaya pengukuran indeks kematangan kebijakan ( Bimtek anjak, Asistensi Anjak, FGD , penyusunan aplikasi )<br>3. Evaluasi dan Pembinaan OPD dalam rangka peningkatan kualitas kematangan TKOD<br>4. Fasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah<br>5. Monitoring dan evaluasi penataa kelembagaan perangkat daerah | Memadai | 3 | 4 | 12 |

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi tidak ditindaklanjuti oleh Kabupaten/Kota | 3 | 4 | 12 | Ada | Workshop, Desk, Pendampingan Kabupaten/Kota | Memadai | 3 | 3 | 9 |
| OPD tidak memenuhi target waktu dan kinerja dalam pelaksanaan analisis jabatan | 3 | 4 | 12 | Ada | Bimtek, Rakor, Sosialisasi, Monev, Fasilitasi, Pendampingan Perangkat daerah dan Kab/Kota | Memadai | 3 | 3 | 9 |
| perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A nilainya dapat menurun | 4 | 4 | 16 | Ada | Pembinaan, Pendampingan, Desk, Monev, Rakor, Sosialisasi, dan FGD Perangkat daerah | Memadai | 3 | 4 | 12 |
| Beberapa Kab/Kota Indeks Reformasi Birokrasinya menurun | 3 | 4 | 12 | Ada | Pembinaan, Pendampingan, Desk, Monev, Rakor, dan FGD Pemda Kab/Kota Terkait | Memadai | 3 | 3 | 9 |

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Keterlambatan pemenuhan Dokumen SAKIP oleh Perangkat daerah | 3 | 4 | 12 | Ada | KoordiBimtek, Rakor, Sosialisasi, Monev, Fasilitasi, Pendampingan, SE Sekdanasi | Memadai | 3 | 3 | 9 |
| SOP tidak dilaksanakan. | 3 | 4 | 12 | Ada | 1, Pembinaan dan pendampingan SOP ke UPP dan Kab/Kota.<br>2. Desk SOP ke UPP dan Kab/Kota.<br>3. Monev SOP ke UPP dan Kab/Kota.<br>4. Pemeliharaan dan pengembangan app SOP online. | Memadai | 3 | 3 | 9 |
| Nilai kepatuhan standar pelayanan publik dan indeks kualitas pelayanan publik tidak tercapai | 4 | 4 | 16 | Ada | Sosialisasi, Fasilitasi, Monev, Pendampingan Perangkat Daerah dan Pemda Kab/Kota | Memadai | 3 | 4 | 12 |
| **BIRO UMUM** | | | | | | | | | |

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Terjadinya pelayanan pimpinan dan masyarakat yang tidak maksimal karena keterbatasan peralatan pendukung kegiatan yang memadai | 3 | 4 | 12 | Ada | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan dan pemeliharaan secara berkala | Memadai | 3 | 4 | 12 |
| Penyediaan kebutuhan pimpinan tidak sesuai dengan SHS yang ada saat ini | 3 | 4 | 12 | Ada | Mengajukan usulan SHS | Memadai | 3 | 3 | 9 |
| Terjadinya beda persepsi antara pemerintah dan masyarakat penerima berita tentang informasi yang diterima | 3 | 4 | 12 | Ada | Memberikan berita / informasi secara terbuka dan nyata kepada masyarakat | Memadai | 3 | 3 | 9 |
| Terjadinya lebih bayar tunjangan keluarga pegawai | 2 | 3 | 6 | Ada | Menghimbau kepada pegawai yang memiliki tunjangan anak untuk melaporkannya apabila sudah melewati batas usia | Memadai | 2 | 2 | 4 |

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Barang Milik Daerah tidak dapat diamankan<br>2. penatausahaan Barang Milik Daerah tidak dapat dipertanggungjawbakan | 3 | 4 | 12 | Ada | 1. melakukan asuransi Barang Milik Daerah pada Gedung/bangunan dan Kendaraan Roda 4 (empat)<br>2. melaksanakan penatusahaan yang meliputi pencatatan, inventarsiasi dan pelaporan Barang Milik Daerah serta menghimbau pengamanan dan mensosialisasikan kepada para pegawai yang menggunakan BMD lingkup Setda Provinsi Jawa Tengah | Memadai | 3 | 3 | 9 |
| Belum adanya klausul tentang tanggang jawab bila terjadi force majeure | 3 | 4 | 12 | Ada | Telah dilakukan kajian terhadap isi perjanjian kerjasama | Memadai | 2 | 3 | 6 |

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Terjadinya pelayanan masyarakat yang tidak maksimal karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan | 3 | 4 | 12 | Ada | Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan | Memadai | 2 | 3 | 6 |
| Sarana dan prasarana kerja pimpinan dan pegawai lingkup Setda Provinsi Jawa Tengah tidak terpenuhi secara optimal | 3 | 4 | 12 | Ada | 1. melakukan identifikasi Rencana kebutuhan barang di masing-masing unit kerja lingkup Setda Provinsi Jawa Tengah<br>2. melakukan penganggaran dan pengadaan barang dengan skala prioritas | Memadai | 3 | 4 | 12 |
| Terjadinya pelayanan masyarakat yang tidak maksimal karena keterbatasan sumber daya pendukung kegiatan | 3 | 4 | 12 | Ada | Pemenuhan sumber daya pendukung dan penunjang kegiatan | Memadai | 2 | 3 | 6 |

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Terjadinya pelayanan masyarakat yang tidak maksimal karena keterbatasan anggaran pemeliharaan peralatan pendukung kegiatan | 3 | 4 | 12 | Ada | Peremajaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan | Memadai | 3 | 4 | 12 |
| Terjadinya lebih bayar pengeluaran biaya operasional KDH / WKDH | 3 | 4 | 12 | Ada | Menghimbau kepada pegawai yang menangani pengeluaran biaya operasional untuk lebih teliti dalam pelaporan | Memadai | 2 | 3 | 6 |
| Penyediaan kebutuhan pimpinan tidak sesuai dengan SHS yang ada saat ini | 3 | 4 | 12 | Ada | Mengajukan usulan SHS | Memadai | 2 | 3 | 6 |
| Terjadinya beda persepsi antara pemerintah dan masyarakat penerima berita tentang informasi yang diterima | 3 | 4 | 12 | Ada | Memberikan berita / informasi secara terbuka dan nyata kepada masyarakat | Memadai | 2 | 3 | 6 |

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| "1. Terjadinya beda persepsi antara petugas protokol dengan penyelenggara kegiatan.<br>2. Adanya ketidakpuasan dari Pimpinan (Gub, Wagub, Sekda) terhadap pelayanan keprotokolan" | 3 | 4 | 12 | Ada | "1. koordinasi secara intensif dengan panitia penyelengara sebelum kegiatan berlangsung<br>2. Cek lokasi H-1 sebelum acara untuk memastikan persiapan acara secara optimal.<br>3. Pengalokasian jumlah petugas yang ideal pada setiap kegiatan." | Memadai | 2 | 3 | 6 |

**Tabel 3**
**Risiko Prioritas**

| Risiko Prioritas | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Sebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **BIRO PEMOTDAKER** | | | | |
| Kerjasama antar daerah tidak berbasis potensi unggulan daerah | 6 | Kepala Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama | belum adanya pemetaan potensi kerjasama daerah | Kurang optimalnya pelaksanaan kerjasama daerah di Provinsi Jawa Tengah |
| Adanya aduan masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban umum | 12 | Kepala Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama | Rekomendasi kebijakan kurang mengakomodir permasalahan di lapangan | Menghambat proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat |
| Ketidakpatuhan Kab/Kota terhadap administrasi penataan urusan | 12 | Kepala Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama | Kurangnya pemahaman Kab/Kota terhadap Peraturan yang berlaku | Proses penyelenggaraan pemerintah terhambat |
| Keterlambatan penyusunan laporan keuangan | 2 | Kepala Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama | Kurangnya data dukung pada laporan keuangan | Terhambatnya operasional kegiatan |
| adanya informasi yang tidak tersampaikan | 2 | Kepala Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama | Keterbatasan SDM | Terhambatnya proses pelayanan jasa surat |
| Perbedaan regulasi antara Pemerintah dengan Badan Usaha/Swasta | 6 | Kepala Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama | Dinamika peraturan Pemerintah Indonesia | terhambatnya implementasi kerjasama |
| Perbedaan regulasi antar Negara | 6 | Kepala Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama | Dinamika peraturan Pemerintah Indonesia | terhambatnya pelaksanaan fasilitasi kerjasama |
| Perjanjian Kerjasama (PKS) tidak berjalan sesuai kesepakatan | 6 | Kepala Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama | Belum semua Kab/kota melaksanakan Urusan Pemerintahan sesuai kewenangan | Pergantian SDM yang menangani kerjasama |
| SK Gubernur terkait administrasi KDH dan DPRD tidak selesai tepat waktu | 6 | Kepala Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama | Terbatasnya waktu proses administrasi dan panjangnya proses birokrasi | Tertundanya dokumen administrasi |
| Pelaporan penerapan SPM belum sesuai dengan permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM | 6 | Kepala Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama | Terbitnya regulasi baru sehingga belum dapat terakomodir dalam RPJMD | belum semua urusan wajib pelayanan dasar (SPM) teranggarkan dalam dokumen perencanaan |
| Keterlambatan penyampaian data dukung LPPD Provinsi Jawa Tengah | 6 | Kepala Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama | Waktu release data dukung LPPD tidak sesuai dengan Surat Edaran Penyampaian data Dukung LPPD Prov. Jateng | Penyusunan dokumen LPPD tidak tepat waktu |
| adanya tuntutan hukum terhadap keputusan gubernur | 6 | Kepala Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama | Rekomendasi kebijakan kurang mengakomodir permasalahan di lapangan | Menghambat proses pembangunan Proyek Nasional dan/atau Daerah |
| adanya tuntutan hukum terhadap keputusan gubernur | 6 | Kepala Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama | Lokasi sulit dijangkau, kendala cuaca | Batas Daerah di Lokasi tersebut tidak jelas |
| **BIRO HUKUM** | | | | |
| Perencanaan penyusunan produk hukum belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan perundang undangan | 12 | Kepala Biro Hukum | Kajian penyusunan produk hukum belum dilakukan secara optimal dan melibatkan pemangku kepentingan terkait | Produk Hukum Daerah tidak terimplementasi secara efektif |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tidak tertanganinya permasalahan hukum di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | 12 | Kepala Biro Hukum | Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan permasalahan hukum di Jawa Tengah | Ketidakpastian hukum terhadap permasalahan hukum yang ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah |
| Ketidaksesuaian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya | 12 | Kepala Biro Hukum | Ketidaksesuaian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya | Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota tidak terimplementasi secara efektif |
| Tidak tercatatnya aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada di daerah | 4 | Sub Koordinat HAM | Pengamanan aset oleh pembantu pengelola barang milik daerah dan pengguna barang milik daerah kurang maksimal | Hilangnya aset Pemerintah Provinsi Jateng di daerah yang bermula dari pemanfaatan liar oleh orang yang tidak bertanggungjawab |
| Keterlambatan penyusunan laporan keuangan | 4 | Kepala Biro Hukum | Kurangnya data dukung pada laporan keuangan | Terhambatnya operasional kegiatan |
| 'Ketidaksesuaian Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya. | 9 | Kepala Bagian Perundang-undangan | Organisasi Perangkat Daerah pemrakarsa rancangan Peraturan Daerah kurang tanggap dengan peraturan perundang-undangan sektor lain dan terbaru namun hanya mengetahui substansi peraturan perundang-undangan sektornya | Ditetapkannya Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum |
| Ketidaksesuaian Keputusan Gubernur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya | 9 | Kepala Bagian Perundang-undangan | Organisasi Perangkat Daerah pemrakarsa Keputusan Gubernur kurang tanggap dengan peraturan perundang-undangan sektor lain dan terbaru namun hanya mengetahui substansi peraturan perundang-undangan sektornya | Ditetapkannya Keputusan Gubernur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum |
| Ketidaksesuaian kajian produk Hukum dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya | 9 | Kepala Bagian Perundang-undangan | Organisasi Perangkat Daerah pemrakarsa dalam kajian produk hukum kurang tanggap dengan peraturan perundang-undangan sektor lain dan terbaru namun hanya mengetahui substansi peraturan perundang-undangan sektornya | Ditetapkannya kajian produk hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ketidaksesuaian Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah/ Peraturan DPRD Kabupaten/ Kota dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan sehingga menimbulkan permasalahan | 12 | Kepala Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota | Pemerintah Kabupaten/Kota tidak menyampaikan Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah/ Peraturan DPRD Kabupaten/ Kota yang telah ditetapkan | Terdapat Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum |
| Tidak tertanganinya perkara Perdata/Tata Usaha Negara yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan baik | 4 | Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM | Kurangnya jumlah SDM yang memahami mekanisme penanganan perkara Perdata/Tata Usaha Negara | Kalahnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam sengketa perkara Perdata/Tata Usaha Negara |
| Tidak tertanganinya perkara masyarakat miskin dengan baik | 4 | Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM | Kurangnya anggaran dan jumlah Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi untuk bekerjasama dengan Pemprov Jateng dalam penanganan masyarakat miskin | Tidak terpenuhinya hak masyarakat miskin untuk mendapatkan perlindungan hukum |
| Tidak tercatatnya aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada di daerah | 4 | Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM | Pengamanan aset oleh pembantu pengelola barang milik daerah dan pengguna barang milik daerah kurang maksimal | Hilangnya aset Pemerintah Provinsi Jateng di daerah yang bermula dari pemanfaatan liar oleh orang yang tidak bertanggungjawab |
| Masih banyaknya pelaku usaha rokok yang belum diberdayakan | 12 | Kepala Sub Bagian TU Biro Hukum | Belum adanya dukungan dana yang maksimal | Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota tidak terimplementasi secara efektif |
| adanya informasi yang tidak tersampaikan | 4 | Kasubag TU Biro Hukum | Keterbatasan SDM | Terhambatnya proses pelayanan jasa surat |

**Lampiran 4**
**Rencana Tindak Pengendalian**

| Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD | Pernyataan Resiko | Skala Risiko | Sebab | Dampak | Rencana Tindak Pengendalian | Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **BIRO PEMOTDAKER** | | | | | | | | |
| Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang pemerintahan, kerjasama dan otonomi daerah | Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti | Adanya aduan masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban umum | 12 | Rekomendasi kebijakan kurang mengakomodir permasalahan di lapangan | Menghambat proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat | Mengadakan rapat koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kab./Kota | Kepala Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama | 1 tahun |
| Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang pemerintahan, kerjasama dan otonomi daerah | Persentase tertib administrasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Ketidakpatuhan Kab/Kota terhadap administrasi penataan urusan | 12 | Kurangnya pemahaman Kab/Kota terhadap Peraturan yang berlaku | Proses penyelenggaraan pemerintah terhambat | (1) Mengadakan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kab/Kota<br>(2) Penertiban pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai kewenangan | Kepala Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama | 1 tahun |

| Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD | Pernyataan Resiko | Skala Risiko | Sebab | Dampak | Rencana Tindak Pengendalian | Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BIRO HUKUM** | | | | | | | | |
| Meningkatkan kualit | Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan | Perencanaan penyusunan produk hukum belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan perundang undangan | 12 | Kajian penyusunan produk hukum belum dilakukan secara optimal dan melibatkan pemangku kepentingan terkait | Produk Hukum Daerah tidak terimplementasi secara efektif | (1) Monitoring terhadap produk hukum<br>(2) Analisis dan evaluasi produk hukum<br>(3) Penyusunan produk hukum sesuai hasil evaluasi | Kepala Biro Hukum | 1 tahun |
| Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah | Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani | Tidak tertanganinya permasalahan hukum di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | 12 | Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan permasalahan hukum di Jawa Tengah | Ketidakpastian hukum terhadap permasalahan hukum yang ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | (1) Melaksanakan koordinasi dengan instansi yang berkepentingan (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, APH maupun masyarakat)<br>(2) Melaksanakan pengkajian dan pemetaan terkait permasalahan hukum<br>(3) Melaksanakan fasilitasi penyelesaian aduan masyarakat baik secara langsung (mediasi dan koordinasi) dan secara bersurat (surat tanggapan)<br>(4) Melaksanakan negosiasi guna penyelesaian sengketa aset antara Pemerintah dengan Masyarakat<br>(5) Penyusunan dokumen pengadilan dalam rangka penanganan permasalahan hukum di Peradilan | Kepala Biro Hukum | 1 tahun |

| Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD | Pernyataan Resiko | Skala Risiko | Sebab | Dampak | Rencana Tindak Pengendalian | Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah | Persentase rancangan produk hukum yang kabupaten/kota yang dikaji | Ketidaksesuaian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya | 12 | Ketidaksesuaian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya | Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota tidak terimplementasi secara efektif | (1) Penyusunan surat rekomendasi hasil fasilitasi dan evaluasi rancangan produk hukum Kab/Kota<br>(2) Pembinaan dan pengawasan rancangan produk hukum sesuai hasil rekomendasi | Kepala Biro Hukum | 1 tahun |
| Meningkatkan kualitas dan efektifitas produk hukum daerah Kabupaten/Kota | Persentase rancangan produk hukum yang kabupaten/kota yang dikaji | Ketidaksesuaian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya | 16 | Ketidaksesuaian substansi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya | Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota tidak terimplementasi secara efektif | (1) Penyusunan surat rekomendasi hasil fasilitasi dan evaluasi rancangan produk hukum Kab/Kota<br>(2) Pembinaan dan pengawasan rancangan produk hukum sesuai hasil rekomendasi | Kepala Biro Hukum | 1 tahun |

| Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD | Pernyataan Resiko | Skala Risiko | Sebab | Dampak | Rencana Tindak Pengendalian | Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah Biro Hukum | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Hukum | Masih banyaknya pelaku usaha rokok yang belum diberdayakan | 12 | Belum adanya dukungan dana yang maksimal | Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota tidak terimplementasi secara efektif | Fasilitasi dalam perijinan | Kepala Biro Hukum | 1 tahun |
| **BIRO KESRA** | | | | | | | | |
| Meningkatnya efektivitas pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik | Pemenuhan persyaratan pencairan dana hibah membutuhkan waktu lama. | 12 | Verifikasi proposal membutuhkan waktu karena masih dilakukan secara manual | Tidak terfasilitasinya sarana dan prasarana keagamaan karena persyaratan yang tidak lengkap | (1) Pembuatan aplikasi proposal Dana Hibah<br>(2) Sosialisasi mekanisme pengelolaan hibah<br>(3) Bintek pengelolaan aplikasi | Kepala Biro Kesra | 1 tahun |
| Meningkatnya kualitas Pembinaan Mental Spiritual | Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku | Pemenuhan persyaratan dana hibah membutuhkan waktu yang lama | 12 | Verifikasi masih dilakukan secara manual | Tidak terfasilitasinya sarana dan prasarana keagamaan | (1) Pembuatan aplikasi proposal Dana Hibah<br>(2) Sosialisasi mekanisme pengelolaan hibah<br>(3) Bintek pengelolaan aplikasi | Kepala Biro Kesra | 1 tahun |

| Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD | Pernyataan Resiko | Skala Risiko | Sebab | Dampak | Rencana Tindak Pengendalian | Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BIRO PEREKONOMIAN** | | | | | | | | |
| Meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan perekonomian mikro | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan | Kualitas data kurang valid | 12 | kurangnya kualitas data dan informasi dari stakeholder | Rekomendasi Kebijakan kurang sesuai dengan kebutuhan penyelesaian masalah | (1) Melaksanakan Koordinasi dengan stakeholder terkait dan penyedia data<br>(2) Pengumpulan dan validasi data | Kepala Biro Perekonomian | 1 tahun |
| Meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan perekonomian makro | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan | Kualitas data kurang valid | 12 | kurangnya kualitas data dan informasi dari stakeholder | Rekomendasi Kebijakan kurang sesuai dengan kebutuhan penyelesaian masalah | (1) Melaksanakan Koordinasi dengan stakeholder terkait dan penyedia data<br>(2) Pengumpulan dan validasi data | Kepala Biro Perekonomian | 1 tahun |
| Meningkatkan Capaian Kinerja BUMD Jasa Keuangan | Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan | Adanya fraud (penyalahgunaan keuangan) yang terjadi di BUMD | 16 | GCG belum sepenuhnya dilaksanakan | Adanya kerugian perusahaan yang dapat berdampak pada turunnya laba. | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan GCG untuk seluruh BUMD | Kepala Biro Perekonomian | 1 tahun |

| Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD | Pernyataan Resiko | Skala Risiko | Sebab | Dampak | Rencana Tindak Pengendalian | Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan Capaian Kinerja BUMD Jasa Aneka Usaha | Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha | Kurang maksimalnya ketercapaian laba dari BUMD | 12 | Pelaksanaan GCG dan roadmap penyertaan modal belum optimal | Reputasi Pemerintah Daerah akan menurun di mata masyarakat apabila terjadi Likuidasi | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan GCG untuk seluruh BUMD | Kepala Biro Perekonomian | 1 tahun |
| **BIRO ISDA** | | | | | | | | |
| Meningkatkan kualitas pengelolaan kebijakan dan koordinasi bidang Infrastruktur dan SDA | Persentase capaian kinerja program bidang pertanian | Rekomendasi kebijakan tidak ditindaklanjuti oleh OPD teknis bidang pertanian | 12 | Koordinasi kebijakan bidang pertanian yang belum optimal dalam mensinergikan agenda pemerintah (Kab./Kota, Provinsi dan pusat ) | Rekomendasi Kebijakan tidak bisa mengakomodir penyelesaian masalah di lapangan | (1) Menentukan agenda masalah kebijakan dan formulasi kebijakan penyelesaian dengan melibatkan bersama OPD, Pemerintah Pusat dan stakeholder terkait<br>(2) Melakukan monitoring implementasi kebijakan bidang pertanian | Kepala Biro Infrastruktur dan SDA | 1 tahun |

| Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD | Pernyataan Resiko | Skala Risiko | Sebab | Dampak | Rencana Tindak Pengendalian | Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan kualitas pengelolaan kebijakan dan koordinasi bidang Infrastruktur dan SDA | Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan | Rekomendasi kebijakan tidak ditindaklanjuti oleh OPD teknis bidang lingkungan hidup dan pertambangan | 12 | Koordinasi kebijakan bidang lingkungan hidup dan pertambangan yang belum optimal dalam mensinergikan agenda pemerintah (Kab./Kota, Provinsi dan pusat ) | Rekomendasi Kebijakan tidak bisa mengakomodir penyelesaian masalah di lapangan | (1) Menentukan agenda masalah kebijakan dan formulasi kebijakan penyelesaian dengan melibatkan bersama OPD, Pemerintah Pusat dan stakeholder terkait<br>(2) Melakukan monitoring implementasi kebijakan LH dan Pertambangan | Kepala Biro Infrastruktur dan SDA | 1 tahun |
| Meningkatkan kualitas pengelolaan kebijakan dan koordinasi bidang Infrastruktur dan SDA | Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur | Rekomendasi kebijakan tidak ditindaklanjuti oleh OPD teknis | 12 | Koordinasi kebijakan bidang pertanian yang belum optimal dalam mensinergikan agenda pemerintah (Kab./Kota, Provinsi dan pusat ) | Rekomendasi Kebijakan tidak bisa mengakomodir penyelesaian masalah di lapangan | (1) Menentukan agenda masalah kebijakan dan formulasi kebijakan penyelesaian dengan melibatkan bersama OPD, Pemerintah Pusat dan stakeholder terkait<br>(2) Melakukan monitoring implementasi kebijakan bidang Infrastruktur | Kepala Biro Infrastruktur dan SDA | 1 tahun |
| Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah Biro Isda | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam | Masih banyaknya pelaku usaha rokok yang belum diberdayakan | 12 | Belum adanya dukungan dana yang maksimal | Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota tidak terimplementasi secara efektif | Fasilitasi dalam perijinan | Kepala Biro Isda | 1 tahun |

| Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD | Pernyataan Resiko | Skala Risiko | Sebab | Dampak | Rencana Tindak Pengendalian | Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BIRO APBJ** | | | | | | | | |
| Meningkatnya Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa | Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa | Keuangan (realisasi anggaran), dan kinerja (tidak tercapainya output) | 12 | a) terdapat kesalahan dalam proses evaluasi,<br>b) tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan<br>c) tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran,<br>d) ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah, perubahan dan aturan turunannya,<br>e) seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, nepotisme,<br>f) seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat,<br>g) seluruh penawaran harga tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya di atas HPS,<br>h)negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai,<br>i) korupsi, kolusi, nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan / PPK | Pengelolaan Pengadaan Kurang Optimal | (1) Bintek permasalahan Bidang Hukum PBJ<br>(2) Sosialisasi legalitas mekanisme proses pengadaan<br>(3) Pendampingan Penyusunan RUP<br>(4) Review dokumen PBJ | Kepala Biro APBJ | 1 tahun |
| **BIRO ADM. BANGDA** | | | | | | | | |
| Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang administrasi pembangunan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan | Persentase capaian pelaksanaan APBN | Pelaksanaan kegiatan APBN tidak sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan | 16 | Rencana kegiatan tidak disusun dengan cermat (tidak mempertimbangkan faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan) | Pelaksanaan kegiatan terlambat dan/atau tidak selesai dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran | Pemantauan dan evaluasi progres pelaksanaan kegiatan APBN secara berkala | Kepala Biro Bangda | 1 tahun |

| Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD | Pernyataan Resiko | Skala Risiko | Sebab | Dampak | Rencana Tindak Pengendalian | Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang administrasi pembangunan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan | Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah | Laporan pelaksanaan kegiatan dan kinerja tidak lengkap dan informatif | 12 | Data kurang lengkap dan tidak sesuai dengan kaidah pelaporan | Laporan tidak bisa ditindaklanjuti sebagai bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan | (1) maintanance secara rutin sistem aplikasi yang ada<br>(2) Desk Rekonsiliasi data laporan pelaksanaan APBD<br>(3) Desk Validasi capaian kinerja triwulanan<br>(4) Asistensi dan konsultasi pelaporan kinerja dan pelaksanaan APBD | Kepala Biro Bangda | 1 tahun |
| Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang administrasi pembangunan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan | Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah yang direalisasi | Rekomendasi kebijakan yang disusun tidak relevan dengan kondisi sumber daya yang ada | 16 | Keterbatasan sumber daya dalam menindaklanjuti rekomendasi | Rekomendasi kebijakan yang disusun tidak dapat diterapkan | Pemantauan dan evaluasi progres pelaksanaan rekomendasi kebijakan | Kepala Biro Bangda | 1 tahun |
| Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | Tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan | 10 | Dinamika kondisi di lapangan | Perlu dilakukan penyesuaian dokumen perencanaan dan target | Mapping Biro-Biro lingkup Setda yang masih bermasalah dalam penyajian data kinerja untuk kemudian dilaksanakan monitoring dan evaluasi | Kepala Biro Bangda | 1 tahun |

| Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD | Pernyataan Resiko | Skala Risiko | Sebab | Dampak | Rencana Tindak Pengendalian | Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan kualitas pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | Laporan evaluasi capaian kinerja tidak lengkap dan informatif | 20 | Kurangnya pemahaman OPD terhadap definisi operasional indikator kinerjanya | Data capaian kinerja yang disajikan tidak sesuai | Mapping OPD yang masih bermasalah dalam penyajian data kinerja untuk kemudian dilaksanakan monitoring dan evaluasi | Analis Kebijakan Ahli Madya | 1 tahun |
| Meningkatkan kualitas pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah | Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap | Ketidakpatuhan user pelaporan bantuan keuangan desa dalam melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan | 12 | Pergantian user pelaporan tidak disertai transfer ilmu antara personil lama dengan yang baru | Data progres pelaksanaan bantuan keuangan desa kurang valid | Memaksimalkan pelaksanaan pendampingan penggunaan aplikasi bantuan keuangan Desa | Analis Kebijakan Ahli Madya | 1 tahun |
| Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan APBD | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN | Anggaran DAK tidak tersalur sesuai tahapannya dari Pusat | 15 | Persyaratan penyaluran DAK tidak terpenuhi | Kegiatan yang anggarannya bersumber dari DAK tidak dapat dilaksanakan/dilanjutkan | Mapping OPD/kegiatan yang masih bermasalah dalam progres pelaksanaan DAK untuk kemudian dilaksanakan pemantauan dan evaluasi | Analis Kebijakan Ahli Muda | 1 tahun |

| Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD | Pernyataan Resiko | Skala Risiko | Sebab | Dampak | Rencana Tindak Pengendalian | Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BIRO ORGANISASI** | | | | | | | | |
| Meningkatnya efektivitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Jawa Tengah | Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi | Capaian nilai Tingkat Kematangan Organisasi Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai target | 12 | 1. OPD kurang peduli terhadap pentingnya proses penilaian Kematangan Organisasi Daerah<br>2. Kurangnya pemahaman pejabat pengampu akan variabel penilaian karena terjadinya alih tugas jabatan<br>3. OPD kurang memperhatikan target waktu yang telah ditetapkan | Indeks kematangan Kebijakan prov Jateng tidak optimal | 1. Asistensi tingkat lanjut hasil pengukuran TKOD OPD.<br>2. Penguatan kapasitas sumberdaya pengukuran indeks kematangan kebijakan ( Bimtek anjak, Asistensi Anjak, FGD , penyusunan aplikasi )<br>3. Evaluasi dan Pembinaan OPD dalam rangka peningkatan kualitas kematangan TKOD<br>4. Fasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah<br>5. Monitoring dan evaluasi penataa kelembagaan perangkat daerah | Kepala Biro Organisasi | 1 Tahun |
| Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah | Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A | perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A nilainya dapat menurun | 12 | 1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah belum maksimal.<br>2. Bukti Dukung dalam pelaksanaan PMPRB belum terpenuhi.<br>3. Belum adanya Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah.<br>4. Evaluator yang melaksanakan evaluasi PMPRB Perangkat Daerah belum maksimal dikarenakan belum adanya pedoman/juknis evaluasi.<br>5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum disesuaikan dengan Rencana Kerja RB turunan dari Road Map RB.<br>6. Belum adanya standarisasi dan pedoman dalam pemenuhan bukti dukung PMPRB.<br>7. Perbedaan persepsi antara evaluator dengan perangkat daerah yang melaksanakan RB. | Nilai Indeks RB Perangkat Daerah rendah. | 1. Pengawalan tindaklanjut hasil verifikasi data dukung PMPRB OPD<br>2. Validasi PMPRB OPD<br>3. Pendampingan tindaklanjut hasil validasi PMPRB OPD<br>4. Pembinaan implementasi core values ASN BerAKHLAK di OPD | Kepala Biro Organisasi | 1 tahun |

| Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD | Pernyataan Resiko | Skala Risiko | Sebab | Dampak | Rencana Tindak Pengendalian | Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya efektivitas pelaksanaan ketatalaksanan dan pelayanan publik di Jawa Tengah | Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan | Nilai kepatuhan standar pelayanan publik dan indeks kualitas pelayanan publik tidak tercapai | 12 | 1. Kurangnya pemahaman UPP terhadap pentingnya Standar Pelayanan.<br>2. Masih kurangnya pendampingan dan monitoring kepada UPP terkait Standar Pelayanan,<br>3. Tidak adanya sanksi yang tegas bagi UPP yang tidak menyusun dan mengimplementasikan Standar Pelayanan | 1. Kualitas pelayanan publik belum optimal<br>2. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayan publik rendah | 1. Sosialisasi Standar Pelayanan kepada UPP di Jawa Tengah<br>2. Fasilitasi/Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanann di UPP<br>3. Reviu Standar Pelayanan di UPP<br>4. Monitoring dan Evaluasi implementasi kepatuhan Standar Pelayanan di UPP | Kepala Biro Organisasi | 1 tahun |
| Meningkatnya efektifitas pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi Kab/Kota | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD | perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A nilainya dapat menurun | 12 | 1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah belum maksimal.<br>2. Bukti Dukung dalam pelaksanaan PMPRB belum terpenuhi.<br>3. Belum adanya Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah.<br>4. Evaluator yang melaksanakan evaluasi PMPRB Perangkat Daerah belum maksimal dikarenakan belum adanya pedoman/juknis evaluasi.<br>5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum disesuaikan dengan Rencana Kerja RB turunan dari Road Map RB.<br>6. Belum adanya standarisasi dan pedoman dalam pemenuhan bukti dukung PMPRB. | Nilai Indeks RB Perangkat Daerah rendah. | 1. Pengawalan tindaklanjut hasil verifikasi data dukung PMPRB OPD<br>2. Validasi PMPRB OPD<br>3. Pendampingan tindaklanjut hasil validasi PMPRB OPD<br>4. Pembinaan implementasi core values ASN BerAKHLAK di OPD | Kepala Biro Organisasi | 1 tahun |

| Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD | Pernyataan Resiko | Skala Risiko | Sebab | Dampak | Rencana Tindak Pengendalian | Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya efektifitas pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi Kab/Kota | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik | Nilai kepatuhan standar pelayanan publik dan indeks kualitas pelayanan publik tidak tercapai | 12 | 1. Kurangnya pemahaman UPP terhadap pentingnya Standar Pelayanan.<br>2. Masih kurangnya pendampingan dan monitoring kepada UPP terkait Standar Pelayanan,<br>3. Tidak adanya sanksi yang tegas bagi UPP yang tidak menyusun dan mengimplementasikan Standar Pelayanan | 1. Kualitas pelayanan publik belum optimal<br>2. Tingkat Kepuasan Msyarakat terhadap pelayanan publik rendah | 1. Sosialisasi Standar Pelayanan kepada UPP di Jawa Tengah<br>2. Fasilitasi/Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanann di UPP<br>3. Reviu Standar Pelayanan di UPP<br>4. Monitoring dan Evaluasi implementasi kepatuhan Standar Pelayanan di UPP | Kepala Biro Organisasi | 1 tahun |
| **BIRO UMUM** | | | | | | | | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian Rumah Tangga Setda | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda | Terjadinya pelayanan pimpinan dan masyarakat yang tidak maksimal karena keterbatasan peralatan pendukung kegiatan yang memadai | 12 | Banyak sarana dan prasarana yang sudah tidak representatif dikarenakan usia dan waktu pemakaian | Pelayanan yang tidak maksimal kepada pimpinan dan masyarakat yang rentan terjadi kendala pada saat pelaksanaan kegiatan | Akan dilakukan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan secara bertahap dan pemeliharaan secara berkala | Kepala Biro Umum | 1 tahun |
| Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Terjadinya pelayanan masyarakat yang tidak maksimal karena keterbatasan anggaran pemeliharaan peralatan pendukung kegiatan | 12 | Banyak sarana dan prasarana yang sudah tdak laik pakai dikarenakan usia dan waktu pemakaian | Pelayanan yang tidak maksimal kepada masyarakat dan rentan terjadi kendala pada saat pelaksanaan kegiatan | Akan dilakukan pemeliharaan barang secara berkala | Kepala Biro Umum | 1 tahun |